

PENYUSUNAN EVALUASI KINERJA PEREKONOMIAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2019



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPPEDA)
SURAKARTA
2020**

**PENYUSUNAN EVALUASI KINERJA
PEREKONOMIAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2019**

**Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Tahun 2020**

PRAKATA

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik, hidayah dan kekuatan Nya sehingga penulisan Penyusunan Evaluasi Kinerja Perekonomian Kota Surakarta Tahun 2019 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan laporan akhir Penyusunan Evaluasi Kinerja Perekonomian Kota Surakarta Tahun 2019 yang disusun oleh Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Surakarta.

Bidang Ekonomi Bappeda dan Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak terutama segenap pimpinan dan pegawai di Bappeda Kota Surakarta yang telah membantu mengalokasikan anggaran, support data, dan memberikan berbagai masukan yang konstruktif dari berbagai pihak dalam menyelesaikan dan menyempurnakan kajian ini.

Semoga kajian dapat bermanfaat untuk kemajuan pembangunan di Kota Surakarta.

Surakarta, 2020

Bidang Ekonomi Bappeda Surakarta

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Kegiatan	2
1.3. Manfaat Kegiatan	3
1.4. Lingkup Kegiatan	3
1.5. Metodologi	4
1.6. Sistematika Laporan	7
BAB II GAMBARAN UMUM KINERJA PEREKONOMIAN KOTA SURAKARTA	8
2.1. Visi Dan Misi Kota Surakarta	8
2.2. Tema Pembangunan Kota Surakarta	11
2.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi	12
2.3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan	14
2.4. Kesejahteraan	16
2.5. Kemiskinan	20
2.6. Pendidikan	21
BAB III KONSEP DAN METODE KAJIAN	24
3.1. Aspek Kependudukan dalam Pembangunan Daerah	24
3.2. Pengangguran, Kemiskinan, Pembangunan Ekonomi Lokal ..	27
3.3. Kependudukan dan Pertumbuhan Ekonomi	30
3.4. Kemiskinan	31
3.5. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi	33
3.6. Konsentrasi Kemiskinan	35
3.7. Metodologi	36
A. Pendekatan Kajian	36
B. Sumber dan Ketersediaan Data	37

	C. Prosedur Penentuan PDRB Kecamatan	38
	D. Kerangka Pikir Kajian	39
	3.8. Hasil Pengolahan Data	40
BAB IV	HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	42
	4.1. Analisis Evaluasi erekonomian Kota Surakarta	42
	A. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi	42
	B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	45
	C. Inflasi	49
	D. Kemiskinan dan Ketimpangan	51
	E. Ketenagakerjaan	55
	F. ICOR dan Produk Dosmestik Regional Bruto (PDRB)	62
	G. LQ dan Shift-Share	63
	H. Analisis Rasio PDRB	71
	I. Analisis Makro Keuangan Daerah	74
	4.2. Analisis Perbandingan Antar Wilayah Di Jawa Tengah	78
	A. Petumbuhan Ekonomi dan Inflasi	78
	B. Kemiskinan dan Ketimpangan	80
	C. Tingkat Pengangguran	86
	D. Indikator Sosial dan Kesejahteraan	87
	4.3. Analisis Capaian Kinerja Indkator RPJMD	93
BAB V	Kesimpulan dan Rekomendasi	97
	5.1. Kesimpulan	97
	5.2. Rekomendasi	97
	DAFTAR PUSTAKA	99
	LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Matriks Kinerja	6
Tabel 1.2	Matrik Kinerja Berdasarkan Informasi Analisis Capaian Indikator Kinerja dan Analisis Kinerja	7
Tabel 2.1	Target Indikator perekonomian RPJMD Kota Surakarta	10
Tabel 2.2	Struktur PDRB Kota Surakarta Tahun 2010-2019	13
Tabel 2.3	PDRB Kota Surakarta Pendekatan Pengeluaran Tahun 2010- 2019	14
Tabel 2.4	Perbandingan Jumlah dan Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk Tahun 2013-2019	15
Tabel 2.5	Sebaran Penduduk Kota Surakarta Tahun 2019	16
Tabel 2.6	Indikator Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2010-2019	21
Tabel 2.7	Indikator Kemiskinan Kota Surakarta Berdasarkan Pendidikan Tahun 2010-2019	22
Tabel 3.1	Pertumbuhan Ekonomi	40
Tabel 3.2	Angka Harapan Hidup (AHH)	40
Tabel 3.3	Harapan Lama Sekolah	40
Tabel 3.4	Rata-Rata Lama Sekolah	41
Tabel 3.5	Pengeluaran Perkapita	41
Tabel 4.1	PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2016 dan 2019	43
Tabel 4.2	Proporsi dan Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harg Berlaku Tahun 2016 dan 2019	44
Tabel 4.3	Proporsi dan Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 dan 2019	45
Tabel 4.4	PDRB Perkapita Kota Surakarta Tahun 2010-2019	47
Tabel 4.5	Pertumbuhan PDRB Perkapita Kota Surakarta Tahun 2011- 2019.....	47
Tabel 4.6	PDRB Perkapita Kota Surakarta Tahun 2013-2019 Berdasarkan Data Jumlah Penduduk Disdukcapil	47
Tabel 4.7	Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Surakarta vs Wilayah Lain Tahun 2010-2019	48

Tabel 4.8	Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah Tahun 2010-2019	48
Tabel 4.9	Perkembangan Laju Inflasi Berdasarkan Kelompok Barang ...	50
Tabel 4.10	Perbandingan Inflasi Sektoral 2011, 2016, dan 2018	51
Tabel 4.11	Indikator Kemiskinan Surakarta 2010-2019	52
Tabel 4.12	Indeks Gini Kota Surakarta vs Provinsi Jawa Tengah vs Indonesia	55
Tabel 4.13	Indikator Ketenagakerjaan Kota Surakarta Tahun 2010-2019 ..	56
Tabel 4.14	Perbandingan Penduduk yang Bekerja dengan PDRB Tahun 2018	60
Tabel 4.15	ICOR Kota Surakarta 2011-2019	62
Tabel 4.16	Perbandingan ICOR Kota Surakarta vs Provinsi vs Nasional	63
Tabel 4.17	Nilai Static LQ dan Dynamic LQ Kota Surakarta 2015-2019	66
Tabel 4.18	Overlay SLQ dan DLQ Sektor Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2019	67
Tabel 4.19	Nilai Shift Share 2015-2019 Kota Surakarta	69
Tabel 4.20	Nilai Shift Share Dinamis Tahun 2015-2019	70
Tabel 4.21	Perbandingan Rasio Ekspor Terhadap PDRB Kota Surakarta vs Provinsi Jawa Tengah vs Indonesia	71
Tabel 4.22	Perbandingan Rasio Ekspor Terhadap PMTB Kota Surakarta vs Provinsi Jawa Tengah vs Indonesia	72
Tabel 4.23	Perkembangan Realisasi APBD Kota Surakarta 2015-2019	75
Tabel 4.24	Rasio APBD Kota Surakarta Tahun 2015-2019	77
Tabel 4.25	Perbandingan Rasio APBD Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2019	77
Tabel 4.26	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Surakarta vs Provinsi Jawa Tengah vs Indonesia Tahun 2010-2019	78
Tabel 4.27	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah Tahun 2010-2019	79
Tabel 4.28	Perbandingan Inflasi Surakarta vs Provinsi Jawa Tengah vs Indonesia Tahun 2010-2019	80
Tabel 4.29	Perbandingan Inflasi Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah Tahun 2010-2019	80

Tabel 4.30	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Surakarta vs Provinsi Jawa Tengah vs Indonesia Tahun 2010-2019	81
Tabel 4.31	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah Tahun 2010-2019	82
Tabel 4.32	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2010-2019	83
Tabel 4.33	Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2010-2019	83
Tabel 4.34	Perbandingan Garis Kemiskinan Surakarta vs Provinsi Jawa Tengah vs Indonesia Tahun 2010-2019	85
Tabel 4.35	Perbandingan Garis Kemiskinan Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah Tahun 2010-2019	85
Tabel 4.36	Perbandingan Indeks Gini Surakarta vs Provinsi Jawa Tengah vs Indonesia Tahun 2010-2019	86
Tabel 4.37	Perbandingan Indeks Gini Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah	87
Tabel 4.38	Perbandingan Tingkat Pengangguran Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah Tahun 2010-2019	88
Tabel 4.39	Perbandingan Tingkat Pengangguran Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah Tahun 2010-2019	88
Tabel 4.40	Komponen IPM Kota Surakarta vs Provinsi vs Nasional Tahun 2010-2019	89
Tabel 4.41	Perbandingan Komponen IPM Antar Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2019	90
Tabel 4.42	Perbandingan IPM Surakarta vs Provinsi Jawa Tengah vs Indonesia Tahun 2010-2019	91
Tabel 4.43	Perbandingan IPM Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah Tahun 2010-2019	92
Tabel 4.44	Perbandingan APK Antar Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2018	93
Tabel 4.45	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender	94

Tabel 4.46	Evaluasi Capaian Kinerja Perekonomian Kota Surakarta Tahun 2019	95
Tabel 4.47	Proyeksi Sebelum dan Sesudah Covid-19	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta 2010-2019	12
Gambar 2.2.	Tingkat Pengangguran 2010-2018	16
Gambar 2.3.	Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta 2010-2019	17
Gambar 2.4.	Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Kota Surakarta 2011-2019	18
Gambar 2.5.	Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta 2010-2019	19
Gambar 2.6.	Gini Ratio Kota Surakarta 2000-2015	20
Gambar 2.7.	Angka Partisipasi Sekolah Kota Surakarta Tahun 2010-2018 ..	23
Gambar 3.1	Kurva Lorenz	34
Gambar 3.2	Kerangka Pemikiran	39
Gambar 4.1.	Perkembangan Laju Inflasi 2010-2019	49
Gambar 4.2.	Indes Gini Kota Surakarta Tahun 2000-2015	54
Gambar 4.3.	Usia Pengangguran Kota Surakarta Tahun 2018	57
Gambar 4.4.	Pendidikan Tertinggi Pengangguran Kota Surakarta Tahun 2018	58
Gambar 4.5.	Latar Belakang Pengangguran Kota Surakarta Tahun 2018	59
Gambar 4.6.	Tax Ratio Kota Surakarta Tahun 2010-2019	73
Gambar 4.7.	Rasio PAD Terhadap PDRB Kota Surakarta Tahun 2010-2019 ..	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Evaluasi merupakan kegiatan yang mutlak diperlukan dalam pembangunan daerah. Berbagai peraturan perundangan menyatakan bahwa kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap daerah, misalnya evaluasi pelaksanaan RKPD atau RPJMD. Selain itu, evaluasi juga dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan tujuan tertentu.

Menurut *Local Economic and Employment Development* atau LEED (2009) evaluasi dalam terminologi ekonomi adalah penentuan perkembangan kemajuan dari kebijakan, program, atau proyek yang menyebabkan perubahan. Evaluasi merupakan hal yang sangat penting kaitannya dengan pembuatan kebijakan dan perencanaan. Evaluasi memungkinkan desain dan modifikasi kebijakan dan program yang dibuat dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Pengertian lain dari evaluasi diungkapkan oleh Chelimsky (1989) yaitu suatu metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi dan efektivitas suatu program. Wirawan (2006) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai objek yang dievaluasi, menilainya dengan standar evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek yang dievaluasi. Dari beberapa pengertian yang ada memberikan pengertian yang secara substantif sama, bahwa evaluasi merupakan cara yang dipergunakan untuk melihat bagaimana implementasi dari program atau kebijakan yang telah disusun sebelumnya, melalui suatu metode tertentu.

Menurut LEED (2009) evaluasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif (*summative evaluation*). Evaluasi formatif merupakan evaluasi terhadap suatu proses sedangkan evaluasi sumatif merupakan evaluasi terhadap dampak atau *outcome*. Evaluasi formatif berfokus pada bagaimana program dijalankan sedangkan evaluasi sumatif berfokus pada bagaimana hasil dari program tersebut.

Menurut LEED (2009) pengertian evaluasi berbeda dengan pengertian monitoring. Monitoring berkaitan dengan apa yang terjadi berdasarkan

informasi yang dikumpulkan sementara evaluasi memberikan dasar dalam justifikasi dan keputusan antara “ya” dan “tidak”, misalnya hasil evaluasi menyimpulkan suatu program “tercapai” dan “tidak tercapai” atau “sesuai” dan “tidak sesuai”, dan sebagainya. Untuk itu dalam evaluasi dibutuhkan data yang *reliable*, akurat, dan mutakhir (LEED, 2009:11). Solihin (2012) membedakan monitoring dan evaluasi dari aspek: tujuan, fokus, cakupan, serta waktu pelaksanaan. Dalam hal tujuan misalnya, monitoring menilai kemajuan dalam pelaksanaan program sementara evaluasi memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program. Dalam hal waktu, monitoring dilakukan secara terus menerus atau berkala selama pelaksanaan program sedangkan evaluasi dilaksanakan pada pertengahan atau akhir program.

Evaluasi kinerja perekonomian Kota Surakarta merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk melihat dan mengamati sejauh mana pembangunan daerah khususnya bidang perekonomian telah sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini perlu dilakukan agar kebijakan dan strategi yang telah disusun dapat berjalan efektif. Dengan kegiatan evaluasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi kinerja perekonomian Kota Surakarta, serta posisi Kota Surakarta diantara daerah lain sehingga kebijakan dan strategi yang disusun untuk periode ke depan dapat disusun secara lebih efektif berdasarkan situasi dan kondisi yang telah berjalan.

1.2. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah

1. Mengidentifikasi capaian kinerja perekonomian Kota Surakarta dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi, dan program di periode mendatang.
2. Mengidentifikasi permasalahan perekonomian Kota Surakarta yang muncul.
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi pembangunan perekonomian Kota Surakarta di periode pembangunan berikutnya.

1.3. Manfaat Kegiatan

Manfaat dari kegiatan ini adalah

1. Teridentifikasinya capaian kinerja perekonomian Kota Surakarta sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan perekonomian.
2. Dapat diketahuinya pokok-pokok permasalahan perekonomian Kota Surakarta sehingga dapat disusun prioritas kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi pokok permasalahan tersebut.
3. Tersusunnya alternatif rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil evaluasi dan pokok permasalahan dalam perekonomian Kota Surakarta.

1.4. Lingkup Kegiatan

Lingkup dari kegiatan ini adalah

1. Analisis capaian kinerja pembangunan ekonomi Kota Surakarta yang meliputi:
 - a) Analisis PDRB (PDRB perkapita, pertumbuhan ekonomi, sektoral PDRB)
 - b) Analisis ketenagakerjaan (angkatan kerja, pengangguran)
 - c) Analisis kemiskinan dan ketimpangan (tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan)
 - d) Analisis inflasi (inflasi umum, inflasi sektoral)
 - e) Analisis kesejahteraan masyarakat (angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pengeluaran riil masyarakat, IPM, IPG)
2. Analisis perbandingan capaian kinerja perekonomian Kota Surakarta dengan daerah lain (Solo Raya atau Jawa Tengah).
3. Analisis capaian kinerja pembangunan ekonomi Kota Surakarta sesuai dengan visi dan misi sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD).
 - a) Apakah prioritas dan sasaran pembangunan sudah sesuai dengan RPJMD?
 - b) Apakah rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja sesuai dan mengacu pada rencana program prioritas RPJMD?
 - c) Apakah indikator kinerja program dan kegiatan sesuai dan menunjang pencapaian target kinerja program prioritas RPJMD?

1.5. Metodologi

A. Tahapan Analisis

1. Studi literature tentang evaluasi kinerja perekonomian Kota Surakarta.
2. Identifikasi dan pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan tujuan dan lingkup studi.
3. Pengolahan dan analisis data sekunder tahap 1 dengan alat analisis yang disesuaikan.
4. Pengolahan dan analisis data tahap 2.
5. Penyajian hasil analisis dalam forum FGD (kinerja capaian indikator serta relevansinya dengan dokumen perencanaan daerah).
6. Penyempurnaan hasil analisis dan penyajian laporan akhir.

B. Alat Analisis

1. Analisis Capaian Kinerja perekonomian

a. Analisis PDRB

Alat analisis PDRB yang akan dipergunakan terdiri dari: analisis pertumbuhan ekonomi, analisis kontribusi sektoral, analisis rata-rata pertumbuhan ekonomi, analisis shift-share, dan analisis LQ.

b. Analisis Ketenagakerjaan

Dalam hal ketenagakerjaan, akan dipergunakan alat analisis berupa: analisis statistik (pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan, dan koefisien variasi) profil pengangguran berdasarkan sektor ekonomi dan jenis kelamin, analisis tingkat pengangguran, analisis pertumbuhan pengangguran.

c. Analisis Kemiskinan dan Ketimpangan

Alat analisis yang akan dipergunakan meliputi: analisis statistik profil kemiskinan, analisis tingkat kemiskinan, analisis ketimpangan dengan rasio Gini atau Indeks Williamson.

d. Analisis Inflasi

Inflasi akan dianalisis dengan alat berupa metode statistik (pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan, dan koefisien variasi) untuk melihat: profil inflasi secara umum serta inflasi sektoral.

e. Analisis Kesejahteraan Masyarakat

Analisis ini dilakukan dengan metode statistika (pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan, dan koefisien variasi) guna mendapatkan informasi perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat.

2. Analisis perbandingan capaian kinerja perekonomian Kota Surakarta dengan daerah lain.

Analisis ini dilaksanakan dengan menggunakan metode statistic untuk membandingkan secara kuantitatif posisi kinerja perekonomian Kota Surakarta dengan daerah lain.

3. Analisis capaian kinerja pembangunan ekonomi Kota Surakarta sesuai dengan visi dan misi.

Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan indikator perekonomian yang ada dengan indikator sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan RPJMD/RKPD yang dikaitkan dengan indikator visi-misi. Dalam pelaksanaan evaluasi, akan dilakukan analisis hal-hal sebagai berikut:

a. Tingkat Capaian Pelaksanaan Program Pembangunan bidang perekonomian kaitannya dengan visi-misi dengan fokus apakah program bidang perekonomian yang direncanakan telah dilaksanakan atau tidak?

b. Tingkat Capaian Kinerja dengan cara membandingkan realisasi pencapaian indikator kinerja bidang perekonomian daerah dengan rencana target kinerja. Hasil analisis akan dibagi menjadi:

- 1) Hasil analisis tingkat capaian kinerja program perekonomian daerah;
- 2) Analisis program apa saja yang dianggap perlu mendapat perhatian karena nilainya berada pada klasifikasi “Kurang Baik” atau “Sangat Kurang Baik”.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagaimana diuraikan di atas dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan antara realisasi kinerja dengan rencana kinerja pada setiap program dan kegiatan. Rencana kinerja dalam hal ini berupa target atau indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya baik indikator kinerja

input maupun indikator kinerja *output*. Dengan membandingkan diantara keduanya, akan diperoleh persentase capaian indikator kinerja sebagai berikut:

$$CIK = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Apabila hubungan antara realisasi dengan rencana negatif dalam arti semakin kecil nilainya semakin baik, maka akan digunakan formula sebagai berikut:

$$CIK = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

CIK=Capaian Indikator Kinerja (%).

2. Menyusun Matriks Kinerja

Penyusunan matriks kinerja ini dilakukan dengan cara membuat pemetaan (*mapping*) setiap program atau kegiatan ke dalam suatu matriks berdasarkan hasil analisis sebelumnya.

Tabel 1.1
Matriks Kinerja

		INDIKATOR KINERJA BIAYA		
		SANGAT TINGGI DAN TINGGI	SEDANG	RENDAH DAN SANGAT RENDAH
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SANGAT TINGGI DAN TINGGI			
	SEDANG			
	RENDAH DAN SANGAT RENDAH			

Selain itu, matriks juga dapat disusun berdasarkan informasi analisis capaian indikator kinerja dan analisis kinerja efisiensi seperti di bawah ini:

Tabel 1.2
Matrik Kinerja Berdasarkan Informasi Analisis Capaian Indikator
Kinerja dan Analisis Kinerja

		CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		
		SANGAT TINGGI DAN TINGGI	SEDANG	RENDAH DAN SANGAT RENDAH
ANALISIS KINERJA EFISIENSI	>1			
	<1			

Analisis kinerja efisiensi dalam hal ini merupakan perbandingan antara rencana biaya dengan realisasi biaya pada setiap program/kegiatan.

1.6. Sistematika Laporan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat, proses dan penyusunan Kajian Evaluasi Kinerja perekonomian Kota Surakarta.

BAB II : Gambaran Umum Perekonomian Kota Surakarta

Dalam bab ini akan diuraikan gambaran secara umum kinerja perekonomian Kota Surakarta, yang juga dikaitkan relevansinya dengan dokumen RPJMD dan RKPD, sehingga kegiatan analisis dapat lebih fokus.

BAB III : Konsep Evaluasi Pembangunan dan Metoda Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan tentang konsep dasar evaluasi pembangunan daerah khususnya bidang perekonomian, serta cara pengumpulan dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis ekonomi regional secara utuh mengenai kondisi perekonomian Kota Surakarta beserta analisis data dengan metode yang sesuai, sehingga dapat diketahui kinerja dan kesesuaian pembangunan ekonomi dengan dokumen visi dan misi sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

BAB V : Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis dan pembahasan dalam penyusunan kajian regional Kota Surakarta.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KINERJA PEREKONOMIAN KOTA SURAKARTA

2.1. Visi Dan Misi Kota Surakarta

Visi Kota Surakarta Tahun 2016–2021 adalah Terwujudnya Kota Surakarta sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera. Penjabaran Visi Kota Budaya akan diterjemahkan dalam Misi. Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus ada dan bagaimana komitmen terus dijaga oleh segenap *stakeholders* selaku pemangku kepentingan dalam pembangunan.

Misi Kepala Daerah Terpilih tahun 2016-2021 adalah “**Mewujudkan Masyarakat Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan, dan Papan.**” Penjabaran misi pembangunan Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut:

1. Waras

Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat.

2. Wasis

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri, dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah.

3. Wareg

Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani.

4. Mapan

Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter, dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif dan melayani.

5. Papan

Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi, pembangunan

infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya.

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, Surakarta perlu melakukan kerjasama dengan daerah sekitar. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh kondisi geografis Surakarta yang sangat strategis. Dalam RPJMD, sesuai RTRW Kawasan Kerjasama Regional yang terkait dengan Kota Surakarta adalah Kawasan Subosukawonosraten dan Kawasan Sosebo (Solo, Selo/Boyolali, dan Borobudur) yang memiliki SDA, kesuburan tanah, dan objek wisata. Dalam regional Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta dijadikan kawasan peruntukan industri skala wilayah untuk produk-produk unggulan berbasis industri kerajinan dan kawasan pariwisata.

Tingkat ketercapaian visi-misi dituangkan melalui berbagai indikator. Antara lain indikator perekonomian daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD. Indikator tersebut dipergunakan sebagai salah satu bentuk evaluasi kinerja perekonomian. Target indikator kinerja perekonomian Kota Surakarta hingga 2018 sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Target Indikator perekonomian RPJMD Kota Surakarta

No	Indikator	Target			
		2016	2017	2018	2019
1	Pertumbuhan ekonomi/PDRB	5 + 1	5 + 1	6 + 1	6+1
2	Tingkat inflasi	3 + 1	4 + 1	3 + 1	3+1
3	Indeks Gini	0,332	0,321	0.320	0,305
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,64	8,99	8.34	7,68
5	Angka Harapan Hidup (tahun)	77,08	77,11	77.16	77,19
6	Rata-rata lama sekolah (tahun)	10,44	10,51	10.59	10,67
7	Harapan lama sekolah (tahun)	14,34	14,53	14.73	14,94
8	Pengeluaran per kapita (Rp)	14.291.000	14.806.000	15.301.000	15.776.000
9	Pendapatan per kapita (Rp)	58.142.285	60.922.566	63.823.146	66.534.166
10	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	97,08	97,37	97,67	97,98
11	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	5,83	5,76	5,68	5,61

2.2. Tema Pembangunan Kota Surakarta

Berdasarkan visi dan misi yang ada, tema Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2019 adalah “Pengembangan Daya Saing Kota didukung Kemandirian Masyarakat Berbasis Kearifan Budaya”, yang merupakan kelanjutan pencapaian pembangunan periode sebelumnya, dengan menambahkan penekanan pada penguatan daya saing serta kemandirian masyarakat. Tema ini fokus pada program dan kegiatan pembangunan yang berdampak pada partisipasi masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan pelaku pemasaran keunggulan kota melalui aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya untuk memperluas jangkauan pemasaran produk kota, dan peningkatan jumlah pengunjung luar kota yang beraktivitas di Kota Surakarta. Dampak lain yang diharapkan adalah penambahan jumlah variasi produk, jasa, dan event kota yang melibatkan pelaku dari luar daerah dan kemandirian masyarakat rentan dalam pengembangan usaha untuk menambah pendapatan.

Program dan kegiatan pembangunan juga diprioritaskan pada hal yang berdampak menguatkan kearifan budaya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa merusak lingkungan, menjaga keadilan antar golongan kelompok masyarakat, dan menguatkan kesiagaan masyarakat untuk antisipasi bencana (baik bencana alam maupun bencana sosial). Program dan kegiatan tersebut disusun dengan berpedoman pada RKP Tahun 2019 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Semua hal tersebut diintegrasikan untuk menetapkan prioritas pembangunan daerah Kota Surakarta Tahun 2019.

Evaluasi makroekonomi Kota Surakarta secara substantive tidak lepas dari evaluasi pelaksanaan RKPD karena makroekonomi merupakan salah satu aspek dalam dokumen RKPD. Sementara itu, dokumen RKPD idelanya juga berlandaskan pada dokumen RPJMD yang telah disusun. Hal ini mengingatkan bahwa RKPD pada dasarnya adalah tahapan dalam upaya pencapaian RPJMD.

Dengan demikian, evaluasi aspek makroekonomi bukanlah evaluasi RKPD secara keseluruhan mengingat luasnya cakupan RKPD. Evaluasi makroekonomi lebih difokuskan pada kinerja perekonomian secara makro yang telah dilaksanakan dan berhasil dicapai.

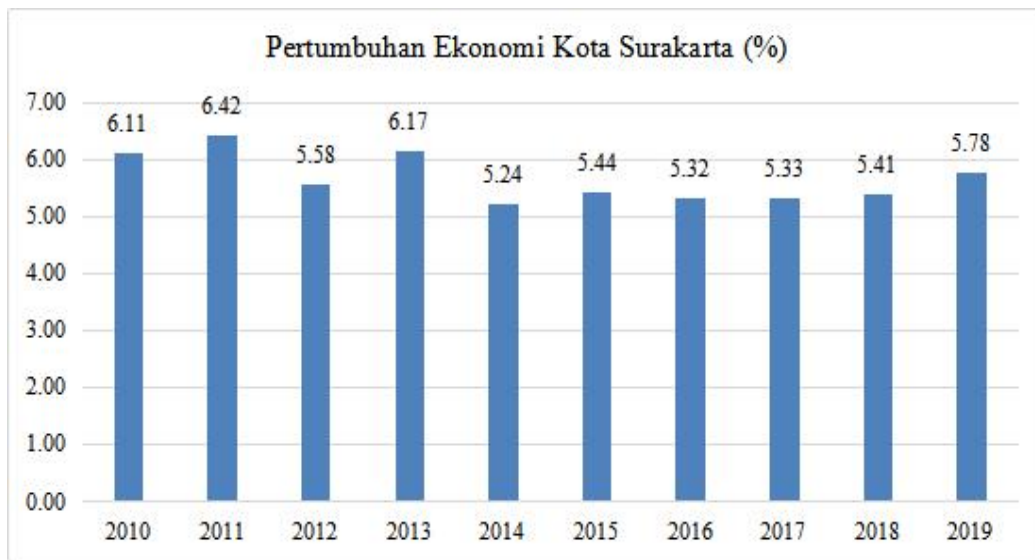
2.3. Pertumbuhan Ekonomi Dan Struktur Ekonomi

Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Surakarta tercatat 5,78%. Pertumbuhan ekonomi ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 yang besarnya adalah 5,75%. Selama 2017-2019 pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta terlihat mengalami penekanan, yang didasarkan pada semakin kecilnya kenaikan pertumbuhan ekonomi selama 2017-2019 tersebut.

Sepanjang 2010-2019, pertumbuhan ekonomi terendah Surakarta adalah pada tahun 2014 yang mencapai sebesar 5,28% sedangkan yang tertinggi adalah tahun 2011 yang mencapai 6,42%. Dengan menggunakan rata-rata geometri, rata-rata pertumbuhan ekonomi Surakarta per tahun selama 2010-2019 adalah 5,76%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan akan mengalami penekanan yang sangat berat terkait dengan pandemic virus Corona atau Covid-19. Dampak Covid-19 diperkirakan akan memberikan tekanan besar pada semua sektor ekonomi Kota Surakarta.

Gambar 2.1

Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2010-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta.

Berdasarkan pendekatan harga berlaku (*current price*), perekonomian Surakarta pada tahun 2019 didominasi oleh 4 sektor utama, yaitu sektor konstruksi (27,11%), sektor perdagangan besar dan eceran (22,16%), sektor informasi dan komunikasi (12,01%), serta sektor industri pengolahan (8,46%). Perhitungan dengan menggunakan harga konstan menunjukkan adanya sedikit

perbedaan dengan perhitungan harga berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi sektoral di Surakarta relative terkendali atau tidak bergejolak.

Dibandingkan dengan tahun 2010, kontribusi beberapa sektor yang menunjukkan peningkatan adalah sektor industri pengolahan (dari 7,62% menjadi 8,46%), sektor transportasi dan pergudangan (dari 2,64% menjadi 2,59%), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (dari 4,87% menjadi 5,41%), sektor informasi dan komunikasi (dari 11,36% menjadi 12,01%), sektor jasa keuangan dan asuransi (3,65% menjadi 3,76%), sektor jasa perusahaan (dari 0,64% menjadi 0,86%), sektor jasa pendidikan (dari 3,66% menjadi 5,51%), serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (dari 0,85% menjadi 1,12%).

Dengan demikian selama 2010-2019 terlihat adanya perseseran perubahan struktur ekonomi Surakarta secara gradual menjadi kota perdagangan, jasa, dan industry yang didukung dengan transportasi dan pendidikan. Perubahan struktur secara gradual atau perlahan tersebut sangat wajar mengingat perubahan struktur ekonomi yang dinamis pada umumnya terjadi pada jangka waktu yang sangat lama.

Tabel 2.2
Struktur PDRB Kota Surakarta Tahun 2010-2019

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,50	0,52	0,51	0,54	0,52	0,52	0,52	0,50	0,49	0,49	0,51
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Industri Pengolahan	7,62	8,08	8,27	8,39	8,70	8,59	8,62	8,52	8,45	8,46	8,37
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,21	0,22	0,20	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,22	0,21	0,19	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,17
F. Konstruksi	28,23	27,04	26,99	26,50	26,80	26,91	26,98	26,78	27,14	27,11	27,05
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,82	24,42	23,34	23,52	22,79	22,56	22,48	22,35	22,15	22,16	22,96
H. Transportasi dan Pergudangan	2,64	2,49	2,42	2,45	2,59	2,68	2,63	2,59	2,55	2,59	2,56
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,87	4,98	5,36	5,55	5,70	5,76	5,83	5,66	5,49	5,41	5,46
J. Informasi dan Komunikasi	11,36	11,13	11,23	11,01	10,77	10,63	10,45	11,27	11,67	12,01	11,15
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,65	3,66	3,71	3,67	3,66	3,75	3,86	3,88	3,84	3,76	3,74
L. Real Estate	4,23	4,17	4,09	3,95	4,04	4,11	4,12	4,08	3,96	3,85	4,06
M,N. Jasa Perusahaan	0,64	0,67	0,69	0,72	0,73	0,78	0,82	0,81	0,84	0,86	0,75
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,46	6,08	6,17	6,10	5,89	5,97	5,96	5,73	5,54	5,40	5,93
P. Jasa Pendidikan	3,66	4,42	4,87	5,28	5,41	5,37	5,34	5,43	5,46	5,51	5,07
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,92	1,01	1,02	1,08	1,10	1,10	1,11	1,12	1,12	1,04
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,04	0,99	0,95	0,94	0,95	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,96
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta.

PDRB Kota Surakarta dari pendekatan pengeluaran menunjukkan bahwa proporsi konsumsi rumah tangga selama 2010-2019 relatif stabil, sementara pengeluaran LNPRRT menunjukkan tren proporsi yang meningkat. Pengeluaran pemerintah sepanjang 2010-2019 meski sedikit mengalami fluktuasi namun proporsinya cenderung turun sedangkan pembentukan modal tetap bruto terlihat menunjukkan proporsi yang meningkat. Hal ini merupakan indikasi bahwa komponen investasi dalam pembentukan PDRB di Kota Surakarta memiliki peran yang sangat penting dan strategis, serta menunjukkan tren peningkatan. Untuk proporsi ekspor bersih, terlihat selama 2010-2019 menunjukkan deficit yang cukup besar, yang berarti masih tingginya impor barang dan jasa yang masuk ke Kota Surakarta dibandingkan ekspor barang dan jasa dari Kota Surakarta.

Tabel 2.3

PDRB Kota Surakarta Pendekatan Pengeluaran Tahun 2010-2019

Jenis Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	50,66	50,77	50,89	51,79	51,99	51,93	50,83	50,75	50,84	50,44
Pengeluaran Konsumsi LNPRRT	0,56	0,55	0,56	0,59	0,62	0,60	0,61	0,61	0,63	0,65
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,56	11,70	11,85	12,15	12,13	12,51	11,61	11,46	10,97	10,61
Pembentukan Modal Tetap Bruto	67,36	66,46	66,40	66,38	67,55	66,90	67,64	67,73	70,15	70,56
Perubahan Inventori	0,06	4,06	6,78	4,21	2,54	0,63	0,23	0,35	0,71	0,61
Net Ekspor Barang dan Jasa	-30,20	-33,54	-36,48	-35,14	-34,83	-32,58	-30,93	-30,89	-33,29	-32,86
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta.

2.3. Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Surakarta tahun 2019 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 575.230 jiwa. Jumlah penduduk ini naik sebesar 0,97% bila dibandingkan dengan tahun 2018. Sepanjang 2011-2019 pertumbuhan jumlah penduduk Surakarta menunjukkan tren yang menurun hingga tahun 2018, dan mengalami kenaikan di tahun 2019. Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, pertumbuhan penduduk Surakarta lebih rendah sepanjang 2011-2019.

Tabel 2.4**Perbandingan Jumlah dan Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk Tahun 2013-2019**

No	Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan
1	Surakarta (BPS)	507.798	510.105	512.226	514.171	516.102	517.887	519.587	0,38
	Surakarta (Disdukcapil)	563.659	552.650	557.606	570.876	562.801	569.711	575.230	0,34
2	Provinsi Jawa Tengah	33.264.339	33.522.663	33.774.141	34.019.095	34.257.865	34.490.835	34.720.000	0,72
3	Indonesia	248.818.100	252.164.800	255.461.700	258.705.000	261.890.900	265.015.300	266.910.000	1,18

Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia, diolah.

Dilihat dari sebarannya, berdasarkan data dari Disdukcapil Kota Surakarta, tahun 2019 sebagian besar penduduk bermukim di Kecamatan Banjarsari (31,89%) dan yang terkecil adalah jumlah penduduk di Kecamatan Serengan (9,50%). Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Pasar Kliwon yaitu 18.026,97/km². Dari sisi kelompok umurnya, piramida penduduk Surakarta cenderung datar karena proporsi penduduk antar kelompok umur tidak berbeda jauh mulai kelompok umur 0-4 tahun hingga 55-59 tahun sedangkan mulai kelompok umur 60 ke atas memiliki proporsi semakin kecil. Kondisi ini merupakan salah satu indikasi cukup tingginya penduduk usia produktif. Untuk rasio jenis kelamin, pada tahun 2019 secara umum antar kecamatan hampir sama, yaitu berkisar antara 95-98. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 95-98 penduduk laki-laki.

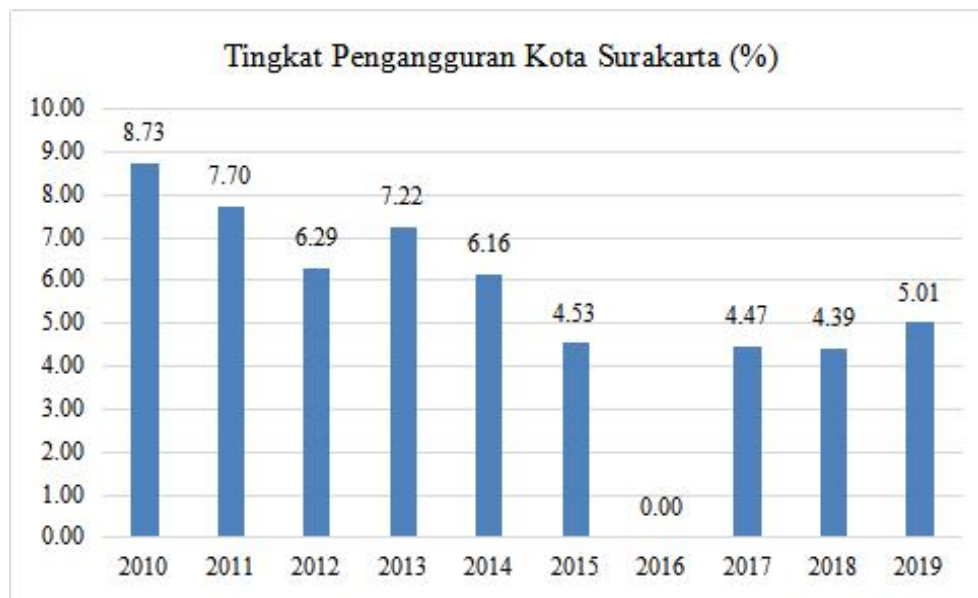
Dari sisi tingkat pengangguran, pada tahun 2019 tingkat pengangguran Surakarta mencapai 4,18%. Tingkat pengangguran dihitung dari perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan angkatan kerja. Pengangguran yang terjadi pada tahun 2019 tersebut turun apabila dibandingkan dengan tingkat pengangguran 2018 yang mencapai 4,39%. Sepanjang 2010-2019 tingkat pengangguran tertinggi adalah pada tahun 2010 yang mencapai 8,73% dan yang terendah adalah tingkat pengangguran pada tahun 2019. Tingkat pengangguran terlihat menunjukkan tren yang terus menurun mulai 2016-2019.

Tabel 2.5
Sebaran Penduduk Kota Surakarta Tahun 2019

Kecamatan	Penduduk	Pertumbuhan 2018-2019	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin
Laweyan	102 524	0,64	17,82	11866,20	95,83
Serengan	54 671	0,64	9,50	17138,24	96,08
Pasar Kliwon	86 890	0,63	15,11	18026,97	97,99
Jebres	147 694	1,12	25,68	11740,38	98,01
Banjarsari	183 541	1,29	31,89	12386,97	96,78
Kota Surakarta	575 230	0,97	100,00	13061,53	97,04

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta.

Gambar 2.2
Tingkat Pengangguran Kota Surakarta Tahun 2010-2019



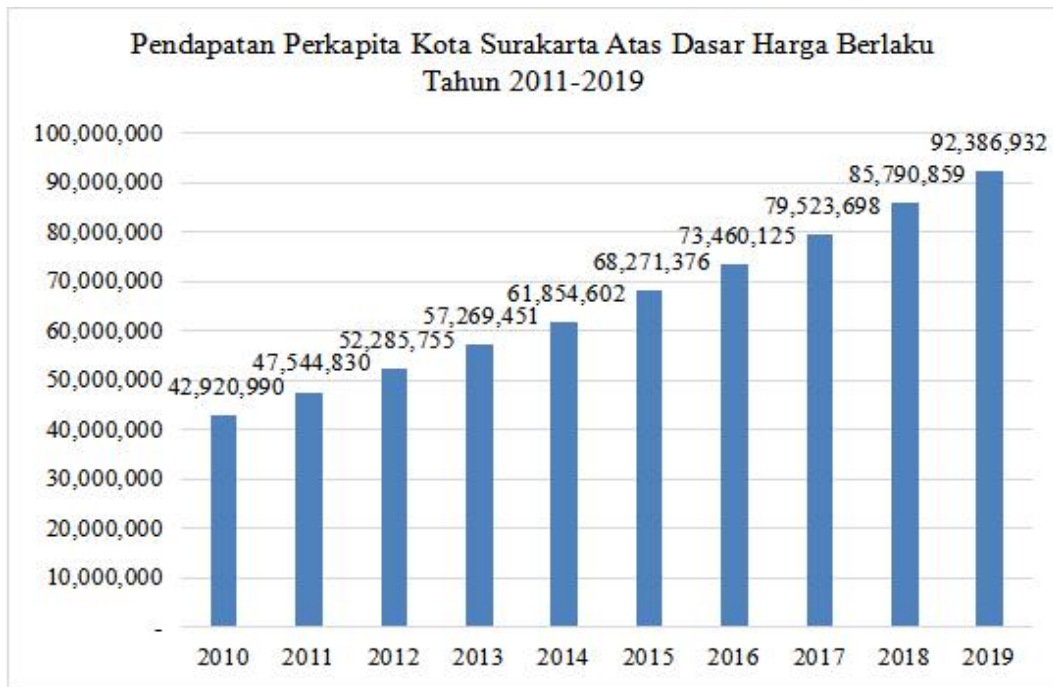
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta.

2.4. Kesejahteraan

Salah satu indikator kesejahteraan adalah PDRB perkapita yang merupakan perbandingan antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2019 PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga berlaku adalah Rp92,38 juta. Angka ini naik dibandingkan PDRB perkapita tahun 2018 yang mencapai Rp85,6 juta. Hal ini berarti pendapatan per orang per tahun penduduk Surakarta adalah Rp92,38 juta.

Gambar 2.3

Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta 2010-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta.

PDRB perkapita tahun 2019 tersebut naik sebesar 7,92% dibandingkan tahun 2018. Meskipun selama 2010-2019 PDRB perkapita menunjukkan tren yang terus naik, namun apabila dilihat dari pertumbuhan PDRB perkapita terlihat tren pertumbuhan semakin menurun. Pertumbuhan pendapatan perkapita sepanjang 2010-2019 angka tertinggi adalah tahun 2011 yaitu sebesar 10,77% dan yang terendah adalah tahun 2016. Kenaikan pertumbuhan pendapatan perkapita sepanjang 2010-2019 terjadi dua kali yaitu pada tahun 2014 dari 9,52% di tahun 2013 menjadi 9,73% di tahun 2014 serta tahun 2017 lalu dari 7,60% di tahun 2016 menjadi 8,25% di tahun 2017.

Gambar 2.4

Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Kota Surakarta Tahun 2010-2019

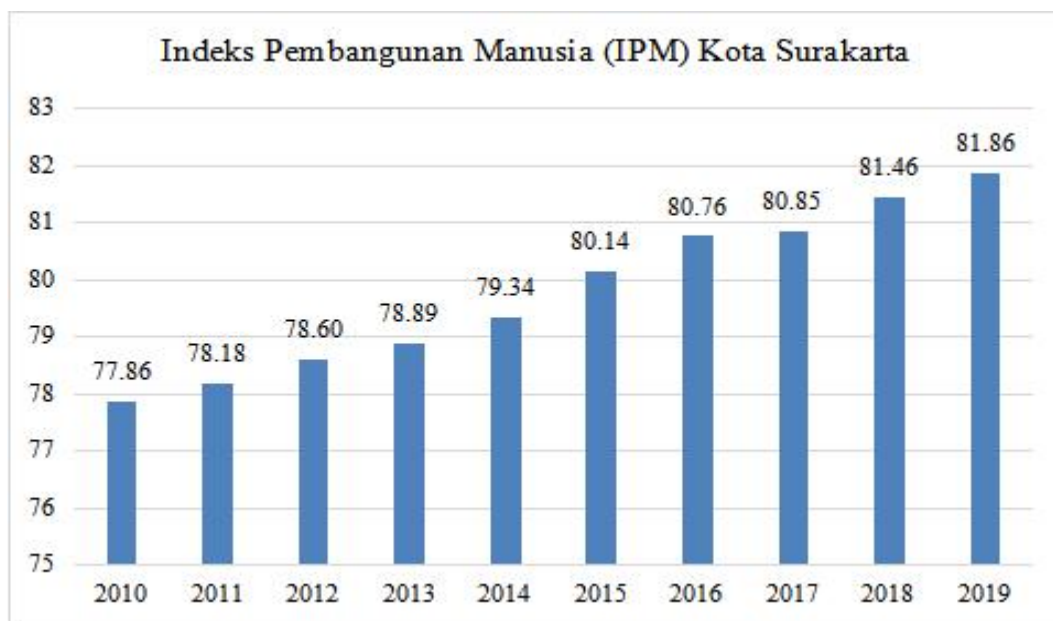


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta.

Dari sisi nilai indeks pembangunan manusia (IPM), pada tahun 2019 nilai IPM Surakarta cukup tinggi yaitu 81,86. IPM merupakan indeks komposit yang terdiri dari beberapa ukuran yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, umur harapan hidup, serta pengeluaran perkapita. Nilai ini naik cukup tajam bila dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 81,46. Sepanjang 2010-2019 nilai IPM menunjukkan kenaikan setiap tahun. Kenaikan yang terendah terjadi pada tahun 2016-2017. Nilai IPM Surakarta ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IPM provinsi maupun nasional. Hal ini merupakan indikasi bahwa pembangunan sumber daya manusia Surakarta menunjukkan keberhasilan.

Gambar 2.5

Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta 2010-2019

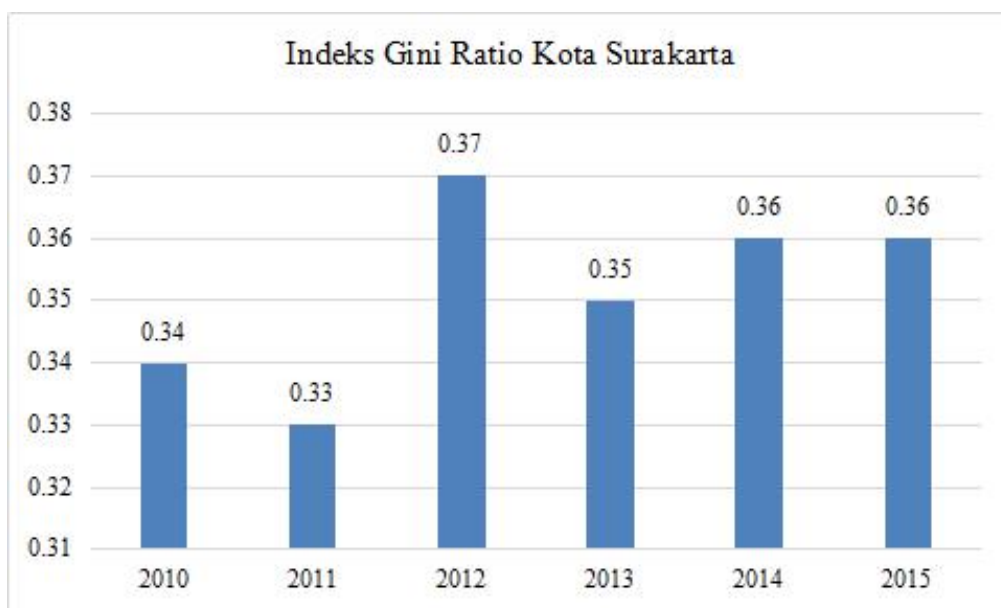


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta.

Hal yang berbeda terjadi pada ukuran ketimpangan menggunakan Gini Ratio atau Indeks Gini. Ukuran ini menunjukkan indikasi terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk. Data indeks Gini tingkat kabupaten/kota yang dirilis oleh BPS terakhir tahun 2015, dan mulai tahun 2016 indeks Gini yang dihitung dan dipublikasikan adalah indeks Gini untuk wilayah provinsi dan nasional.

Data indeks Gini selama 2000-2015 menunjukkan tren kenaikan, yang berarti tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk semakin meningkat. Selama periode tersebut indeks Gini terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 0,21 dan mulai 2010 nilai indeks Gini di atas 0,30.

Gambar 2.6
Gini Ratio Kota Surakarta Tahun 2010-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta.

2.5. Kemiskinan

Kemiskinan Surakarta dapat dilihat dari beberapa indikator seperti garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Dari tinjauan garis kemiskinan, selama 2010-2019 terlihat garis kemiskinan Surakarta menunjukkan peningkatan dan pada tahun 2019 garis kemiskinan adalah Rp473.516, naik dari 2018 yang besarnya Rp464.063 per orang per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa standar kemiskinan semakin naik. Jumlah penduduk miskin selama 2010-2019 menunjukkan penurunan khususnya dari 2017 ke 2018. Demikian pula halnya dengan tingkat kemiskinan (rasio jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk pertengahan tahun) yang menunjukkan tren penurunan selama 2010-2019. Penurunan jumlah penduduk miskin yang diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penduduk tidak diikuti dengan pertambahan jumlah penduduk miskin, atau penurunan jumlah penduduk miskin lebih besar dibandingkan dengan penurunan jumlah penduduk.

Dari ukuran kedalaman kemiskinan (P1), selama 2010-2019 terlihat berfluktuasi. Misal pada tahun 2010-2012 terlihat menurun namun pada tahun 2013 kembali naik. Demikian juga yang terjadi di tahun 2015, 2017, dan 2019 yang menunjukkan kenaikan

dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2019 indeks P1 tercatat 1,6 dan angka ini menunjukkan kenaikan dibanding tahun 2018 yang besarnya 1,47. Nilai indeks P1 yang semakin kecil menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) selama 2010-2019 juga menunjukkan fluktuasi. Pola fluktuasi antara indeks P1 dengan indeks P2 terlihat sama. Indeks P2 tahun 2019 tercatat 0,48 dan angka ini naik dibandingkan dengan tahun 2018 yang besarnya 0,35. Kenaikan indeks di tahun 2019 ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian kenaikan garis kemiskinan tidak mampu menjadi faktor pendorong turunya indeks P1 dan P2.

Tabel 2.6

Indikator Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Garis Kemiskinan (rupiah)	406.840	430.293	448.062	464.063	473.516
Jumlah penduduk miskin (000 jiwa)	55,70	55,91	54,89	46,99	45,2
Persentase Penduduk Miskin (%)	10,89	10,88	10,65	9,08	8,7
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,74	1,34	1,87	1,47	1,6
Indeks Keparahan kemiskinan (P2)	0,3	0,35	0,44	0,35	0,48

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta.

2.6. Pendidikan

Indikator pendidikan yang dipergunakan dalam evaluasi kebijakan umumnya berupa dua hal yaitu angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Secara teoritis APM akan selalu lebih rendah dibandingkan dengan APK. Dari aspek jenjang pendidikan, nilai APK maupun APM SD/MI selama 2010-2019 adalah yang tertinggi dibandingkan jenjang SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA. Nilai APK pada semua jenjang pendidikan selama 2010-2019 terlihat fluktuatif. Pola yang sama juga terjadi pada APM yang juga fluktuatif sepanjang 2010-2019. Bila diperbandingkan antar jenjang pendidikan, tidak terdapat pola yang sama. Hal ini disebabkan karena APK maupun APM dipengaruhi oleh struktur umur penduduk usia sekolah serta angka partisipasi sekolah. Nilai APK maupun APM Kota Surakarta ini tergolong tinggi dibandingkan daerah lain, meski bukan yang tertinggi.

Tabel 2.7**Indikator Kemiskinan Kota Surakarta Berdasarkan Pendidikan Tahun 2010-2019**

Pendidika	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
SD	APK	113,4	99,49	107,97	104,02	105,47	103,6	109,8	110,37	106,56	102,26
	APM	100	92.75	95.24	96.84	96.95	96.28	98.91	98.91	99.22	93,76
SMP/MTS	APK	82,14	91,45	98,82	95,25	93,31	89,88	84,81	87,93	84,55	99,62
	APM	72.62	70.45	82.03	87.92	83.90	78.55	81.28	81.25	79.34	82,21
SMA/SM K/MA	APK	92,17	90,77	65,4	65,1	71,25	100,93	110,64	103,55	80,85	104,05
	APM	65.22	67.17	52.48	60.48	63.87	69.94	63.48	65.41	65.26	87,04

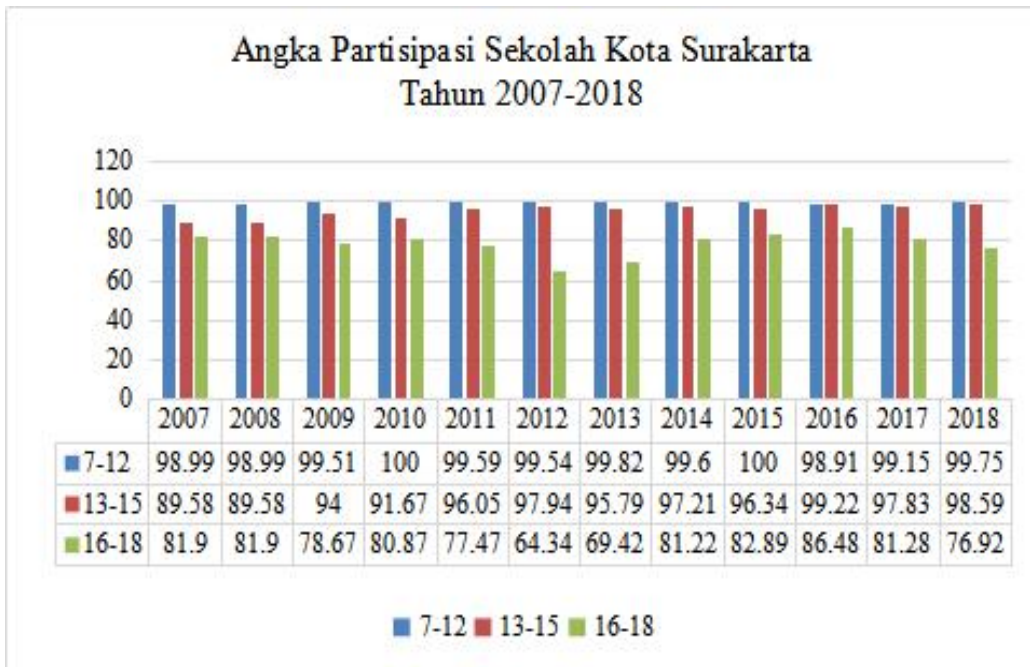
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Kinerja pendidikan secara makro juga bisa terlihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Kinerja APS untuk usia sekolah dasar yaitu 7-12 tahun selama 2010-2019 terlihat relative konstan dan memiliki angka yang tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. APS untuk kelompok usia 16-18 tahun terlihat berfluktuasi dan. Tahun 2010-2012 terlihat memiliki tren menurun selanjutnya 2012-2016 tren APS untuk usia 16-18 tahun kembali naik, dan mulai 2016 kembali menurun. Dengan demikian, usia 16-18 yang bersekolah selama periode 2016-2018 menunjukkan penurunan.

Gambar 2.7

Angka Partisipasi Sekolah Kota Surakarta Tahun 2010-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta.

BAB III

KONSEP DAN METODE KAJIAN

3.1. Aspek Kependudukan dalam Pembangunan Daerah

Dalam konteks pembangunan di daerah, secara internal penduduk dapat dipandang dari dua sisi, yaitu kekuatan (potensi) atau kelemahan. Penduduk akan menjadi suatu kekuatan atau potensi pembangunan di daerah apabila penduduk di daerah tersebut mampu berperan secara aktif sebagai subyek pembangunan daerah. Untuk dapat berperan sebagai subyek pembangunan, penduduk haruslah memiliki kriteria minimal sebagai berikut: *pertama*, penduduk memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Hal ini dapat ditunjukkan antara lain melalui tingkat pendidikan yang ditamatkan sebagai besar penduduk. Hasil studi empiris yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk berpengaruh secara signifikan dalam kemajuan atau pembangunan daerah. *Kedua*, penduduk memiliki rasio ketergantungan yang kecil, artinya struktur penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif diharapkan mampu memberikan kontribusi dan partisipasi yang lebih besar dalam pembangunan daerah. Struktur penduduk yang didominasi oleh usia tidak produktif (anak-anak dan orang tua atau manula) dapat menghambat progresivitas pembangunan daerah. *Ketiga*, laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mendorong semakin besarnya beban rumah tangga melalui tingginya tingkat konsumsi terutama makanan. Hal ini akan menjadikan lambatnya tujuan pembangunan daerah sesuai dengan yang diharapkan.

Penduduk merupakan pusat dari kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan penduduk merupakan permasalahan pembangunan dalam jangka panjang dan permasalahan tersebut membawa implikasi yang luas dalam pembangunan daerah. Atas dasar hal tersebut, penting bagi daerah untuk merumuskan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Pembangunan berwawasan kependudukan berorientasi pada pendekatan '*bottom-up planning*'. Melalui pendekatan ini, tujuan utama seluruh proses pembangunan adalah lebih pemeratakan kesejahteraan penduduk daripada mementingkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena itu pendekatan '*bottom-up*' berupaya mengoptimalkan penyebaran sumberdaya yang dimiliki dan potensial ke seluruh wilayah dan membangun sesuai dengan potensi dan masalah khusus yang

dihadapi oleh daerah masing-masing. Pendekatan *bottom-up* mengisyaratkan kebebasan daerah atau wilayah untuk merencanakan pembangunan sendiri sesuai dengan keperluan dan keadaan daerah masing-masing. Oleh karena itu otonomi yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masing-masing daerah agar mampu mengatur dan menjalankan berbagai kebijaksanaan yang dirumuskan sendiri guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah atau kawasan yang bersangkutan. Melalui otonomi daerah, yang berarti adalah desentralisasi pembangunan, maka laju pertumbuhan antar daerah akan semakin seimbang dan serasi, sehingga pelaksanaan pembangunan nasional serta hasil-hasilnya semakin merata di seluruh Indonesia.

Terdapat beberapa ciri kependudukan di masa mendatang yang harus dicermati dalam konteks pembangunan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ciri-ciri kependudukan tersebut antara lain:

1. Penduduk di masa depan akan semakin tinggi pendidikannya.

Penduduk yang makin berpendidikan dan sehat akan membentuk sumber daya manusia yang makin produktif. Tantangannya adalah menciptakan lapangan kerja yang memadai. Sebab bila tidak, jumlah penganggur yang makin berpendidikan akan bertambah. Keadaan ini dengan sendirinya merupakan pemborosan terhadap investasi nasional. Karena sebagian besar dana tercurah dalam sektor pendidikan, disamping kemungkinan terjadinya implikasi sosial lainnya yang mungkin timbul.

2. Penduduk yang makin sehat dan angka harapan hidup naik.

Usia harapan hidup yang tinggi dan jumlah penduduk lanjut semakin besar akan juga menuntut kebijaksanaan-kebijaksanaan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Suatu tantangan pula untuk dapat memanfaatkan penduduk usia lanjut yang masih potensial agar dapat dimanfaatkan sesuai pengetahuan dan pengalamannya.

3. Penduduk akan bergeser ke usia yang lebih tua.

Pada saat ini telah terjadi proses transisi umur penduduk Indonesia dari penduduk muda ke penduduk tua (*ageing process*). Pergeseran struktur umur muda ke umur tua produktif akan membawa konsekuensi peningkatan pelayanan pendidikan terutama pendidikan tinggi dan kesempatan kerja. Sedang pergeseran struktur umur produktif ke umur tua pada akhirnya akan mempunyai dampak terhadap persoalan penyantunan penduduk usia lanjut. Bersamaan dengan perubahan sosial ekonomi diperkirakan akan terjadi pergeseran pola penyantunan usia lanjut dari keluarga kepada institusi. Apabila hal ini terjadi, maka tanggung jawab pemerintah akan semakin berat.

4. Penduduk yang tinggal di perkotaan semakin banyak.

Seiring dengan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat, presentase penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat dari tahun ke tahun. Masalah urbanisasi akan menjadi masalah yang semakin menonjol. Penduduk perkotaan akan bertambah terus sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, tuntutan fasilitas perkotaan akan bertambah pula. Tambahan volume fasilitas perkotaan akan sangat berpengaruh terhadap keadaan dan perkembangan fisik kota yang bersangkutan. Meningkatnya sarana perhubungan dan komunikasi antar daerah, termasuk di daerah perdesaan, menyebabkan orang dari perdesaan tidak perlu lagi melakukan migrasi dan berdiam di daerah perkotaan. Mereka cukup menuju daerah perkotaan manakala diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dalam kurun waktu harian, mingguan, bahkan bulanan. Dengan semakin berkembangnya sarana transportasi dan komunikasi, pola mobilitas penduduk seperti itu akan semakin banyak dilakukan, sementara migrasi permanen cenderung akan makin menurun.

5. Jumlah rumah tangga akan meningkat namun ukurannya makin kecil.

Perubahan pola kelahiran dan kematian akan berpengaruh pada struktur rumahtangga. Dimasa depan ukuran rumah tangga akan semakin mengecil, namun jumlahnya akan semakin banyak. Dengan makin sedikitnya jumlah anak yang dimiliki dan disertai dengan peningkatan kesehatan penduduk, seiring tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih baik, memberikan kesempatan pula bagi individu maupun keluarga untuk melakukan mobilitas ke daerah lain.

6. Intensitas mobilitas penduduk yang makin tinggi.

Mobilitas penduduk yang makin tinggi baik secara internal maupun internasional menuntut jaringan prasarana yang makin baik dan luas. Selain itu akan membawa kepada pergeseran norma-norma masyarakat, seperti ikatan keluarga dan kekerabatan. Kesemuanya ini dapat membawa dampak yang berjangka panjang terhadap perubahan sosial budaya masyarakat.

7. Masih tingginya pertumbuhan angkatan kerja.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka laju pertumbuhan angkatan kerjanya pun cukup tinggi. Permasalahan yang ditimbulkan oleh besarnya jumlah dan pertumbuhan angkatan kerja tersebut di satu pihak menuntut kesempatan kerja yang lebih besar. Di pihak lain menuntut pembinaan angkatan kerja itu sendiri agar mampu

menghasilkan keluaran yang lebih tinggi sebagai prasyarat untuk memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas.

8. Terjadi perubahan lapangan kerja.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan pada umumnya, lapangan pekerjaan penduduk berubah dari yang bersifat primer, seperti pertanian, pertambangan, menuju lapangan pekerjaan sekunder atau bangunan. Lalu pada akhirnya akan menuju lapangan kerja tersier atau sektor jasa. Berbagai ciri dan fenomena di atas sudah sepantasnya diamati secara seksama, dalam rangka menetapkan alternatif kebijaksanaan selanjutnya.

Berdasarkan ciri-ciri kependudukan di masa mendatang, maka perlu dirumuskan *grand design* kependudukan. *Grand design* ini diperlukan khususnya untuk mendukung keberhasilan pembangunan. *Grand design* meliputi tiga aspek yaitu: pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, serta pembangunan keluarga. Aspek ketiga merupakan aspek yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui penguatan pembangunan karakter di keluarga.

3.2. Pengangguran, Kemiskinan, Pembangunan Ekonomi Lokal

Masalah kependudukan yang seringkali dihadapi adalah masalah yang berkaitan erat dengan pengangguran. Pengangguran sendiri muncul akibat dari kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan penawaran tenaga kerja. Tingginya penawaran kerja diakibatkan oleh meningkatnya angkatan kerja, sedangkan peningkatan angkatan kerja merupakan dampak dari meningkatnya laju pertumbuhan penduduk. Dalam angkatan kerja, jumlah penduduk yang tidak bekerja mencerminkan tingkat pengangguran yang terjadi. Pengangguran yang terjadi di suatu daerah berdampak pada tingkat kemiskinan karena kebutuhan hidup tidak dapat dipenuhi akibat tidak tersediannya lapangan kerja. Oleh karena itu semakin meningkatnya proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas perlu diperhatikan, mengingat hal ini dapat mendorong terjadinya pengangguran apabila penduduk 15 tahun ke atas tersebut tidak bersekolah dan tidak bekerja. Pengangguran yang terjadi memiliki dampak langsung terhadap kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas aspek kehidupan. Ahli ekonomi Amartya K. Sen menyatakan, kemiskinan lebih terkait pada ketidakmampuan mencapai standar hidup.

Salah satu strategi mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang banyak ditempuh oleh suatu negara berkembang adalah pengembangan ekonomi kerakyatan. Pengembangan ekonomi kerakyatan bukanlah berarti menutup pengembangan sektor industri, perdagangan, maupun sektor jasa yang berskala besar, namun pengertian pengembangan ekonomi kerakyatan adalah upaya pemberdayaan masyarakat secara luas dan nyata dalam aktivitas ekonomi berdasarkan pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal yang didukung dengan sumberdaya manusia yang terampil. Pengembangan potensi ekonomi lokal tersebut diarahkan pada pengembangan skala usaha yang lebih besar, sehingga tercipta keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang (*forward dan backward linkage*).

Pembangunan ekonomi lokal menurut Bank Dunia (2001) adalah “*..the process by which actors within cities and towns – our community – works collectively with public, business and non governmental sektor partners to create better conditions for economic growth and employoment generation.*”. Definisi ini mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi lokal: (1) melibatkan interaksi komponen masyarakat, (2) bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Lebih lanjut Bank Dunia mengatakan bahwa untuk mengembangkan ekonomi lokal, daerah perlu fokus pada: (1) penciptaan lingkungan usaha yang kondusif, (2) pengembangan sumberdaya manusia, (3) kemitraan masyarakat dan pemerintah, (4) mendorong investasi swasta ke barang publik, dan (5) membangun daya saing lokasi.

Pengertian lain dari ekonomi lokal dikemukakan oleh Blakely dan Bradshaw, yaitu proses dimana pemerintah daerah dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut International Labour Organization (ILO), pembangunan ekonomi lokal adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi.

Definisi ekonomi lokal menurut Helming adalah suatu proses dimana kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan

dan merangsang (pertumbuhan) ekonomi pada suatu wilayah tertentu, menekankan pada kontrol lokal, dan penggunaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik.

Pengembangan ekonomi lokal menurut Yoga (Bappenas, 2007) memfokuskan kepada:

1. Peningkatan kandungan lokal;
2. Pelibatan *stakeholders* secara substansial dalam suatu kemitraan strategis;
3. Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi;
4. Pembangunan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal;
6. Pengembangan usaha kecil dan menengah;
7. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif;
8. Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
9. Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah;
10. Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan.

Sasaran dari pengembangan ekonomi lokal pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif.
2. Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara *stakeholder* secara sinergis.
3. Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal.
4. Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis dan berkelanjutan.
5. Terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB.
6. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan.
7. Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah.
8. Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.

Atas dasar hal tersebut di atas, pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka pembedayaan

ekonomi masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, dengan penekanan pada keterlibatan masyarakat, partisipasi pemerintah daerah, serta pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

3.3. Kependudukan dan Pertumbuhan Ekonomi

Penduduk terbagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Pengertian “bekerja” menurut BPS adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Menurut BPS, penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung dengan cara:

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Menurut hukum Okun (Okun's Law) pengangguran memiliki hubungan negative dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin rendah tingkat pengangguran yang terjadi. Output dari perekonomian tergantung dari tenaga kerja yang dipergunakan dalam proses produksi sehingga terdapat hubungan positif antara output dengan tenaga kerja. Mengingat angkatan kerja terdiri dari penduduk yang

bekerja dan pengangguran terbuka, maka semakin tinggi output semakin tinggi jumlah penduduk yang bekerja dan semakin rendah pengangguran.

Namun penelitian hubungan antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak berdiri sendiri, namun juga dipengaruhi variable lain seperti pengeluaran pemerintah, kebijakan ekonomi dan keuangan, dan sebagainya. Artinya, pertumbuhan ekonomi misal 2% tidak secara otomatis akan mengurangi tingkat pengangguran 2% pula.

3.4. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari.

Kondisi kemiskinan menurut BPS dapat diukur dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Berbagai studi yang dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan, seperti Ravallion dan Chen

(1997)¹ serta Adam (2002)². Penelitian lain seperti Lin di China (2008)³ dan HBhanumurthy dan HMitra (2004)⁴ di India juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Kemiskinan sendiri dikenal dalam dua bentuk, kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. BPS memberikan pengertian bahwa kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkanakan tetapi (lebih lanjut dari itu!) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Di dalam kondisi struktur yang demikian itu kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tak adil. Tatanan yang tak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia.

Selanjutnya dikatakan bahwa kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat

¹ Ravallion, M dan S Chen (1997) 'What Can New Survey Data Tell Us about Recent Changes in Distribution and Poverty?' World Bank Economic Review. Vol. 11(2).

² Adams, R (2002) Economic Growth, Inequality and Poverty: Findings from a New Data Set, Policy Research Working Paper 2972, World Bank, February 2002.

³ Lin (2003), Economic Growth, Income Inequality, and Poverty Reduction in People's Republic of China, Asian Development Review, vol. 20, no. 2.

⁴ HBhanumurthy and HMitra (2004), Economic Growth, Poverty, and Inequality in Indian States in the Pre-reform and Reform Periods, Asian Development Review, vol. 21, no. 2

dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogianya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik.

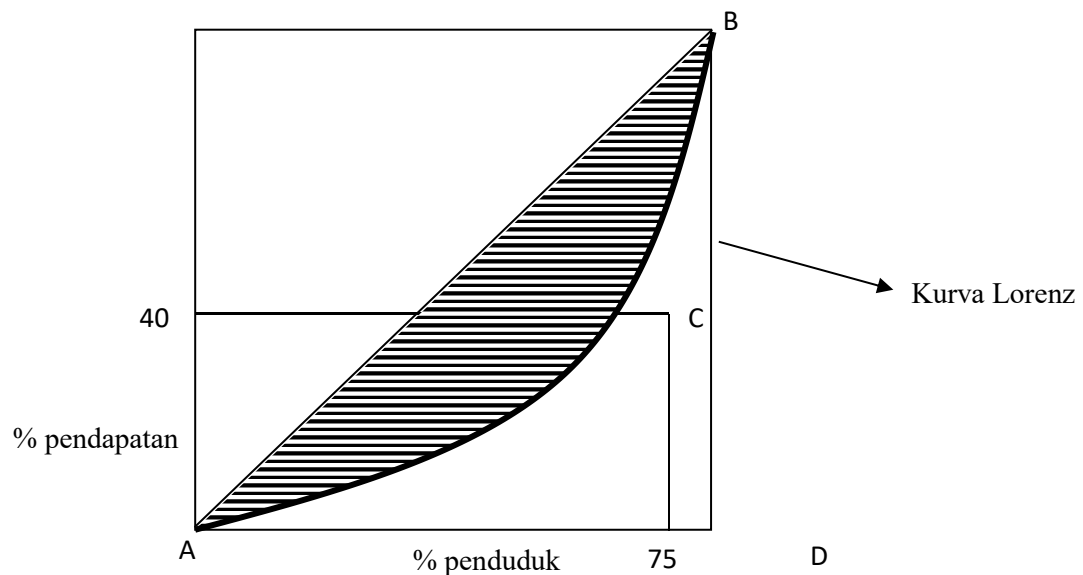
Berdasarkan uraian di atas, kemiskinan dalam berbagai bentuk dan pengertiannya merupakan masalah yang dapat muncul setiap saat sepanjang waktu di setiap daerah. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai hal, baik karena proses pembangunan itu sendiri maupun karena struktur dan kultur masyarakat.

3.5. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan per kapita diukur dengan cara membagi PDB atau PNB dengan jumlah penduduk. PDB atau PNB yang dipergunakan bisa berupa PDB atau PNB riil (atas dasar harga konstan), bisa pula PDB atau PNB harga berlaku. Jumlah penduduk yang dipergunakan adalah jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pendapatan per kapita dipergunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah secara umum. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi pula kemakmuran penduduk wilayah tersebut. Pendapatan perkapita tidak memiliki hubungan dengan tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, artinya Negara yang pendapatan perkapita nya tinggi, bisa saja ketimpangannya juga tinggi. Bila hal tersebut terjadi, berarti struktur ekonomi wilayah tersebut masih tergantung pada sekelompok masyarakat tertentu. Analisis ketimpangan diperlukan mengingat apakah hasil pembangunan daerah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan lebih adil. Bila indeks ini semakin baik maka tingkat kesejahteraan masyarakat baik antar individu dan wilayahnya akan semakin membaik pula.

Ketimpangan diukur dengan menggunakan Gini Ratio, yang diturunkan dari Kurva Lorenz. Semakin tinggi nilai Gini Ratio, berarti kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal, dan distribusi pendapatan semakin semakin tidak merata (ketimpangan semakin tajam).



Gambar 3.1

Kurva Lorenz

Contoh di atas: 75% penduduk menguasai 40% pendapatan (berarti 25% penduduk menguasai 60% pendapatan). Koefisien Gini= ABC/ABD.

Selain itu ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar wilayah dapat diukur dengan indeks Williamson sebagai berikut:

$$\text{Indeks Williamson (IW)} = \left\{ \frac{\{(Y - Y_i)^2 F_i / N\}}{Y} \right\}^{0,5}$$

Dimana:

Y = income riil per kapita kabupaten/kota

Y_i = income perkapita kecamatan

F_i = jumlah penduduk kecamatan

N = jumlah penduduk kabupaten/kota

Dari analisis ini selanjutnya dapat pula dibuat tipologi klasen 4 kuadran

- Ketimpangan tinggi dan kemiskinan tinggi
- Ketimpangan tinggi dan kemiskinan rendah
- Ketimpangan rendah dan kemiskinan tinggi
- Ketimpangan rendah dan kemiskinan rendah

Teori tentang ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dikemukakan oleh Kuznets yang menunjukkan bahwa hubungan antara ketimpangan dengan pendapatan per kapita membentuk kurva U terbalik (inverted U shape). Pada intinya, teori tersebut menyatakan bahwa ketimpangan mula-mula akan meningkat seiring dengan

pertumbuhan ekonomi, hingga pada tahap tertentu ketimpangan akan menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Namun hipotesis Kuznets tersebut tidak berlaku mutlak karena karakteristik yang berbeda antar wilayah. Selain itu, ketimpangan juga terkait dengan banyak hal.

Ketimpangan berkaitan dengan pengangguran dan kemiskinan, dan dalam hal ini pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan sedangkan syarat kecukupannya (*sufficient condition*) adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut harus menyebar di setiap golongan baik secara langsung maupun tak langsung. Secara langsung mengandung arti bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi di sektor-sektor yang di dalamnya banyak penduduk berpenghasilan rendah yang bekerja. Secara tidak langsung mengandung arti bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mendistribusikan pertumbuhan ekonomi dari sektor lain yang tidak didominasi penduduk berpenghasilan rendah ke golongan penduduk yang berpenghasilan rendah.

3.6. Konsentrasi Kemiskinan

Untuk melihat bagaimana pola konsentrasi kemiskinan di Indonesia digunakan indeks Entropy Theil. Kelebihan indeks Entropy Theil dibandingkan dengan indeks konsentrasi spasial lainnya adalah bahwa pada suatu titik waktu, indeks ini menyediakan ukuran derajat konsentrasi (ataupun dispersi) distribusi spasial pada sejumlah daerah dan sub daerah dalam suatu negara.

Nilai indeks Entropy Theil yang lebih rendah menunjukkan kesenjangan yang lebih rendah, dan sebaliknya. Karakteristik utama dari indeks Entropy Theil ini adalah kemampuannya untuk membedakan kesenjangan antar daerah (*between-region inequality*) dan kesenjangan dalam satu daerah (*withinregion inequality*). Indeks Theil dirumuskan sebagai berikut:

$$IT = \sum (x_j / X) x \log \left(\frac{x_j / X}{y_j / Y} \right)$$

Keterangan:

IT=Indeks Entropi Theil

x_j =jumlah penduduk miskin di wilayah (kecamatan)

X=rata-rata jumlah penduduk miskin di Kota Surakarta

yj=jumlah penduduk di wilayah (kecamatan)

Y=Jumlah penduduk di Kota Surakarta

Intensitas kemiskinan juga merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat keparahan kemiskinan di suatu daerah. Menurut KPPOD Departemen Daam Negeri, kriteria tingkat keparahan kemiskinan dinyatakan sebagai berikut:

Sangat Tinggi : apabila $I \leq \text{mean} + \text{Sd}$

Tinggi : apabila $\text{mean} + 0,5\text{Sd} \leq I < \text{mean} + \text{Sd}$

Sedang : apabila $\text{mean} - 0,5\text{Sd} \leq I < \text{mean} + 0,5\text{Sd}$

Rendah : apabila $I < \text{mean} - 0,5\text{Sd}$

Dalam hal ini, I=indikator tertentu yang dipergunakan (misal Gini Ratio, Indeks Williamson, atau Indeks Theil), *mean*=rata-rata hitung, Sd=deviasi standar.

3.7. Metodologi

A. Pendekatan Kajian

Untuk menghitung Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil dibutuhkan data PDRB dan kemiskinan di kecamatan. Data PDRB kecamatan dapat dihitung dengan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan proporsi

PDRB kecamatan saat ini diproxy berdasarkan PDRB kecamatan tahun yang sebelumnya. Bila misal PDRB Tahun 2011 adalah 100 milyar, maka akan ditentukan proporsi PDRB tersebut di masing-masing kecamatan. Selanjutnya proporsi tersebut dipergunakan sebagai proxy PDRB tahun-tahun mendatang

b. Pendekatan Konsumsi Rumah Tangga

Dalam pendekatan pengeluaran atau penggunaan, PDRB merupakan penjumlahan dari konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nirlaba, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal tetap domestic bruto, perubahan inventori dan ekspor netto. Peranan konsumsi rumah tangga cukup besar dalam PDRB, sehingga pendekatan konsumsi rumah tangga dapat dijadikan dasar untuk mengestimasi PDRB level kecamatan sebagai berikut:

$$\text{PDRB Kecamatan} = \frac{\text{Share konsumsi kecamatan} \times \text{PDRB Kota Surakarta}}{100}$$

c. Pendekatan Penduduk yang Bekerja

PDRB menurut produksi mengandung makna bahwa PDRB merupakan total seluruh nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi, sementara tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produksi selain modal dan teknologi. Suplai dari tenaga kerja adalah penduduk, yang dalam hal ini merupakan penduduk usia kerja. Dengan demikian, untuk mengestimasi PDRB level kecamatan dengan menganggap faktor selain tenaga adalah *ceteris paribus*, sehingga hanya faktor tenaga kerja yang berpengaruh terhadap output produksi dan faktor lainnya konstan. Atas dasar hal tersebut PDRB di tingkat kecamatan diproxy dengan rumus sebagai berikut:

$$PDRB = \frac{\text{Jumlah penduduk kecamatan yang bekerja PDRB Kota Surakarta}}{100}$$

Dalam hal jumlah penduduk yang bekerja di tingkat kecamatan tidak tersedia, proxy dilakukan dengan menggunakan share jumlah penduduk masing-masing kecamatan.

B. Sumber dan Ketersediaan Data

Data dalam kajian ini bersumber dari BPS Kota Surakarta berupa Kota Surakarta Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, serta PDRB Kota Surakarta. Ketersediaan data adalah sebagai berikut:

- a. PDRB Kecamatan Tahun 2011 dan 2012
- b. PRDB Kecamatan Tahun 2010 (*berdasarkan data pertumbuhan PDRB di tahun 2011*)
- c. Jumlah penduduk per kecamatan
- d. Jumlah keluarga miskin (prasejahtera) per kecamatan (Kota Surakarta Dalam Angka)

Berdasarkan ketersediaan data di atas, pendekatan yang dipergunakan adalah: (1) pendekatan proporsi PDRB dan (2) pendekatan proporsi jumlah penduduk. Untuk pendekatan proporsi PDRB, pendekatan ini memiliki asumsi bahwa proporsi PDRB per kecamatan selama 2010-2017 adalah sama, berdasarkan pertimbangan perhitungan deviasi standar dan koefisien variasi yang kecil.

C. Prosedur Penentuan PDRB Kecamatan

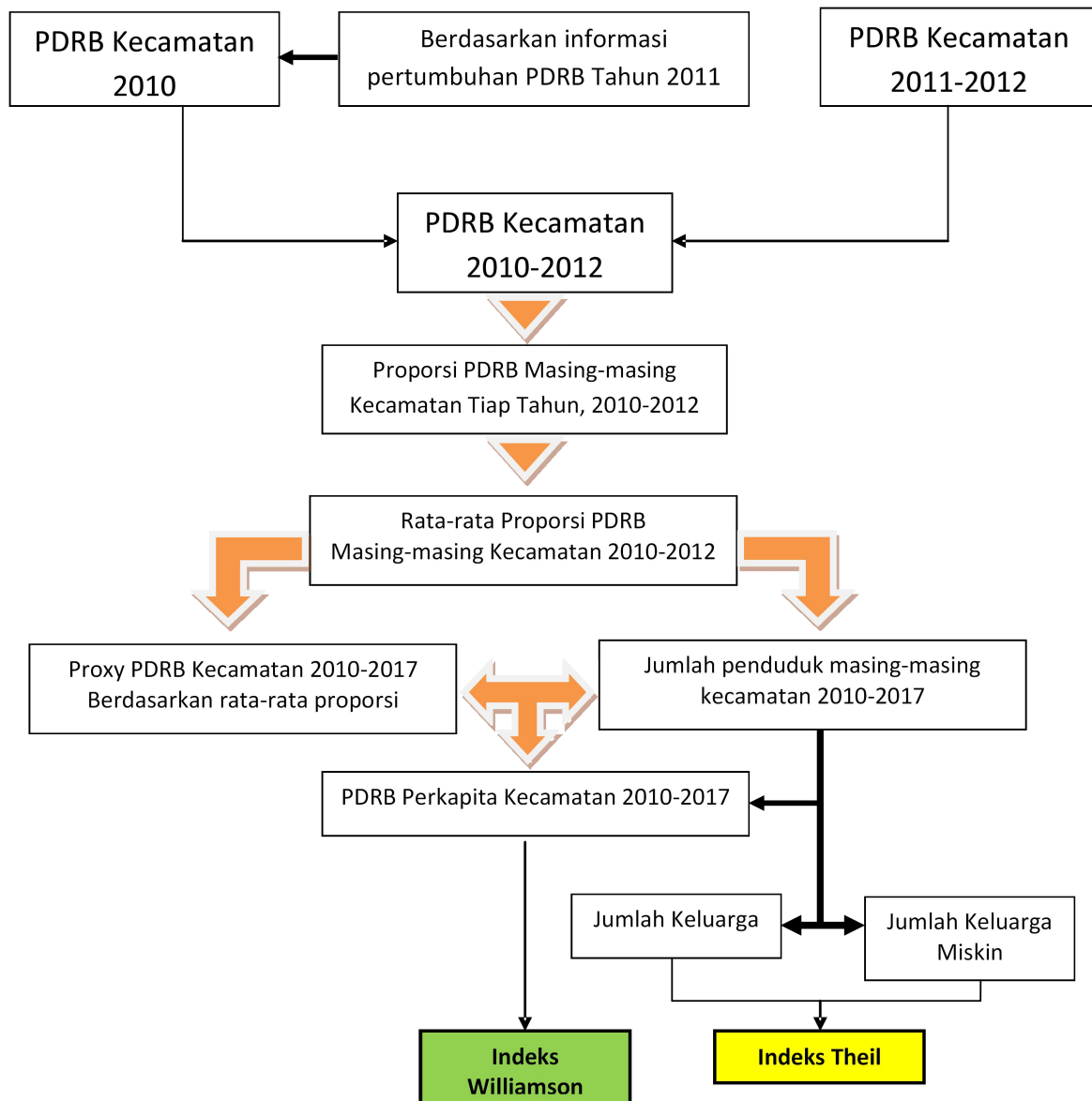
1. Pendekatan Proporsi PDRB

- a) Pertama, dilakukan pengolahan data untuk memperoleh informasi PDRB Kecamatan Tahun 2010-2012 sesuai dengan ketersediaan data.
- b) Kedua, dilakukan penghitungan proporsi PDRB masing-masing kecamatan selama 2010-2012.
- c) Ketiga, dilakukan penghitungan rata-rata proporsi PDRB masing-masing kecamatan selama 2010-2012.
- d) Keempat, penggunaan rata-rata proporsi PDRB masing-masing kecamatan untuk proxy PDRB kecamatan.

2. Pendekatan Proporsi Jumlah Penduduk

- a) Pertama, dilakukan penghitungan proporsi penduduk per kecamatan terhadap jumlah penduduk Kota Surakarta selama 2010-2017.
- b) Kedua, dilakukan prpxy PDRB Kecamatan dengan cara proporsi jumlah penduduk per kecamatan dikalikan PDRB Kota Surakarta selama 2010-2017.

D. Kerangka Pikir Kajian



Gambar 3.2
Kerangka Pemikiran

3.8. Hasil Pengolahan Data

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi (%)

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
1	Surakarta	6,42	5,58	6,17	5,24	5,44	5,32	5,33	5,41	5,61
2	Provinsi Jawa Tengah	5,30	5,34	5,14	5,42	5,40	5,26	5,27	5,32	5,31
3	Indonesia	6,50	6,23	5,56	5,01	4,88	5,03	5,07	5,17	5,43
4	Rata-rata Jawa Tengah	5,61	5,09	5,42	5,07	5,43	5,37	5,11	5,30	5,30

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia, diolah.

Tabel 3.2
Angka Harapan Hidup (AHH)

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
1	Surakarta	72,16	72,25	72,35	76,97	76,99	77,00	77,03	77,06	77,11	79,03	76,20
2	Provinsi Jawa Tengah	72,73	72,91	73,09	73,28	73,88	73,96	74,02	74,08	74,18	76,16	73,95
3	Indonesia	69,81	70,01	70,20	70,40	70,59	70,78	70,90	71,06	71,2	71,38	70,73
4	Rata-rata Jawa Tengah	74,17	74,24	74,30	74,37	74,41	74,50	74,56	74,63	74,69	76,64	74,70

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia, diolah.

Tabel 3.3
Harapan Lama Sekolah

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
1	Surakarta	13,17	13,34	13,5	13,64	13,92	14,14	14,5	14,51	14,52	14,55	14,07
2	Provinsi Jawa Tengah	11,09	11,18	11,39	11,89	12,17	12,38	12,45	12,57	12,63	12,68	12,15
3	Indonesia	11,29	11,44	11,68	12,10	12,39	12,55	12,72	12,85	12,91	12,95	12,40
4	Rata-rata Jawa Tengah	11,21	11,41	11,63	11,90	12,19	12,46	12,59	12,72	12,74	12,85	12,28

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia, diolah.

Tabel 3.4
Rata-rata Lama Sekolah

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
1	Surakarta	9,99	10,05	10,11	10,25	10,33	10,36	10,37	10,38	10,53	10,54	10,32
2	Provinsi Jawa Tengah	6,71	6,74	6,77	6,80	6,93	7,03	7,15	7,27	7,35	7,53	7,06
3	Indonesia	7,46	7,52	7,59	7,61	7,73	7,84	7,95	8,10	8,17	8,34	7,87
4	Rata-rata Jawa Tengah	6,74	6,85	6,96	7,11	7,24	7,37	7,45	7,58	7,57	7,75	7,32

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia, diolah.

Tabel 3.5
Pengeluaran per kapita (Rp ribuan)

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
1	Surakarta	12.123	12.464	12.680	12.820	12.907	12.604	13.900	13.986	14.528	15.049	12.438
2	Provinsi Jawa Tengah	8.992	9.296	9.497	9.618	9.640	9.930	10.153	10.377	10.777	11.102	10.043
3	Indonesia	9.437	9.647	9.815	9.858	9.903	10.150	10.420	10.664	11.059	11.299	10.313
4	Rata-rata Jawa Tengah	9.012	9.296	9.497	9.618	9.655	9.938	10.181	10.414	10.837	11.217	10.073

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia, diolah.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Kinerja Perekonomian Kota Surakarta

A. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Surakarta pada tahun 2010 mencapai Rp21,49 trilyun dan pada tahun 2019 naik lebih dari dua kali lipat menjadi Rp48 trilyun. Kenaikan terbesar dari 2010 ke 2019 adalah sektor jasa pendidikan dari Rp785 milyar menjadi Rp2,6 trilyun atau naik sebesar 236,45%. Peringkat kedua adalah sektor jasa perusahaan yang naik sebesar 203,75% dan yang ketiga adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 192,19%. Sektor yang memiliki kenaikan terkecil dari 2010 ke 2019 adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan kenaikan sebesar 32,89%.

Apabila dihitung dari periode RPJMD 2016-2021, selama periode RPJMD tersebut yaitu 2016-2019 sektor yang memiliki kenaikan terbesar adalah sektor informasi dan komunikasi yang mengalami kenaikan sebesar 46,09% dan yang kedua adalah sektor jasa perusahaan sebesar 34,52%.

Tabel 4.1
PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2016 dan 2019

Lapangan Usaha	2016	2019	Kenaikan 2016- 2019 (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	195.992,73	233.444,75	19,11
Pertambangan dan Penggalian	779,11	796,04	2,17
Industri Pengolahan	3.254.402,37	4.060.311,37	24,76
Pengadaan Listrik dan Gas	74.052,94	94.467,61	27,57
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	57.524,26	68.562,82	19,19
Konstruksi	10.191.821,93	13.011.418,38	27,67
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.491.044,94	10.635.516,54	25,26
Transportasi dan Pergudangan	991.644,08	1.241.375,56	25,18
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.203.000,85	2.596.798,29	17,88
Informasi dan Komunikasi	3.945.722,76	5.764.427,29	46,09
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.456.897,01	1.805.302,07	23,91
Real Estate	1.555.463,91	1.846.239,69	18,69
Jasa Perusahaan	307.938,45	414.236,87	34,52
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.250.744,30	2.594.387,03	15,27
Jasa Pendidikan	2.017.343,19	2.643.711,13	31,05
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	416.391,63	535.372,96	28,57
Jasa lainnya	360.301,66	456.680,62	26,75
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	37.771.066,12	48.003.049,02	27,09

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Dari strukturnya, pada tahun 2019 PDRB Surakarta didominasi oleh kontribusi sektor konstruksi sebesar 27,11%, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 22,16%, serta sektor informasi dan komunikasi sebesar 12,01%. Sementara itu pertumbuhan tahun 2019 berdasarkan harga yang berlaku untuk sektor konstruksi adalah 7,89%, sektor perdagangan besar dan eceran 8,08%, dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 11,22%. Proporsi dan pertumbuhan ketiga sektor tersebut cukup besar dan menopang lebih dari 50% PDRB Surakarta.

Beberapa sektor yang menunjukkan pertumbuhan tinggi di atas 7% pada tahun 2019 namun memiliki proporsi kecil adalah sektor transportasi dan pergudangan, jasa perusahaan, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dengan demikian sektor jasa di Surakarta memiliki perkembangan yang sangat prospektif.

Tabel 4.2
Proporsi dan Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2016-2019

Lapangan Usaha	PROPORSI				PERTUMBUHAN			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,52	0,50	0,49	0,49	7,25	4,52	7,04	6,46
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	2,71	0,18	-0,70
C. Industri Pengolahan	8,62	8,52	8,45	8,46	8,37	7,39	7,45	8,12
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	0,20	0,20	0,20	13,99	11,57	8,27	5,61
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,14	4,05	6,93	4,93	6,23
F. Konstruksi	26,98	26,78	27,14	27,11	8,30	7,84	9,72	7,89
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,48	22,35	22,15	22,16	7,62	8,03	7,28	8,08
H. Transportasi dan Pergudangan	2,63	2,59	2,55	2,59	5,90	7,23	6,62	9,49
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,83	5,66	5,49	5,41	9,29	5,45	4,97	6,49
J. Informasi dan Komunikasi	10,45	11,27	11,67	12,01	6,19	17,18	12,10	11,22
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,86	3,88	3,84	3,76	11,21	9,30	7,03	5,92
L. Real Estate	4,12	4,08	3,96	3,85	8,29	7,62	5,19	4,85
M,N. Jasa Perusahaan	0,82	0,81	0,84	0,86	12,82	7,93	12,05	11,23
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,96	5,73	5,54	5,40	7,89	4,48	4,60	5,47
P. Jasa Pendidikan	5,34	5,43	5,46	5,51	7,45	10,47	8,86	8,98
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,10	1,11	1,12	1,12	7,96	8,92	10,04	7,27
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,95	0,95	0,95	0,95	10,45	8,69	7,83	8,15
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100,00	8,01	8,66	8,25	8,04

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, diolah.

Bila menggunakan pendekatan harga konstan tahun 2010, terdapat beberapa sektor yang memiliki kenaikan baik dari sisi proporsi maupun pertumbuhan dari 2011 ke 2019, yaitu sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, serta sektor jasa lainnya. Ketiga sektor tersebut memiliki proporsi dan pertumbuhan yang keduanya meningkat dari 2011 ke 2019.

Bila perhitungan dilakukan pada periode RPJMD 2016-2021, maka secara riil terdapat 4 sektor yang memiliki kenaikan proporsi dan pertumbuhan dari 2016 ke 2019, yaitu sektor informasi dan komunikasi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa perusahaan, serta jasa lainnya. Untuk sektor Informasi dan komunikasi misalnya, memiliki kontribusi yang meningkat pada tahun 2019 dibandingkan 2016 (dari 13,18% menjadi 15,22%), dan juga memiliki pertumbuhan riil 2019 yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 (6,14% menjadi 10,12%).

Sektor industry pengolahan selama 2016-2019 memiliki proporsi yang semakin menurun meski penurunan proporsi tersebut tergolong kecil, namun pertumbuhan setiap tahun dari 2016-2019 terlihat menunjukkan peningkatan. Hal ini menjadikan sektor industry pengolahan memiliki prospek yang bagus. Sementara itu proporsi sektor konstruksi selama 2016-2019 secara perlahan mengalami penurunan yang relative kecil. Penurunan proporsi yang kecil tersebut juga diikuti oleh penurunan pertumbuhan setiap tahun. Kondisi yang berbeda terjadi di sektor perdagangan serta sektor informasi dan komunikasi, meski proporsi kedua sektor tersebut selama 2016-2019 menurun secara sangat perlahan namun pertumbuhan output sektor ini selama 2016-2019 masih berfluktuasi.

Tabel 4.3
Proporsi dan Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2016-2019

Lapangan Usaha	PROPORSI				PERTUMB			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,44	0,43	0,42	0,41	1,17	3,84	4,02	2,97
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,39	-1,58	-2,22
C. Industri Pengolahan	7,83	7,73	7,63	7,64	3,73	4,34	4,35	5,88
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,23	0,23	0,23	0,22	6,24	4,27	4,99	5,21
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,17	0,17	0,17	2,40	6,28	4,64	4,74
F. Konstruksi	26,24	26,11	25,93	25,65	6,43	5,19	5,01	4,63
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,46	23,46	23,28	23,15	4,61	5,69	4,95	5,18
H. Transportasi dan Pergudangan	2,87	2,87	2,87	2,91	5,31	5,70	5,69	7,32
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,13	5,07	4,99	4,97	5,12	4,41	4,16	5,21
J. Informasi dan Komunikasi	13,18	13,79	14,62	15,22	6,14	10,56	12,11	10,12
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,48	3,45	3,38	3,33	7,92	5,03	3,35	4,44
L. Real Estate	4,44	4,41	4,28	4,17	6,45	5,16	2,54	2,98
M,N. Jasa Perusahaan	0,75	0,74	0,76	0,79	8,38	4,46	9,06	9,53
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,54	5,31	5,17	5,08	2,34	1,24	3,02	3,90
P. Jasa Pendidikan	4,25	4,21	4,21	4,22	4,10	4,72	5,80	5,98
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	1,04	1,07	1,07	7,11	7,29	8,78	6,19
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,97	0,98	0,99	1,01	6,09	7,01	7,12	7,44
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100,00	5,35	5,70	5,75	5,78

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, diolah.

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

PDRB atas dasar harga konstan merupakan PDRB riil dan bila dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, akan menghasilkan informasi PDRB perkapita riil.. Sementara itu PDRB atas dasar harga berlaku apabila dibagi dengan jumlah

penduduk pertengahan tahun akan menghasilkan PDRB Perkapita nominal. Jumlah penduduk didasarkan pada data BPS Kota Surakarta. PDRB perkapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang menggambarkan pendapatan per orang per tahun. Pada tabel 4.4, berdasarkan perhitungan PDRB ADHK dan ADHB, selama 2010-2019 PDRB perkapita Kota Surakarta menunjukkan tren yang terus meningkat. Tahun 2019 PDRB perkapita ADHB sebesar Rp92,3 juta dan ADHK sebesar Rp68,2 juta. Pada tabel 4.5, secara nominal, PDRB perkapita tahun 2019 naik sebesar 7,69% sementara secara riil naik sebesar 5,43%. Kenaikan tiap tahun PDRB perkapita sepanjang 2010-2019 terlihat berfluktuasi. Kenaikan yang terjadi di tahun 2019 sendiri lebih kecil bila dibandingkan dengan kenaikan di tahun 2018.

Bila data jumlah penduduk bersumber dari Disdukcapil, pada tabel 4.6, terlihat adanya perbedaan nilai PDRB perkapita. Tahun 2019 misalnya, perhitungan PDRB perkapita ADHB berdasarkan data kependudukan dari Disdukcapil adalah Rp83,4 juta jauh lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan sebelumnya. Untuk PDRB perkapita ADHK tahun 2019 tercatat Rp61,6 juta dengan selisih tidak sebesar perhitungan menggunakan ADHB.

Kinerja PDRB perkapita Kota Surakarta juga dapat dilihat perbandingannya dengan wilayah lain. Untuk membandingkan dengan wilayah lain, data yang dipergunakan adalah data dari BPS agar “comparable”. Dapat dilihat pada tabel 4.7, berdasarkan data perbandingan tersebut, Kota Surakarta memiliki PDRB perkapita riil yang jauh di atas rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah, provinsi Jawa Tengah, dan nasional bahkan bila Kota Surakarta menggunakan data kependudukan dari Disdukcapil sekalipun. Tingginya PDRB perkapita riil Surakarta ini disebabkan karena Surakarta mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk namun tetap mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rata-rata pertumbuhan penduduk Surakarta per tahun selama 2010-2019 hanya sebesar 0,42% sementara untuk provinsi Jawa Tengah adalah 0,76% dan di tingkat nasional adalah 1,26%.

Tabel 4.4**PDRB Perkapita Kota Surakarta Tahun 2010-2019**

PDRB	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ADHB	42.920.990	47.544.830	52.285.755	57.269.451	62.854.602	68.271.376	73.460.125	79.523.698	85.790.859	92.386.932
ADHK	42.920.990	45.435.805	47.731.963	50.476.137	52.899.616	55.548.711	58.299.424	61.393.834	64.697.940	68.214.142

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, diolah.

Tabel 4.5**Pertumbuhan PDRB Perkapita Kota Surakarta Tahun 2011-2019**

PDRB	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ADHB	10,77	9,97	9,53	9,75	8,62	7,60	8,25	7,88	7,69
ADHK	5,86	5,05	5,75	4,80	5,01	4,95	5,31	5,38	5,43

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, diolah.

Tabel 4.6**PDRB Perkapita Kota Surakarta Tahun 2013-2019 Berdasarkan Data Jumlah Penduduk Disdukcapil**

PDRB	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ADHB	51.593.805	58.015.827	62.715.204	66.163.346	72.925.136	77.986.857	83.450.183
ADHK	45.473.737	48.827.212	51.027.955	52.508.554	56.299.616	58.812.665	61.615.669

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, diolah.

Tabel 4.7**Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Surakarta vs Wilayah Lain Tahun 2010-2019**

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Surakarta	42.920.990	47.544.830	52.285.755	57.269.451	62.854.602	68.271.376	73.460.125	79.523.698	85.790.859	92.386.932
Rata-rata Jateng	19.963.164	22.029.428	23.807.907	25.974.607	28.605.163	31.059.351	33.374.986	35.771.021	38.413.842	40.970.640
Prov. Jateng	19.209.309	21.162.830	22.865.435	24.952.127	27.517.837	29.933.748	31.961.952	34.234.314	36.776.575	39.243.314
Indonesia	27.028.695	30.658.976	33.537.411	36.521.766	41.915.863	45.119.612	47.937.723	51.891.172	55.990.396	59.065.437

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia, diolah.

Tabel 4.8**Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah Tahun 2010-2019**

No	Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kota Magelang	33.867.444	37.516.358	40.933.765	44.686.250	49.205.553	53.650.729	57.995.080	62.614.803	67.294.869	72.146.162
2	Kota Surakarta	42.920.990	47.544.830	52.285.755	57.269.451	62.854.602	68.271.376	73.460.125	79.523.698	85.790.859	92.386.932
3	Kota Salatiga	34.245.751	38.133.423	41.452.729	44.710.264	48.928.130	52.851.344	56.509.986	60.247.019	64.410.677	68.608.547
4	Kota Semarang	51.809.889	57.307.818	61.711.131	66.169.342	72.988.828	78.892.913	85.044.685	91.194.919	98.213.965	105.587.436
5	Kota Pekalongan	16.397.039	18.186.195	19.936.487	21.988.161	24.148.253	26.242.128	28.432.184	30.722.701	33.136.443	35.408.930
6	Kota Tegal	28.731.540	32.125.959	34.490.001	37.460.222	41.065.677	44.612.364	48.391.969	52.386.403	56.649.292	61.173.608

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

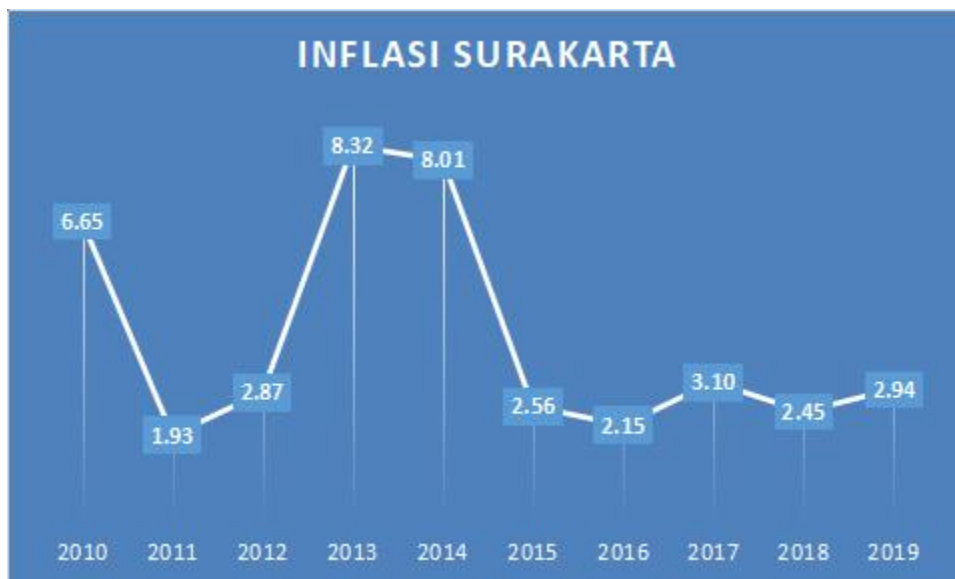
Pada tabel 4.8, perbandingan dengan kota lain (di luar kabupaten) juga masih menunjukkan bahwa PDRB perkapita Kota Surakarta peringkat 2 di bawah Kota Semarang yang merupakan ibukota provinsi. Dengan demikian, iklim perekonomian di Kota Surakarta dapat dikatakan berjalan sangat dinamis. Dinamika perekonomian tersebut di sisi lain diimbangi dengan kemampuan Kota Surakarta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sehingga menghasilkan PDRB perkapita yang tinggi sepanjang 2010-2019. Perhitungan dengan menggunakan PDRB ADHK atau PDRB perkapita riil pun juga masih menempatkan Kota Surakarta di peringkat 2 untuk kategori “kota di provinsi Jawa Tengah sepanjang 2010-2019.

C. Inflasi

Sepanjang 2010-2019 inflasi di Surakarta terlihat berfluktuasi. Selama periode tersebut inflasi terendah terjadi pada tahun 2011 yang mencapai hanya 1,93% dan yang tertinggi adalah tahun 2013 yang mencapai 8,32%. Penurunan inflasi yang sangat tajam terjadi pada tahun 2015, yaitu dari 8,01% di tahun 2014 menjadi 2,56% di tahun 2015. Inflasi tahun 2019 tercatat sebesar 2,94% dan angka ini naik bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang besarnya 2,45%.

Gambar 4.1

Perkembangan Laju Inflasi 2010-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta.

Dilihat dari kelompok barang dan jasa, kelompok bahan makanan memberikan kontribusi besar terhadap inflasi di Kota Surakarta tahun 2019 yaitu sebesar 5,26% sedangkan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau serta kelompok kesehatan juga memberikan andil besar dalam inflasi tahun 2019 di Surakarta dengan kontribusi 4,21%. Kontribusi kelompok bahan makanan dalam inflasi 2019 meningkat cukup tajam dibandingkan tahun 2018.

Tabel 4.9
Perkembangan Laju Inflasi Berdasarkan Kelompok Barang

Kelompok Barang Jasa	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Koef. Var.
Umum	6,65	1,93	2,87	8,32	8,01	2,56	3,15	3,1	2,45	2,94	55,39
Bahan Makanan	6,25	21,6	- 2,02	3,14	12,49	4,1	3,94	- 0,99	2,13	5,26	117,12
Makanan Jadi, Minuman Rokok & Tembakau	3,21	5,36	4,4	4,15	3,62	2,98	2,62	2,53	3,45	4,21	22,98
Perumahan	1,56	2,74	2,07	3,65	8,91	3,2	2,16	3,76	0,9	1,49	70,73
Sandang	2,02	4,63	4,74	6,59	2,74	2,55	1,24	2,83	2,6	3,32	44,73
Kesehatan	0,46	3,34	1,98	5,1	4,93	4,11	5,29	7,45	5,06	1,36	51,63
Pendidikan, Rekreasi & OR	1	3,95	3,01	2,19	4,53	3,81	1,85	1,79	2,04	2,75	39,62
Transport, Komunikasi & Keuangan	2,62	1,16	1,32	14,13	12,17	-2,01	-1,43	7,19	2,99	1,38	131,52

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, diolah.

Bila inflasi dilihat secara sektoral, maka inflasi dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan PDRB deflator, yaitu perbandingan PDRB harga berlaku dengan harga konstan. PDRB deflator memiliki perbedaan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). PDRB deflator mengukur semua harga barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi sementara IHK hanya mengukur harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Selain itu, PDRB deflator hanya mengukur barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri. PDRB deflator mengukur perubahan harga secara umum sementara IHK mengukur perubahan harga untuk kelompok barang tertentu.

Berdasarkan pendekatan ini inflasi di Surakarta tahun 2019 mencapai 2,14% dan inflasi ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan tahun 2011 yang mencapai

4,65% atau dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 2,52%. Sektor yang memiliki tingkat inflasi cukup besar pada tahun 2019 adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai 3,39%, sektor konstruksi sebesar 3,11%, serta sektor jasa pendidikan sebesar 2,82%. Sektor perdagangan memiliki inflasi sebesar 2,75%. Selama periode pelaksanaan RPJMD 2016-2021, hampir semua sektor menunjukkan penurunan laju inflasi di tahun 2019 dibandingkan tahun 2016 dan hanya beberapa sektor saja yang menunjukkan kenaikan laju inflasi dari 2016 ke 2019 yaitu sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor real estate, serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Tabel 4.10
Perbandingan Inflasi Sektoral 2011, 2016, dan 2018

Lapangan Usaha	2011	2016	2019
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,40	6,00	3,39
B. Pertambangan dan Penggalian	4,01	1,60	1,55
C. Industri Pengolahan	10,63	4,48	2,12
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,59	7,29	0,38
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,59	1,61	1,42
F. Konstruksi	4,66	1,76	3,11
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,39	2,88	2,75
H. Transportasi dan Pergudangan	0,64	0,56	2,03
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,39	3,96	1,22
J. Informasi dan Komunikasi	0,50	0,05	1,00
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6,91	3,05	1,42
L. Real Estate	2,64	1,72	1,81
M,N. Jasa Perusahaan	5,91	4,09	1,55
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,97	5,42	1,51
P. Jasa Pendidikan	18,85	3,21	2,82
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,14	0,80	1,02
R,S,T,U. Jasa Lainnya	3,24	4,11	0,67
Produk Domestik Regional Bruto	4,64	2,52	2,14

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, diolah.

D. Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Dalam kemiskinan, terdapat dua

ukuran yang dipergunakan, yaitu tingkat kedalaman dan tingkat keparahan. Tingkat kemiskinan Surakarta selama 2010-2019 terlihat menunjukkan tren penurunan dari 13,96% di tahun 2010 menjadi 9,08% di tahun 2018 dan di tahun 2019 tingkat kemiskinan kembali turun 8,70%. Penurunan tingkat kemiskinan ini menunjukkan kinerja yang sangat baik karena kenaikan jumlah penduduk diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin tahun 2019 mencapai 45.200 dan angka ini turun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 46.990. Penurunan tingkat kemiskinan di sisi lain juga diikuti oleh kenaikan garis kemiskinan selama 2010-2019. Pada tahun 2019 garis kemiskinan Kota Surakarta mencapai Rp473.516 per kapita per bulan.

Dalam hal tingkat kedalaman kemiskinan, pada tahun 2019 Kota Surakarta memiliki nilai indeks kedalaman kemiskinan atau P1 sebesar 1,60 sedangkan nilai indeks keparahan kemiskinan atau P2 sebesar 0,48. Dengan demikian, penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi di tahun 2019 belum diikuti oleh perbaikan indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan, sehingga meski tingkat kemiskinan turun namun tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan justru meningkat.

Tabel 4.11
Indikator Kemiskinan Surakarta 2010-2019

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Miskin (ribuan)	69,80	64,50	60,70	59,70	55,92	55,71	55,91	54,89	46,99	45,20
Tingkat Kemiskinan	13,96	12,92	12,00	11,74	10,95	10,89	10,88	10,65	9,08	8,70
Indeks Kedalaman Kemiskinan=P1	2.19	1.89	1.33	1.63	1.48	1.74	1.34	1.87	1.47	1.60
Indeks Keparahannya Kemiskinan=P2	0,53	0,46	0,28	0,34	0,30	0,40	0,35	0,44	0,35	0,48
Garis Kemiskinan	306.584	326.233	361.517	371.918	385.467	406.840	430.293	448.062	464.063	473.516

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, diolah.

Bila dikaitkan dengan PDRB, selama 2010-2019 pola antara PDRB dengan jumlah penduduk miskin memiliki karakteristik berbanding terbalik, yang berarti semakin tinggi PDRB semakin berkurang jumlah penduduk miskin. Nilai koefisien korelasi keduanya adalah $r=0,95$ dengan nilai koefisien determinasi disesuaikan (r^2 adjusted)=0,92. Hal ini berarti kenaikan PDRB di Surakarta membawa dampak pada penurunan jumlah penduduk miskin, hanya

saja nilai koefisien regresi kedua variabel tersebut sangat kecil. Kecilnya nilai koefisien regresi membawa arti bahwa kenaikan PDRB (pertumbuhan ekonomi) membawa dampak yang sangat kecil terhadap penurunan jumlah penduduk miskin meski hubungan keduanya secara statistik sangat erat.

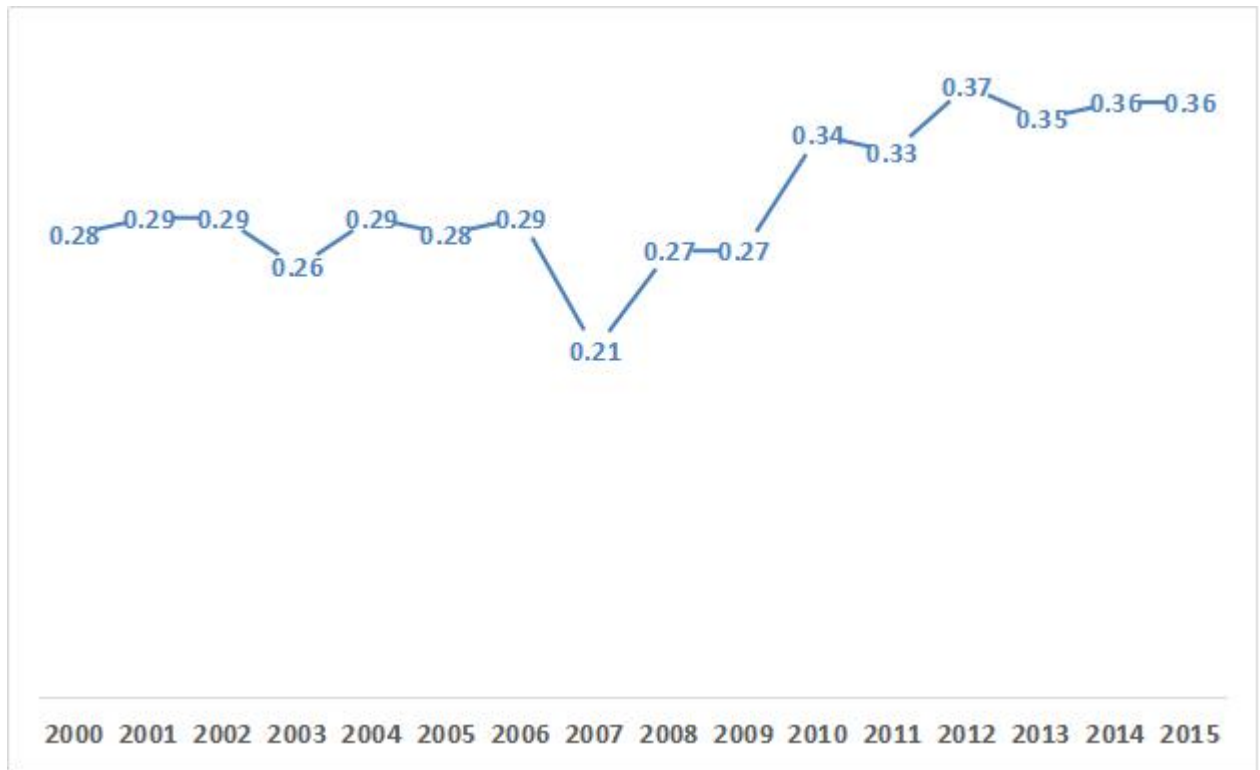
<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,958238865
R Square	0,918221722
Adjusted R Square	0,907999437
Standard Error	2,235627052
Observations	10

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	99,5166729	4,548454898	21,87922605	2,01E-08
PDRB-ADHK	-1,52022E-06	1,60401E-07	9,477630938	1,27E-05

Dengan demikian, pengurangan jumlah penduduk miskin yang pada akhirnya berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan, tidak cukup dilakukan hanya melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan membawa dampak pada pengurangan tingkat kemiskinan, namun perlu kebijakan yang mampu mendukung mekanisme transmisi terhadap pemberdayaan penduduk miskin.

Untuk melihat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Surakarta, dapat dilihat berdasarkan Gini ratio atau indeks Gini, atau bias juga dilihat menggunakan Indeks Williamson. Berdasarkan nilai indeks Gini, nilai indeks Gini Surakarta tahun 2015 adalah 0,360 dan kondisi tersebut tidak berbeda dibandingkan tahun 2014. Angka indeks Gini yang di atas 0,30 merupakan kondisi yang perlu mendapatkan perhatian serius. Secara grafis terlihat bahwa tingkat ketimpangan di Surakarta menunjukkan tren yang meningkat sepanjang 2000-2015. Dengan demikian peningkatan pertumbuhan ekonomi Surakarta belum memberikan dampak pada pengurangan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan.

Gambar 4.2
Indes Gini Kota Surakarta Tahun 2000-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, diolah.

Data indeks Gini di daerah hingga saat ini hanya terdapat sampai tahun 2015 dan BPS hanya melakukan perhitungan indeks Gini pada level provinsi dan nasional. Hal ini membuat Surakarta mengalami kesulitan untuk meakukan evaluasi terhadap tingkat ketimpangan yang terjadi. Untuk itu, alternative yang dapat dilakukan adalah menggunakan indeks Williamson atau melakukan konversi dari indeks Williamson ke indeks Gini.

Bila dilakukan prediksi Indeks Gini menggunakan beberapa pendekatan, maka nilai indeks Gini Kota Surakarta selama 2016-2019 ditaksir antara 0,357 s.d. 0,390. Prediksi menggunakan metode rata-rata bergerak 2 dan 3 periode menghasilkan angka yang tidak jauh berbeda.

Prediksi	2016	2017	2018	2019
Growth Rate 2000-2015	0,367	0,375	0,382	0,390
Least Square	0,357	0,363	0,370	0,376
Moving Average-3 periode	0,357	0,356	0,357	0,357
Moving Average-2 periode	0,358	0,356	0,357	0,357

Nilai Indeks Gini Kota Surakarta lebih rendah dibandingkan dengan indeks Gini Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Tahun 2015 misalnya, nilai indeks Gini Jawa Tengah sebesar 0,382 dan nasional sebesar 0,402. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Surakarta. Tahun 2019, indeks Gini Jawa Tengah sebesar 0,361, angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 yang besarnya 0,357.

Tabel 4.12
Indeks Gini Kota Surakarta vs Provinsi vs Nasional

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Surakarta	0,340	0,330	0,370	0,350	0,360	0,360	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2	Provinsi Jawa Tengah	0,341	0,357	0,383	0,390	0,388	0,382	0,357	0,365	0,357	0,361
3	Indonesia	0,378	0,388	0,413	0,406	0,414	0,402	0,394	0,391	0,384	0,382
4	Rata-rata Jawa Tengah	0,264	0,325	0,338	0,332	0,331	0,331	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5	Rata-rata Kota di Jawa Tengah	0,304	0,331	0,350	0,340	0,338	0,338	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia, diolah.

E. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan dan bukan angkatan kerja, dan angkatan kerja sendiri terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka. Pada tahun 2019 jumlah angkatan kerja di Kota Surakarta adalah 286.811 dengan jumlah pengangguran sebanyak 12.003. Dengan demikian tingkat pengangguran Kota Surakarta tahun 2019 mencapai 4,18%, menurun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 4,39%. Meski jumlah pengangguran sedikit mengalami kenaikan di tahun 2019, namun

tingkat pengangguran (perbandingan antara jumlah pengangguran dengan angkatan kerja) justru menurun. Hal ini disebabkan karena peningkatan angkatan kerja yang lebih banyak dibandingkan peningkatan jumlah pengangguran. Tingkat kesempatan kerja, yaitu perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja, selama 2010-2019 menunjukkan tren peningkatan. Hanya di tahun 2012-2013 tingkat kesempatan kerja mengalami penurunan (tingkat pengangguran mengalami kenaikan).

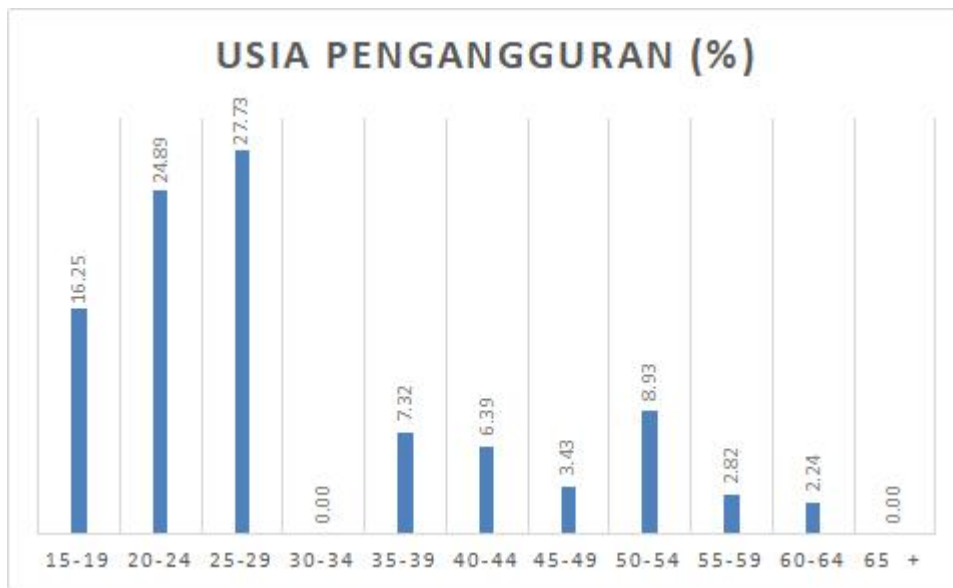
Tabel 4.13
Indikator Ketenagakerjaan Kota Surakarta 2010-2019

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angkatan Kerja (orang)	258.573	263.562	278.535	287.511	275.191	284.076	n.a.	271.527	271.375	286.811
Jumlah Pengangguran (orang)	22.575	20.295	17.513	20.763	16.957	12.877	n.a.	12.133	11.910	12.003
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	91,27	92,30	93,71	92,78	93,84	95,47	n.a.	95,53	95,61	95,82
Tingkat Pengangguran (%)	8,73	7,70	6,29	7,22	6,16	4,53	7,55	4,47	4,39	4,18
TPAK	66,81	67,22	70,43	72,10	68,48	70,12	n.a.	66,10	65,62	68,93

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, diolah.

Berdasarkan data tahun 2018, dari sisi pendidikannya sebagian besar pengangguran Kota Surakarta berusia 25-29 tahun (27,73%), 20-24 tahun (24,89%), serta usia 15-19 tahun (16,25%). Dengan demikian secara keseluruhan pengangguran di Kota Surakarta yang berusia 15-29 tahun mencapai 68,87%. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian tersendiri, terlebih melihat semakin besarnya pertumbuhan angkatan kerja di Kota Surakarta.

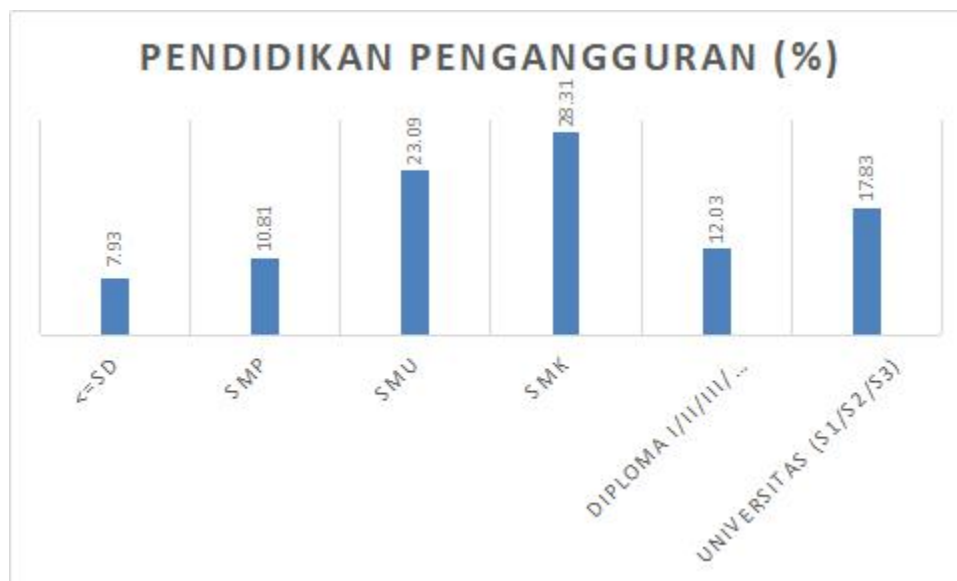
Gambar 4.3
Usia Pengangguran Kota Surakarta Tahun 2018



Sumber: Pusdatin Kemeterian tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pengangguran yang terjadi di Kota Surakarta tahun 2018 didominasi oleh mereka yang berijazah SMA dan SMK masing-masing 23,09% dan 28,31%. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa cukup banyaknya lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi, serta banyaknya lulusan SMK yang tidak terserap ke dunia kerja meski pendidikan SMK disiapkan untuk siap kerja. Di sisi lain, pengangguran lulusan perguruan tinggi juga tergolong cukup besar. Lulusan diploma yang berstatus pengangguran mencapai 12,03% dan lulusan sarjana mencapai 17,83%.

Gambar 4.4
Pendidikan Tertinggi Pengangguran Kota Surakarta Tahun 2018



Sumber: Pusdatin Kemeterian tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dari sisi yang lain, sebagian besar pengangguran adalah mereka yang mencari pekerjaan, yaitu 72,42%. Pengangguran yang berstatus mempersiapkan usaha tergolong sangat kecil yaitu 6,92% sehingga masyarakat penganggur yang berniat untuk wiraswasta tergolong kecil. Upaya menggalakan masyarakat agar berwiraswasta perlu dilakukan secara masif dan intensif untuk mengurangi tingkat ketergantungan dalam mencari pekerjaan.

Gambar 4.5

Latar Belakang Pengangguran Kota Surakarta Tahun 2018



Sumber: Pusdatin Kemeterian tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bila dikaitkan dengan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan lapangan usaha atau sektor ekonomi, maka terlihat pada tahun 2018 lalu sebagian besar penduduk yaitu 74.304 atau 28,64% bekerja di sektor perdagangan dan urutan kedua adalah yang bekerja di sektor industry pengolahan yang berjumlah 57.460 atau 22,15%. Di sektor konstruksi yang memiliki nilai proporsi terbesar dalam PDRB justru menyerap tenaga kerja yang tergolong kecil, yaitu hanya 3,63%. Hal ini bertolak belakang dengan sektor jasa lainnya yang memiliki proporsi kecil dalam PDRB (0,95%) namun mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar yaitu 10,45%. Hal yang sama juga terjadi dengan beberapa sektor lain seperti sektor transportasi dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yang memiliki proporsi tidak besar dalam PDRB namun mampu menyerap tenaga kerja yang besar.

Table 4.14
Perbandingan Penduduk yang Bekerja dengan PDRB Tahun 2018

Lapangan Usaha	Penduduk Bekerja		PDRB ADHB	
	Jumlah	(%)	Nilai (Juta Rp)	(%)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1998	0,77	219.281,71	0,49
B Pertambangan dan Penggalian	470	0,18	801,67	0,00
C Industri Pengolahan	57460	22,15	3.755.201,87	8,45
D Pengadaan Listrik dan Gas	374	0,14	89.447,76	0,20
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1512	0,58	64.543,46	0,15
F Konstruksi	9424	3,63	12.059.892,39	27,14
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil	74304	28,64	9.840.818,19	22,15
H Transportasi dan Pergudangan	14992	5,78	1.133.736,50	2,55
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30573	11,78	2.438.524,86	5,49
J Informasi dan Komunikasi	3148	1,21	5.182.973,52	11,67
K Jasa Keuangan dan Asuransi	7153	2,76	1.704.370,50	3,84
L Real Estat	759	0,29	1.760.865,00	3,96
M,N Jasa Perusahaan	7228	2,79	372.415,59	0,84
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial W	6868	2,65	2.459.805,65	5,54
P Jasa Pendidikan	12839	4,95	2.425.953,87	5,46
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3252	1,25	499.078,89	1,12
R,S,T,U Jasa Lainnya	27111	10,45	422.259,08	0,95
Total	259465	100,00	44.429.970,52	100,00

Sumber: Pusdatin Kemeterian tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Permasalahan pengangguran merupakan permasalahan yang saat ini menjadi perhatian khusus pemerintah termasuk pemerintah daerah. Pengangguran akan mendorong timbulnya permasalahan sosial lainnya. Oleh karena itu kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang ditempuh harus diarahkan pada upaya pengurangan tingkat pengangguran. Kenaikan jumlah pengangguran yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja akan mendorong peningkatan tingkat pengangguran, namun bila kenaikan jumlah angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan kenaikan jumlah pengangguran, maka tingkat pengangguran akan turun.

Bagaimanakah hubungan antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi? Studi yang pernah dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi negative dengan pengurangan tingkat pengangguran, sehingga pengurangan tingkat pengangguran dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Korelasi antara PDRB dengan jumlah pengangguran di Surakarta adalah erat yang ditunjukkan dengan nilai r^2 adjusted sebesar 0,83 dengan koefisien regresi sebesar -0,00042. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi PDRB diikuti akan semakin mengurangi jumlah pengangguran. Meski demikian, kecilnya koefisien regresi menunjukkan bahwa diperlukan kenaikan PDRB yang sangat besar untuk mengurangi jumlah pengangguran. Oleh karena itu, kebijakan dan strategi mengurangi jumlah pengangguran harus dilakukan dengan kebijakan dan strategi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, misalnya melalui kebijakan alokasi APBD untuk program pemberdayaan masyarakat melalui dinas terkait.

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,914771
R Square	0,836807
Adjusted R Square	0,813493
Standard Error	1832,005
Observations	9

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	30256,43	2402,37	12,59441	4,59E-06
PDRB-ADHB	-0,00042	6,94E-05	-5,99115	0,000547

Pengangguran akan mendorong munculnya kemiskinan akibat tidak adanya dana untuk keperluan sehari-hari. Secara teoritis, keduanya akan memiliki hubungan positif dalam arti, semakin tinggi jumlah pengangguran akan mendorong semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin. Nilai adjusted r^2 sebesar 0,78 dengan koefisien yang tergolong kecil yaitu 0,001617.

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,884287
R Square	0,781964
Adjusted R Square	0,750816
Standard Error	3,872371
Observations	9

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	30,51418	5,428057	5,621566	0,000798
JMLH				
PENGANGGURAN	0,001617	0,000323	5,010467	0,001547

F. ICOR dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

ICOR merupakan indikator yang menunjukkan perubahan output (PDRB) akibat perubahan investasi. Dengan kata lain, ICOR merupakan salah satu indikator efisiensi ekonomi. Semakin kecil nilai ICOR semakin tinggi tingkat efisiensi perekonomian.

Penghitungan ICOR ada yang menggunakan time lag 0,1, atau 2. Bila menggunakan time lag 0, artinya investasi tahun ini langsung berdampak pada output tahun ini juga. Bila menggunakan time lag 1 misalnya, berarti output tahun ini dihasilkan dari investasi 1 tahun yang lalu. Penggunaan time lag sangat berkaitan dengan karakteristik investasi. Investasi yang sifatnya jangka panjang dengan skala besar, lebih tepat menggunakan ICOR dengan time lag 1 atau 2.

Berdasarkan perhitungan ICOR lag 1 menggunakan PDRB ADHB, terlihat ICOR Kota Surakarta sangat tinggi, namun ketika menggunakan lag 2, nilai ICOR menjadi turun sangat drastis. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa karakteristik investasi di Kota Surakarta lebih dominan investasi yang sifatnya jangka panjang. ICOR lag 2 tahun 2019 sebesar 3,48 terlihat lebih kecil dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 4,68.

Tabel 4.15

ICOR Kota Surakarta Tahun 2011-2019

ICOR Surakarta	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
LAG 1	6,51	6,97	7,27	7,26	8,05	8,93	8,36	9,21	9,47
LAG 2	-	3,54	3,73	3,84	3,97	4,38	4,50	4,68	3,48

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Komponen investasi untuk penghitungan ICOR juga lazim memasukan komponen perubahan inventori. Dengan memasukkan komponen perubahan inventori, nilai ICOR akan lebih tinggi. Bila diperbandingkan dengan ICOR Jawa Tengah dan Nasional, nilai ICOR Kota Surakarta terlihat lebih tinggi. Meski demikian, nilai ICOR 2018-2019 Kota Surakarta menunjukkan penurunan sementara Jawa Tengah dan nasional menunjukkan kenaikan.

Tabel 4.16
Perbandingan ICOR Kota Surakarta vs Provinsi vs Nasional

ICOR-PMTB	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Surakarta	3,54	3,73	3,84	3,97	4,38	4,50	4,68	3,48
Jawa Tengah	1,73	1,76	1,63	1,71	2,03	2,27	2,28	2,37
Indonesia	1,61	1,81	1,76	1,89	2,21	2,12	1,97	2,28
ICOR-PMTB & PERUB. INVENTORI	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Surakarta	3,90	3,97	3,99	4,01	4,41	4,53	4,73	3,52
Jawa Tengah	2,14	2,06	1,80	1,78	2,07	2,33	2,38	2,43
Indonesia	1,73	1,92	1,87	1,96	2,29	2,22	2,10	2,38

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

G. LQ dan Shift-Share

Analisis LQ merupakan analisis untuk melihat keunggulan suatu sektor atau subsektor secara relatif dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas, seperti Kota Surakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Pada dasarnya analisis ini untuk melihat posisi suatu sektor atau subsektor tertentu diantara sektor atau subsektor yang sama di seluruh wilayah. Implikasi lain adalah untuk melihat kemampuan suatu sektor atau subsektor untuk memenuhi kebutuhan internal wilayah. Analisis LQ dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu Static LQ (SLQ) serta Dynamic LQ (DLQ). Dinamic LQ menggunakan dasar pertumbuhan sektoral.

Jika LQ lebih besar dari 1, sektor tersebut merupakan sektor basis, artinya tingkat spesialisasi Kota Surakarta lebih tinggi dari tingkat provinsi, Jika LQ lebih kecil dari 1, merupakan sektor non basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari tingkat provinsi, Jika LQ sama dengan 1, berarti tingkat spesialisasi Kota Surakarta sama dengan tingkat

provinsi. Nilai DLQ yang dihasilkan dapat diartikan sebagai berikut: jika $DLQ > 1$, maka potensi perkembangan sektor i di Kota Surakarta lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di provinsi. Namun, jika $DLQ < 1$, maka potensi perkembangan sektor i di Kota Surakarta lebih rendah dibandingkan provinsi secara keseluruhan. Gabungan antara nilai SLQ dan DLQ dijadikan kriteria dalam menentukan apakah sektor ekonomi tersebut tergolong unggulan, prospektif, andalan, dan tertinggal.

Kriteria	$DLQ > 1$	$DLQ < 1$
$SLQ > 1$	Unggulan	Prospektif
$SLQ < 1$	Andalan	Tertinggal

Berdasarkan nilai LQ, selama 2014-2019 terdapat beberapa sektor yang memiliki LQ di bawah 1, yaitu sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalan; sektor industri pengolahan; sektor transportasi dan pergudangan; serta sektor jasa lainnya. Kecilnya nilai LQ tersebut mengindikasikan bahwa usaha-usaha di sektor-sektor tersebut selama 2015-2019 tidak mampu memenuhi kebutuhan internal Kota Surakarta, sehingga harus didatangkan dari wilayah lain. Selain itu, nilai $LQ < 1$ atas beberapa sektor tersebut juga mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut bukan sektor yang masuk dalam kelompok terspesialisasi di Surakarta. Meski mungkin di Kota Surakarta sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi penting, namun di tingkat provinsi sektor-sektor tersebut tergolong kecil. Dari sektor-sektor tersebut, terdapat 2 sektor yang memiliki nilai DLQ di atas 1 pada tahun 2019 yaitu sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Dengan demikian, meski kedua sektor tersebut dalam konteks provinsi tidak menonjol, namun perubahan atau pertumbuhan sektor tersebut selama 2018-2019 termasuk sangat menonjol dalam level provinsi.

Di sektor industri pengolahan nilai LQ secara keseluruhan hanya sekitar 0,22 dan nilai ini tidak berbeda jauh sepanjang 2010-2019. Kontribusi industri pengolahan dalam pembentukan PDRB Surakarta tergolong besar sehingga sangat mendorong perekonomian Surakarta, namun sebenarnya sektor ini di Surakarta bila dibandingkan dengan kondisi di provinsi Jawa Tengah masih sangat kurang. Meski nilai LQ tergolong kecil, namun nilai

DLQ sektor industry pengolahan selama 2015-2019 menunjukkan tren yang meningkat, bahkan selama 2017-2019 nilai DLQ sektor ini di atas 1.

Sektor konstruksi serta perdagangan memiliki nilai LQ yang tinggi yaitu masing-masing 2,4844 dan 1,6002. Nilai LQ sektor penyediaan akomodasi pada tahun 2018 adalah 1,5315. Kota Surakarta memiliki fasilitas akomodasi yang sangat memadai dengan tingkat hunian yang tinggi. Kondisi ini ditunjang dengan destinasi wisata mengingat Surakarta juga merupakan kota budaya.

Nilai LQ tertinggi adalah sektor informasi dan komunikasi yang pada tahun 2018 mencapai 3,024 dan tahun 2019 sedikit menurun menjadi 2,973. Dari perhitungan nilai LQ tersebut dapat disimpulkan bahwa perekonomian Surakarta memiliki keunggulan di hampir semua sektor, kecuali sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industry pengolahan, serta sektor transportasi dan pergudangan. Bila dilihat sepanjang 2010-2019, nilai LQ sektor ekonomi Surakarta hampir semuanya menunjukkan penurunan. Kondisi ini menggambarkan bahwa perekonomian Jawa Tengah (di luar Surakarta) berjalan sangat dinamis dan memberikan dampak kepada Surakarta.

Table 4.17**Nilai Static LQ dan Dynamic LQ Kota Surakarta 2015-2019**

LAPANGAN USAHA	2015		2016		2017		2018		2019	
	SLQ	DLQ	SLQ	DLQ	SLQ	DLQ	SLQ	DLQ	SLQ	DLQ
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,032	0,964	0,032	0,989	0,033	1,015	0,033	1,009	0,033	1,012
B. Pertambangan dan Penggalian	0,001	0,931	0,001	0,836	0,001	0,944	0,001	0,957	0,001	0,943
C. Industri Pengolahan	0,226	0,990	0,225	0,995	0,224	0,996	0,223	0,996	0,224	1,003
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,079	1,001	2,111	1,015	2,083	0,987	2,067	0,992	2,054	0,994
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,429	1,002	2,432	1,001	2,416	0,994	2,401	0,994	2,400	1,000
F. Konstruksi	2,578	0,994	2,573	0,998	2,516	0,978	2,480	0,986	2,464	0,994
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,652	1,000	1,633	0,989	1,624	0,994	1,604	0,988	1,587	0,989
H. Transportasi dan Pergudangan	0,864	1,007	0,867	1,003	0,858	0,990	0,840	0,979	0,828	0,986
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,655	0,995	1,636	0,988	1,598	0,977	1,532	0,959	1,472	0,961
J. Informasi dan Komunikasi	3,199	0,974	3,132	0,979	3,044	0,972	3,024	0,993	2,973	0,983
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,266	0,989	1,255	0,991	1,248	0,994	1,240	0,994	1,246	1,005
L. Real Estat	2,389	0,997	2,379	0,996	2,340	0,983	2,263	0,967	2,201	0,972
M,N. Jasa Perusahaan	2,147	1,007	2,101	0,979	2,010	0,957	1,994	0,992	1,969	0,987
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,074	1,011	2,071	0,999	2,036	0,983	2,017	0,990	2,013	0,998
P. Jasa Pendidikan	1,183	0,994	1,146	0,969	1,117	0,975	1,092	0,978	1,072	0,982
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,284	0,997	1,250	0,974	1,230	0,984	1,225	0,996	1,214	0,992
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,630	0,999	0,614	0,976	0,601	0,978	0,585	0,975	0,575	0,982

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Tabel 4.18

Overlay SLQ dan DLQ Sektor Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2019

Kriteria	DLQ > 1	DLQ < 1
	Unggulan	Prospektif
SLQ > 1	Sektor : 1. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2. Jasa Keuangan dan Asuransi	Sektor : 1. Pengadaan Listrik dan Gas 2. Konstruksi 3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5. Informasi dan Komunikasi 6. Real Estat 7. Jasa Perusahaan 8. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 9. Jasa Pendidikan 10. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
SLQ < 1	Andalan	Tertinggal
	Sektor : 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Industri Pengolahan	Sektor : 1. Pertambangan dan Penggalian 2. Transportasi dan Pergudangan 3. Jasa Lainnya

Dari tinjauan shift-share, perhitungan shift share dilakukan pada periode 2015-2019. hanya sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki nilai negatif. Dari aspek regional share (Nij), semua sektor memiliki nilai regional share yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di Jawa Tengah memberikan dampak positif bagi perekonomian Surakarta. Sebagai ilustrasi nilai regional shift industri pengolahan selama 2015-2019 sebesar Rp520,1 milyar yang berarti kondisi perekonomian di Jawa Tengah mampu memberikan kontribusi terhadap output sektor industri pengolahan di Surakarta sebesar Rp520,1 milyar. Sementara itu proportional shift (Mij) menggambarkan pengaruh struktur ekonomi Kota Surakarta terhadap suatu sektor atau subsektor. Industri pengolahan misalnya memiliki nilai proportional shift selama 2015-2019 sebesar -Rp85 milyar. Hal ini

merupakan indikasi bahwa struktur perekonomian selama 2015-2019 di Kota Surakarta menyebabkan tekanan output sektor industri sebesar –Rp85 milyar. Dengan kata lain, perkembangan kondisi sektor industry saat ini lebih banyak disebabkan oleh dinamika perekonomian di luar Surakarta, bukan dari kondisi yang terjadi di dalam Surakarta itu sendiri.

Untuk differential shift (Cij), cukup banyak yang memiliki nilai negatif yang berarti daya kompetitif bidang-bidang tersebut masih belum tinggi atau masih kalah dibandingkan dengan sektor yang sejenis di wilayah Jawa Tengah. Dengan demikian, meskipun kinerja sektor-sektor tersebut dari aspek rata-rata pertumbuhan dan proporsi tergolong baik atau tinggi, namun dibandingkan rata-rata daerah lain di Jawa Tengah masih kurang. Perkembangan yang terjadi masih dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Jawa Tengah serta struktur perekonomian Kota Surakarta, bukan karena daya kompetitifnya.

Secara keseluruhan, berdasarkan nilai shift share 2015-2019, dinamika perekonomian Jawa Tengah memberikan dampak besar bagi perekonomian Kota Surakarta. Total nilai regional shift pada tahun 2019 menunjukkan bahwa dari total output perekonomian Kota Surakarta yang tercermin melalui PDRB, sebesar Rp6,5 trilyun akibat pengaruh perekonomian Jawa Tengah dan Rp1,8 trilyun akibat struktur perekonomian internal Kota Surakarta dan daya saing akibat struktur ekonomi di Kota Surakarta memberikan tekanan sehingga menyebabkan outputnya –Rp1,4 trilyun.

Tabel 4.19
Nilai Shift Share 2015-2019 Kota Surakarta

LAPANGAN USAHA	Nij	Mij	Cij	D
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29848,49	-19132,7	5553,54473	16269,34
Pertambangan dan Penggalan	122,9463	50,60741	-197,96371	-24,41
Industri Pengolahan	520114,5	-85075,6	8218,60028	443257,5
Pengadaan Listrik dan Gas	14953,98	-456,124	57,5866025	14555,44
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11361,28	-1875,76	46,5471752	9532,07
Konstruksi	1697819	300220,3	-297928,56	1700111
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1544593	163680,7	-226606,81	1481667
Transportasi dan Pergudangan	187578,9	58377,3	-31566,267	214390
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	336110,8	154544,1	-193921,5	296733,3
Informasi dan Komunikasi	855315,4	1151462	-336346,77	1670431
Jasa Keuangan dan Asuransi	221885,8	-3226,05	-2921,6948	215738,1
Real Estate	286951,7	46763,8	-106219,89	227495,6
Jasa Perusahaan	47676,72	46860,32	-21402,362	73134,68
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	372964	-165315	-30692,227	176956,9
Jasa Pendidikan	281048,8	124320,8	-133153,44	272216,1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	65609,53	44447,63	-16546,278	93510,88
Jasa lainnya	62756,45	49967,99	-29010,646	83713,79
PDRB	6536711	1865614	-1412638,1	6989687

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Perhitungan shift-share dinamis memberikan gambaran apakah suatu sektor atau subsektor terspesialisasi atau tidak, serta apakah suatu sektor atau subsektor memiliki daya saing atau tidak bila dibandingkan dengan sektor atau subsektor yang sama di Jawa Tengah. Nilai negatif efek spesialisasi menggambarkan bahwa sektor atau subsektor tersebut bukan merupakan sektor yang terspesialisasi di Surakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor tersebut belum menjadi sektor yang *“leading”* dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Demikian pula dengan nilai efek kompetitif yang negatif memberikan gambaran bahwa sektor tersebut memiliki daya saing yang lebih rendah dibandingkan subsektor sejenis di Jawa Tengah. Dengan demikian, ada kemungkinan suatu sektor merupakan sektor yang terspesialisasi di

Surakarta, namun daya saingnya rendah (nilai positif kecil) atau bahkan tidak memiliki daya saing (nilai negatif). Sebaliknya, ada kemungkinan suatu sektor bukan merupakan sektor yang terspesialisasi di Surakarta, namun memiliki daya saing bila dibandingkan dengan sektor sejenis di wilayah Jawa Tengah. Sektor yang unggul merupakan sektor yang memiliki efek spesialisasi dan efek kompetitif yang keduanya positif.

Sektor industri pengolahan misalnya, merupakan sektor yang memiliki daya saing di tingkat provinsi, namun dalam konteks provinsi tersebut, sektor ini bukan merupakan sektor yang menjadi spesialisasi di Kota Surakarta. Untuk sektor konstruksi serta sektor informasi dan komunikasi misalnya, sektor tersebut menjadi sektor spesialisasi di Kota Surakarta, namun dalam konteks provinsi kedua sektor tersebut tidak kompetitif.

Tabel 4.20
Nilai Shift Share Dinamis Tahun 2015-2019

Uraian	SHIFT SHARE DINAMIS 2015-2019	
	Efek Spesialisasi	Efek Kompetitif
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-3.683.181	0,042744
Pertambangan dan Penggalian	-548.557	-0,36991
Industri Pengolahan	-7.703.312	0,00363
Pengadaan Listrik dan Gas	26.728	0,000885
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	28.152	0,000941
Konstruksi	3.807.559	-0,04031
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil d	1.852.341	-0,0337
Transportasi dan Pergudangan	-247.219	-0,03866
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	390.535	-0,13255
Informasi dan Komunikasi	1.896.571	-0,09034
Jasa Keuangan dan Asuransi	133.424	-0,00303
Real Estate	554.614	-0,08504
Jasa Perusahaan	73.389	-0,10313
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	706.736	-0,01891
Jasa Pendidikan	20.336	-0,10884
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.984	-0,05794

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

H. Analisis Rasio PDRB

Informasi rasio ekspor terhadap PDRB dapat menggambarkan peran ekspor dalam pembentukan PDRB menggunakan pendekatan pengeluaran. Semakin tinggi proporsi ekspor terhadap PDRB, semakin baik pula struktur PDRB. Rasio ekspor terhadap PDRB Kota Surakarta pada tahun 2010 adalah 30% dan selama 2010-2018 menunjukkan tren peningkatan rasio. Rasio serupa untuk provinsi Jawa Tengah memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan Kota Surakarta namun untuk nasional nilai rasio tersebut lebih kecil bila dibandingkan dengan Kota Surakarta. Rasio ekspor terhadap PDRB Kota Surakarta pada tahun 2012 (36%) sempat lebih tinggi dibandingkan provinsi Jawa Tengah (35%) namun di tahun 2013, rasio ekspor terhadap PDRB Kota Surakarta menurun sementara provinsi Jawa Tengah justru naik.

Tabel 4.21

Perbandingan Rasio Ekspor Terhadap PDRB Kota Surakarta vs Provinsi Jawa Tengah vs Indonesia

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Surakarta	0,30	0,34	0,36	0,35	0,36	0,34	0,33	0,35	0,37	n.a.
Jawa Tengah	0,34	0,35	0,35	0,38	0,40	0,38	0,38	0,40	0,42	0,42
Indonesia	0,24	0,26	0,25	0,24	0,24	0,21	0,19	0,20	0,21	0,18

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Ekspor Barang dan Jasa merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor pasti menggunakan kapital (PMTB), sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor barang dan jasa terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor barang dan jasa dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Nilai rasio ekspor terhadap PMTB Kota Surakarta selama 2010-2018 berkisar antara 0,45 s.d. 0,55 sementara untuk provinsi Jawa Tengah di atas 1. Kondisi ini menunjukkan bahwa produk domestik yang dihasilkan di Kota Surakarta masih lebih sedikit yang digunakan untuk ekspor dibandingkan untuk kegiatan investasi domestik. Hal ini berbeda dengan provinsi Jawa

Tengah, produk domestic lebih banyak digunakan untuk ekspor dibandingkan untuk kegiatan investasi domestic.

Tabel 4.22

Perbandingan Rasio Ekspor Terhadap PMTB Kota Surakarta vs Provinsi Jawa Tengah vs Indonesia

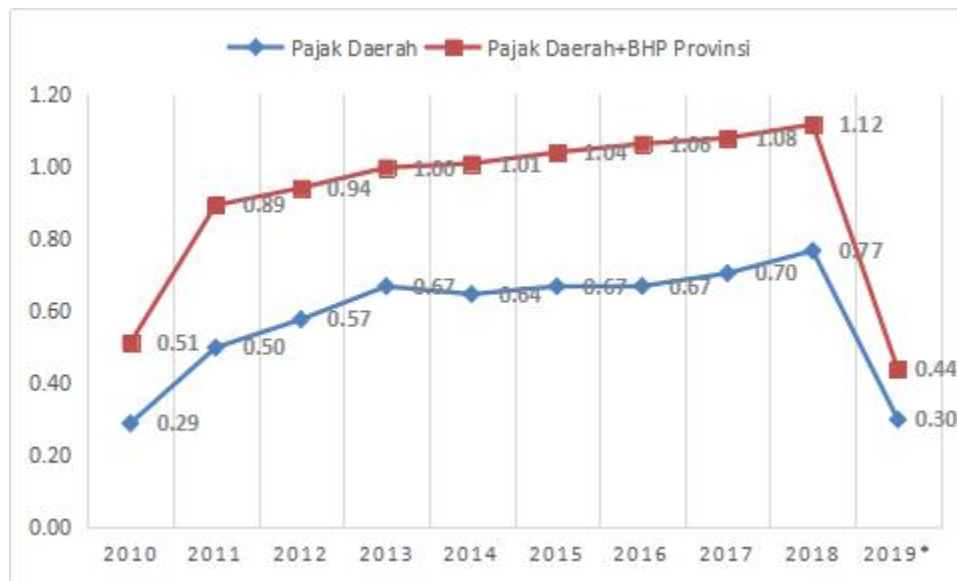
Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Surakarta	0,45	0,50	0,55	0,53	0,53	0,51	0,50	0,52	0,53	n.a.
Jawa Tengah	1,23	1,20	1,15	1,30	1,34	1,25	1,23	1,27	1,30	1,29
Indonesia	0,78	0,84	0,75	0,75	0,73	0,64	0,59	0,63	0,65	0,57

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia, diolah.

Rasio PDRB yang juga penting untuk diperhatikan adalah tax ratio, yaitu rasio pajak daerah terhadap PDRB. Dalam tax ratio, pajak daerah yang digunakan bisa berupa pajak daerah yang merupakan bagian dari PAD, namun bisa juga pajak daerah yang merupakan bagi hasil dengan provinsi. Nilai tax ratio Kota Surakarta apabila menggunakan komponen pajak daerah saja terlihat sangat kecil yaitu di bawah 1% sementara apabila menggunakan pajak daerah dan bagi hasil pajak provinsi, nilainya lebih tinggi, bahkan tahun 2013-2018 di atas 1%. Menurut Kementerian Keuangan, rata-rata tax ratio daerah di Indonesia berkisar 1,2% sehingga nilai Kota Surakarta tersebut tidak berbeda dengan rata-rata nasional.

Di sisi lain, kecilnya tax ratio menggambarkan tambahan pajak yang diperoleh tidak sebesar tambahan PDRB. Hal ini berarti aktivitas ekonomi masyarakat belum membawa dampak pada peningkatan penerimaan pajak.

Gambar 4.6
Tax Ratio Kota Surakarta Tahun 2010-2019

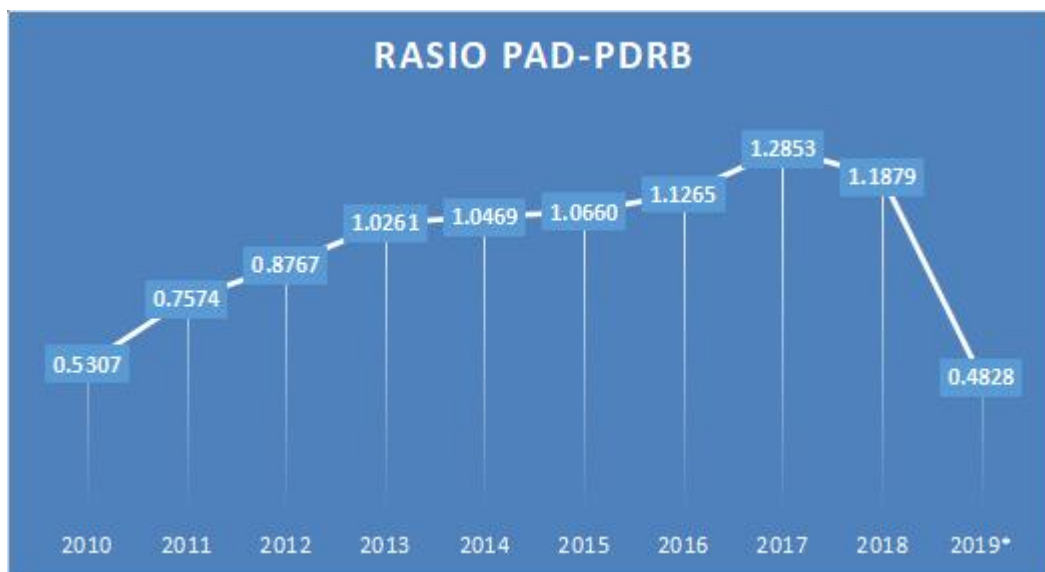


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, diolah.

Rasio antara PAD dengan PDRB Kota Surakarta selama 2010-2018 memiliki tren positif, meski pada tahun 2017-2018 sempat mengalami penurunan. Rasio ini menggambarkan sejauh mana kenaikan PDRB atau pertumbuhan ekonomi membawa dampak pada peningkatan PAD. Idealnya, kenaikan PDRB akan berdampak pada peningkatan PAD karena kenaikan PDRB menggambarkan kenaikan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga akan membawa dampak pada kenaikan komponen-komponen PAD. Namun, struktur PDRB memang berpengaruh terhadap rasio ini. Kenaikan PDRB yang disebabkan karena kenaikan sektor yang lebih banyak focus pada pelayanan public sangat mungkin tidak akan mendorong peningkatan PAD. Oleh karena itu, untuk memperbesar rasio ini (dan juga tax ratio), kebijakan dan strategi yang mendorong peningkatan output sektor industry, perdagangan, dan sejenisnya perlu dirumuskan secara lebih komprehensif.

Gambar 4.7

Rasio PAD Terhadap PDRB Kota Surakarta Tahun 2010-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, diolah.

I. Analisis Makro Keuangan Daerah

Selama 3 tahun dari 2015-2018, pendapatan Kota Surakarta meningkat sebesar 19,80% dari Rp1,568 trilyun menjadi Rp1,879 trilyun. Kenaikan pendapatan tersebut merupakan kontribusi dari kenaikan PAD sebesar 41,56% serta kenaikan dana perimbangan sebesar 44,35%. Pada komponen dana perimbangan, komponen dana alokasi khusus mengalami kenaikan yang sangat besar selama 3 tahun tersebut.

Dari sisi belanja daerah, total belanja daerah juga menunjukkan kenaikan sebesar 24,94% selama 3 tahun, namun komponen belanja tidak langsung menunjukkan penurunan sebesar -17,76%. Komponen belanja daerah yang menunjukkan kenaikan besar adalah komponen belanja bantuan sosial yaitu sebesar 367,37% selama 2015-2018, namun komponen belanja pegawai pada belanja tidak langsung turun sebesar -21,87%. Selain belanja bantuan sosial, komponen belanja tidak terduga juga menunjukkan kenaikan yang sangat tajam lebih dari 500% dari 2015 ke 2018. Untuk komponen belanja langsung, dari 2015 ke 2018 juga menunjukkan kenaikan tajam sebesar 92,02%.

Proporsi PAD dalam penerimaan daerah menunjukkan kenaikan dari 23,77% di tahun 2015 menjadi 28,09% di tahun 2018. Selain itu proporsi dana

perimbangan juga menunjukkan kenaikan dari 48,18% menjadi 58,06%. Untuk komponen belanja daerah, proporsi belanja tidak langsung menunjukkan penurunan cukup tajam dari 61,10% menjadi 40,22%. Penurunan ini lebih banyak disebabkan karena turunnya proporsi belanja pegawai dari 56,98% menjadi 35,63%. Di sisi lain proporsi belanja barang dan jasa serta belanja modal menunjukkan kenaikan yang cukup besar.

Table 4.23
Perkembangan Realisasi APBD Kota Surakarta 2015-2019

Komponen	2015		2018		2019* (hanya s.d. Semester 1)	
	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
Pendapatan Daerah	1.568.482.686.616	100,00	1.879.056.016.679	100,00	919.868.433.968	100,00
Pendapatan Asli Daerah	372.798.426.790	23,77	527.739.388.159	28,09	231.755.130.929	25,19
Hasil Pajak Daerah	233.085.404.386	14,86	339.919.952.411	18,09	142.880.144.496	15,53
Hasil Retribusi Daerah	51.234.923.568	3,27	57.024.070.534	3,03	21.846.534.826	2,37
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.584.189.359	0,48	12.258.541.140	0,65	12.716.391.915	1,38
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	80.893.909.477	5,16	118.536.824.074	6,31	54.312.059.692	5,90
Dana Perimbangan	755.728.419.465	48,18	1.090.922.293.666	58,06	579.986.530.761	63,05
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	38.677.463.465	2,47	47.513.325.057	2,53	19.313.482.300	2,10
Dana Alokasi Umum	713.300.856.000	45,48	826.587.795.000	43,99	503.726.124.000	54,76
Dana Alokasi Khusus	3.750.100.000	0,24	216.821.173.609	11,54	56.946.924.461	6,19
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	439.955.840.361	28,05	260.394.334.854	13,86	108.126.772.278	11,75
Pendapatan Hibah	-	0,00	47.510.847.623	2,53	16.823.032.850	1,83
Dana Darurat	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	129.786.943.361	8,27	155.505.351.958	8,28	66.412.090.428	7,22
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	275.572.129.000	17,57	33.250.000.000	1,77	23.381.649.000	2,54
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	0,00	24.128.135.273	1,28	1.510.000.000	0,16

Komponen	2015		2018		2019* (hanya s.d. Semester 1)	
	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
Pendapatan Lain-Lain	34.596.768.000	2,21	-	0,00	-	0,00
Belanja Daerah	1.532.527.097.064	100,00	1.914.818.594.396	100,00	683.707.817.413	100,00
Belanja Tindak Langsung	936.383.566.896	61,10	770.074.438.597	40,22	351.257.819.260	51,38
Belanja Pegawai	873.277.810.403	56,98	682.313.809.438	35,63	327.283.313.031	47,87
Belanja Bunga	543.941.049	0,04	232.995.893	0,01	77.097.361	0,01
Belanja Subsidi	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Belanja Hibah	57.298.323.252	3,74	64.500.976.050	3,37	22.618.603.500	3,31
Belanja Bantuan Sosial	4.310.500.000	0,28	20.146.134.092	1,05	1.162.600.823	0,17
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa	-	0,00	171.000.000	0,01	-	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	677.113.524	0,04	859.901.120	0,04	-	0,00
Belanja Tidak Terduga	275.878.668	0,02	1.849.622.004	0,10	116.204.545	0,02
Belanja Langsung	596.143.530.168	38,90	1.144.744.155.799	59,78	332.449.998.153	48,62
Belanja Pegawai	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Belanja Barang dan Jasa	360.313.939.466	23,51	620.973.837.646	32,43	224.310.773.097	32,81
Belanja Modal	235.829.590.702	15,39	523.770.318.153	27,35	108.139.225.056	15,82
SURPLUS/DEFISIT	35.955.589.552	2,29	- 35.762.577.717	-1,90	236.160.616.555	25,67
Pembiayaan Daerah	186.231.860.052		- 1.899.077.343		184.941.717.870	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	191.011.406.720		23.780.500		188.626.189.804	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	187.509.120.270		226.280.488.189		188.622.166.304	

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah.

Dari sisi rasio APBD, selama 2015-2019 rasio kemandirian Kota Surakarta menunjukkan peningkatan meski di tahun 2017-2018 sedikit mengalami penurunan. Rasio kemandirian merupakan rasio yang menggambarkan besarnya ketergantungan terhadap transfer dari provinsi dan pusat, seperti dana perimbangan, dana bagi hasil pajak, bantuan, dan sebagainya. Meskipun rasio ini meningkat namun nilai rasio

masih di bawah 50% sehingga ketergantungan APBD Kota Surakarta terhadap transfer dari pusat dan provinsi relative masih besar.

Rasio derajat desentralisasi fiskal terlihat juga kecil karena rasio ini juga dipengaruhi oleh rasio kemandirian. Derajat desentralisasi fiskal merupakan rasio antara PAD dengan penerimaan daerah. Rasio ini sempat sedikit mengalami penurunan di tahun 2018. Sementara itu rasio belanja modal juga menunjukkan kenaikan secara konsisten selama 2015-2018. Rasio ini merupakan rasio antara belanja modal terhadap total belanja. Semakin besar belanja modal, diharapkan belanja untuk barang public semakin meningkat.

Tabel 4.24
Rasio APBD Kota Surakarta Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019* (hanya s.d. Semester 1)
Rasio Kemandirian (%)	32,11	33,83	41,42	40,48	34,52
Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	23,77	24,99	29,24	28,09	25,19
Rasio Belanja Modal (%)	15,39	18,30	26,56	27,35	15,82

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, diolah.

Tabel 4.25
Perbandingan Rasio APBD Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun	Kota Magelang	Kota Pekalongan	Kota Salatiga	Kota Semarang	Kota Surakarta	Kota Tegal
Rasio Kemandirian (%)	2015	31,39	24,23	28,62	58,38	32,11	42,11
	2018	39,08	25,52	31,49	79,14	40,48	40,14
	2019	36,90	14,86	35,06	68,59	34,52	40,85
Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	2015	23,89	18,78	22,25	35,90	23,77	28,67
	2018	27,52	19,80	23,48	43,01	28,09	27,86
	2019	26,36	12,94	25,96	40,68	25,19	28,10
Rasio Belanja Modal (%)	2015	19,19	19,89	15,90	22,69	15,39	21,63
	2018	25,33	16,57	24,04	27,26	27,35	12,39
	2019	13,22	5,57	6,11	14,59	15,82	1,86
Tax Ratio (%)	2015	0,97	1,31	0,91	0,93	1,04	0,89
	2018	0,99	1,45	0,97	1,05	1,12	1,06
	2019	0,42	0,59	0,37	0,23	0,44	0,46

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, diolah.

4.2. Analisis Perbandingan Aatar Wilayah di Provinsi Jawa Tengah

A. Petumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Pertumbuhan ekonomi Surakarta sepanjang 2011-2019 terlihat fluktuatif dan hal yang juga terjadi untuk provinsi Jawa Tengah, nasional, serta rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah. Untuk tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Surakarta mencapai 5,78% dan terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah, nasional, serta rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi 2019 ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan 2018 yang mencapai 5,75%. Dari sini secara umum kinerja pertumbuhan ekonomi Surakarta dapat disimpulkan sangat baik. Fluktuasi yang terjadi sepanjang periode tersebut juga terjadi di provinsi Jawa Tengah maupun nasional.

Bila dibandingkan dengan daerah lain yang sama-sama berbentuk ‘kota’ di Jawa Tengah yang terdiri dari 6 kota, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Surakarta bukanlah yang tertinggi, masih di bawah Kota Semarang dan Kota Salatiga, serta mirip dengan pertumbuhan Kota Tegal. Diantara daerah lain yang berstatus “kota”, selama 2011-2019 Surakarta belum pernah menduduki posisi teratas dalam pertumbuhan ekonomi. Struktur ekonomi dan kondisi geografis serta demografis merupakan faktor penyebab perbedaan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.26

**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Surakarta vs Provinsi Jawa Tengah vs
Indonesia Tahun 2010-2019**

No		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Surakarta	6,42	5,58	6,25	5,28	5,44	5,35	5,70	5,75	5,78
2	Provinsi Jawa Tengah	5,30	5,34	5,14	5,42	5,40	5,26	5,27	5,32	5,41
3	Indonesia	6,50	6,23	5,56	5,01	4,88	5,03	5,07	5,17	5,02
4	Rata-rata Jawa Tengah	5,60	5,08	5,42	5,06	5,43	5,43	5,40	5,43	5,37
5	Rata-rata Kota di Jawa Tengah	6,26	5,35	6,06	5,43	5,32	5,43	5,76	5,85	5,85

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia, diolah.

Tabel 4.27

**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah
Tahun 2010-2019**

No	Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kota Magelang	6,11	5,37	6,04	4,98	5,11	5,17	5,18	5,46	5,44
2	Kota Surakarta	6,42	5,58	6,25	5,28	5,44	5,32	5,33	5,75	5,78
3	Kota Salatiga	6,58	5,53	6,30	5,57	5,17	5,22	5,21	5,84	5,88
4	Kota Semarang	6,58	5,97	6,25	6,31	5,82	5,84	5,64	6,52	6,86
5	Kota Pekalongan	5,49	5,61	5,91	5,48	5,00	5,36	5,32	5,69	5,50
6	Kota Tegal	6,47	4,21	5,67	5,04	5,45	5,44	5,46	5,87	5,77
	Rata-rata Geometrik	6,26	5,35	6,06	5,43	5,32	5,39	5,35	5,85	5,85

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Dari sisi inflasi, selama 2010-2019 inflasi Surakarta juga terlihat berfluktuasi. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan mencapai titik terendah di tahun 2011 yaitu sebesar 1,93%. Inflasi tahun 2019 sebesar 2,94%, naik bila dibandingkan tahun 2018 yang besarnya 2,45%. Hal yang berbeda terjadi di tingkat provinsi dan nasional, yaitu inflasi tahun 2019 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2018. Sepanjang 2010-2019 laju inflasi Surakarta lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah dan nasional, kecuali di tahun 2013 inflasi Surakarta lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah, namun masih lebih rendah dibandingkan nasional. Fenomena fluktuasi inflasi yang terjadi di Surakarta ini memiliki pola yang sama dengan pola fluktuasi di Jawa Tengah dan nasional.

Bila dibandingkan antar daerah yang bestatus “kota” yang terdiri dari 6 kota, kinerja inflasi Surakarta juga masih yang terkecil pada tahun 2016 dan 2017. Semua daerah terlihat menunjukkan kenaikan laju inflasi dari 2016 ke 2017, namun Surakarta mampu mengendalikan laju inflasi sehingga kenaikan laju inflasi yang terjadi tidak sebesar kota lain. Inflasi Kota Surakarta pada periode 2015-2018 adalah yang terkecil dibanding kota lainnya, namun tahun 2019 inflasi Kota Surakarta mengalami kenaikan yang cukup besar menjadi 2,94% sementara di tahun 2019 tersebut semua kota justru menunjukkan penurunan. Kota Tegal memiliki inflasi yang tertinggi diantara kota lain di

ahun 2017 sedangkan di tahun 2016 Kota Pekalongan yang memiliki inflasi tertinggi.

Tabel 4.28

Perbandingan Inflasi Surakarta vs Provinsi Jawa Tengah vs Indonesia

Tahun 2010-2019

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Surakarta	6,65	1,93	2,87	8,32	8,01	2,56	2,15	3,10	2,45	2,94
2	Provinsi Jawa Tengah	6,88	2,68	4,24	7,99	8,22	2,73	2,36	3,71	2,82	2,81
3	Indonesia	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72
4	Rata-rata Jawa Tengah	6,88	2,96	3,48	7,99	7,94	2,94	2,49	3,50	2,78	n.a.

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Tabel 4.29

Perbandingan Inflasi Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah Tahun 2010-2019

No	Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kota Magelang	6,8	4,15	6,05	7,79	7,92	2,7	2,25	3,9	2,65	2,19
2	Kota Surakarta	6,65	1,93	2,87	8,32	8,01	2,56	2,15	3,1	2,45	2,94
3	Kota Salatiga	6,65	2,84	4,12	7,67	7,84	2,61	2,19	3,5	2,47	
4	Kota Semarang	7,11	2,87	0,41	8,19	8,53	2,56	2,32	3,64	2,76	2,29
5	Kota Pekalongan	6,77	2,45	3,55	7,4	7,82	3,46	2,94	3,61	2,92	
6	Kota Tegal	6,73	2,58	0,4	5,8	7,4	3,95	2,71	4,03	3,08	2,56

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Inflasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat. Beberapa studi yang pernah dilakukan menunjukkan adanya hubungan kausalitas diantara keduanya, artinya inflasi dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada laju inflasi. Hal ini perlu dicermati faktor penyebabnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun diikuti oleh laju inflasi yang tinggi mengindikasikan terjadinya *overheating economy*. Kondisi ideal yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan inflasi yang rendah.

B. Kemiskinan dan Ketimpangan

Tingkat kemiskinan di Surakarta selama 2010-2019 terlihat memiliki tren yang terus menurun. Sepanjang periode tersebut tingkat kemiskinan di Surakarta selalu lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah maupun rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah. Bila dibandingkan dengan tingkat nasional dan provinsi Jawa Tengah, tingkat kemiskinan di Surakarta pada tahun 2019 terlihat lebih yaitu sebesar 8,70%. Tingkat kemiskinan tahun 2019 ini lebih kecil dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 9,08%.

Meskipun tingkat kemiskinan Surakarta di tahun 2019 relatif kecil namun bila dibandingkan dengan daerah lain yang berstatus “kota”, tingkat kemiskinan Surakarta adalah yang tertinggi dibandingkan kota lain di Jawa Tengah. Banyak faktor yang menjadi penyebab tingginya kemiskinan di Kota Surakarta. Upaya pengurangan tingkat kemiskinan perlu dilakukan secara massif dan sistematis, bukan secara instan melalui berbagai bentuk program bantuan.

Tabel 4.30

**Perbandingan Tingkat Kemiskinan Surakarta vs Provinsi Jawa Tengah vs
Indonesia Tahun 2010-2019**

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Surakarta	13,96	12,92	12,00	11,74	10,95	10,89	10,88	10,65	9,08	8,70
2	Provinsi Jawa Tengah	16,11	16,21	14,98	14,44	13,58	13,58	13,27	13,01	11,32	10,80
3	Indonesia	13,90	12,36	11,66	14,47	10,96	11,13	10,70	10,12	9,66	9,22
4	Rata-rata Jawa Tengah	14,66	14,78	13,67	13,11	12,32	12,30	12,02	11,77	10,30	9,86
5	Rata-rata Kota di Jawa Tengah	9,23	9,39	8,68	8,10	7,68	7,58	7,35	7,14	6,50	6,27

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia, diolah.

Tabel 4.31
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah
Tahun 2010-2019

No	Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kota Magelang	10,51	11,06	10,31	9,8	9,14	9,05	8,79	8,75	7,87	7,46
2	Kota Surakarta	13,96	12,9	12	11,74	10,95	10,89	10,88	10,65	9,08	8,7
3	Kota Salatiga	8,28	7,8	7,11	6,4	5,93	5,8	5,24	5,07	4,84	4,76
4	Kota Semarang	5,12	5,68	5,13	5,25	5,04	4,97	4,85	4,62	4,14	3,98
5	Kota Pekalongan	9,36	10,04	9,47	8,26	8,02	8,09	7,92	7,47	6,75	6,6
6	Kota Tegal	10,62	10,81	10,04	8,84	8,54	8,26	8,2	8,11	7,81	7,47

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Dalam kemiskinan, terdapat dua ukuran yang dipergunakan, yaitu tingkat kedalaman dan tingkat keparahan. Dalam hal tingkat kedalaman kemiskinan, pada tahun 2019 Kota Surakarta memiliki indeks P1 sebesar 1,6. Nilai indeks P1 ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang besarnya 1,47. Hal ini berarti pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Untuk indeks P2, pada tahun 2019 nilai indeks P2 Kota Surakarta adalah 0,48. Angka ini meningkat cukup tajam bila dibandingkan tahun 2018 yang besarnya 0,35.

Bila dibandingkan dengan kota lain di Jawa Tengah, kondisi Surakarta untuk P1 dan P2 masih yang tertinggi pada tahun 2019. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius mengingat P1 menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk terhadap garis kemiskinan. Dengan nilai P1 sebesar itu, berarti pengeluaran penduduk miskin di Surakarta adalah yang terjauh dari garis emiskinan dibandingkan kota lain. Untuk P2, pengeluaran diantara penduduk miskin di Surakarta adalah yang paling timpang dibandingkan dengan kota lain di Jawa Tengah.

Tabel 4.32**Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2010-2019**

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Magelang	1.61	1.61	1.48	1.45	0.94	1.39	1.2	1.3	1.07	0,99
Kota Surakarta	2.19	1.89	1.33	1.63	1.48	1.74	1.34	1.87	1.47	1,6
Kota Salatiga	0.94	1.3	0.77	0.94	0.87	1.07	0.6	0.85	0.69	0,83
Kota Semarang	0.89	0.71	0.8	0.65	0.47	0.5	0.76	0.54	0.58	0,57
Kota Pekalongan	1.11	1.37	1.09	0.93	1.14	0.83	0.8	0.92	1.01	0,92
Kota Tegal	1.72	1.89	0.95	0.94	1.38	1.34	1.04	1.42	1.23	1,15
Provinsi Jawa Tengah	2.62	2.58	2.39	2.37	2.09	2.44	2.37	2.21	1.85	1,53
Rata-rata seluruh Jateng	2.26	2.24	1.89	1.84	1.7	1.98	1.88	1.77	1.57	1,23

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Tabel 4.33**Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2010-2019**

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Magelang	0.39	0.36	0.33	0.37	0.2	0.31	0.23	0.32	0.21	0,19
Kota Surakarta	0.53	0.46	0.28	0.34	0.3	0.4	0.35	0.44	0.35	0,48
Kota Salatiga	0.16	0.33	0.13	0.18	0.21	0.26	0.11	0.21	0.13	0,2
Kota Semarang	0.25	0.18	0.19	0.13	0.08	0.09	0.18	0.12	0.12	0,12
Kota Pekalongan	0.19	0.32	0.19	0.16	0.26	0.15	0.13	0.2	0.22	0,18
Kota Tegal	0.44	0.51	0.15	0.18	0.38	0.35	0.21	0.38	0.3	0,24
Provinsi Jawa Tengah	0.68	0.66	0.57	0.59	0.51	0.65	0.63	0.57	0.45	0,30
Rata-rata seluruh Jateng	0.55	0.53	0.41	0.4	0.38	0.49	0.46	0.42	0.36	0,23

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Besar kecilnya tingkat kemiskinan juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan perbandingan jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk, sementara penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang pengeluaran perkapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Tahun 2019 garis kemiskinan Kota Surakarta adalah Rp473.516. Angka ini sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 yang besarnya Rp464.063. Nilai ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan garis kemiskinan provinsi Jawa Tengah maupun nasional.

Dibandingkan dengan 6 kota lain di Jawa Tengah, garis kemiskinan Surakarta pada tahun 2019 masih di bawah Kota Magelang dan Semarang. Garis kemiskinan Surakarta juga memiliki rata-rata kenaikan per tahun yang terendah diantara 6 kota di Jawa Tengah selama periode 2010-2019.

Tabel 4.34**Perbandingan Garis Kemiskinan Surakarta vs Provinsi Jawa Tengah vs Indonesia Tahun 2010-2019**

No		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Surakarta	306.584	326.233	361.517	371.918	385.467	406.840	430.293	448.062	464.063	473.516
2	Provinsi Jawa Tengah	217.327	217.440	233.769	261.881	281.570	297.851	317.348	333.224	350.875	369.385
3	Indonesia	211.726	233.740	259.520	275.779	326.853	356.378	372.114	400.995	425.770	440.000
4	Rata-rata Jawa Tengah	221.193	240.319	259.367	280.661	294.014	305.552	327.561	340.931	357.719	378.302
5	Rata-rata Kota di Jawa Tengah	262.611	280.974	308.343	340.116	359.113	373.717	392.337	411.769	436.612	456.459

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Tabel 4.35

Perbandingan Garis Kemiskinan Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah
Tahun 2010-2019

No	Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan 2010-2019
1	Kota Magelang	258.921	280.877	313.250	350.554	376.143	405.228	425.191	450.908	476.582	481.282	8,06
2	Kota Surakarta	306.584	326.233	361.517	403.121	417.807	406.840	430.293	448.062	464.063	473.516	5,58
3	Kota Salatiga	241.223	254.726	277.039	302.884	320.204	337.511	345.146	359.944	380.856	418.955	7,14
4	Kota Semarang	246.195	272.996	297.848	328.271	348.824	368.477	382.160	402.297	427.511	474.930	8,56
5	Kota Pekalongan	251.952	270.663	294.586	322.313	338.398	352.717	375.600	390.555	415.172	425.026	6,75
6	Kota Tegal	270.788	280.349	305.818	333.553	353.301	371.528	395.631	418.845	455.488	465.047	6,99

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Pada Tabel 4.37, di dalam permasalahan ketimpangan yang diukur dengan indeks Gini, nilai indeks Gini Kota Surakarta tersebut masuk dalam peringkat 32 dari 35 daerah di Jawa Tengah. Dari sisi rata-rata pertumbuhan tiap tahun, nilai indeks Gini Kota Surakarta memiliki rata-rata pertumbuhan per tahun selama 2010-2015 sebesar 1,69%. Meski angka rata-rata pertumbuhan ini tergolong kecil secara relatif (dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah), namun secara absolute termasuk tinggi.

Tabel 4.36
Perbandingan Indeks Gini Surakarta vs Provinsi Jawa Tengah vs Indonesia
Tahun 2010-2019

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Surakarta	0,340	0,330	0,370	0,350	0,360	0,360	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2	Provinsi Jawa Tengah	0.341	0.357	0.383	0.390	0.388	0.382	0,357	0,365	0,357	0,361
3	Indonesia	0.378	0.388	0.413	0.406	0.414	0.402	0.394	0.391	0.384	0.382
4	Rata-rata Jawa Tengah	0,264	0,325	0,338	0,332	0,331	0,331	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5	Rata-rata Kota di Jawa Tengah	0,304	0,331	0,350	0,340	0,338	0,338	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Data indeks Gini untuk tingkat kabupaten/kota secara resmi hanya tersedia hingga tahun 2015. Nilai indeks Gini Surakarta ini lebih tinggi dari rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah, indeks Gini provinsi, serta indeks Gini nasional. Bila dibandingkan antar 6 kota di Jawa Tengah, nilai indeks Gini Surakarta tergolong yang tertinggi. Meski di tahun 2015 nilai indeks Gini Surakarta sama dengan Kota Magelang, namun rata-rata indeks Gini Surakarta selama 2010-2015 lebih tinggi dibandingkan Kota Magelang.

Tabel 4.37
Perbandingan Indeks Gini Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah

No	Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata 2010-2015	Rata-rata Pertumbuhan 2010-2015
1	Kota Magelang	0.31	0.34	0.37	0.33	0.36	0.36	0.344	3.04
2	Kota Surakarta	0.34	0.33	0.37	0.35	0.36	0.36	0.351	1.15
3	Kota Salatiga	0.35	0.34	0.35	0.37	0.35	0.35	0.352	0.00
4	Kota Semarang	0.32	0.35	0.35	0.35	0.31	0.31	0.331	-0.63
5	Kota Pekalongan	0.28	0.31	0.33	0.32	0.34	0.34	0.319	3.96
6	Kota Tegal	0.24	0.32	0.33	0.32	0.31	0.31	0.303	5.25

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

C. Tingkat Pengangguran

Permasalahan pengangguran merupakan permasalahan yang saat ini menjadi perhatian khusus pemerintah termasuk pemerintah daerah. Pengangguran akan mendorong timbulnya permasalahan sosial lainnya. Oleh karena itu kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang ditempuh harus diarahkan pada upaya pengurangan tingkat pengangguran. Kenaikan jumlah pengangguran yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja akan mendorong peningkatan tingkat pengangguran, namun bila kenaikan jumlah angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan kenaikan jumlah pengangguran, maka tingkat pengangguran akan turun.

Tingkat pengangguran di Surakarta pada tahun 2019 mencapai 4,18%, turun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 4,39%. Jumlah ini tergolong kecil bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran di provinsi Jawa Tengah yang besarnya 4,49% dan nasional yang besarnya 5,28%. Selama periode pelaksanaan RPJMD, Kota Surakarta berhasil menurunkan tingkat pengangguran.

Diantara 6 kota lain di Jawa Tengah, tingkat pengangguran Surakarta tahun juga 2019 adalah yang terkecil dibandingkan dengan kota lain. Kota Tegal dan Salatiga mengalami kenaikan tingkat pengangguran pada tahun 2019 dibandingkan 2018.

Tabel 4.38
Perbandingan Tingkat Pengangguran Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah
Tahun 2010-2019

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Surakarta	8,73	7,70	6,29	7,22	6,16	4,53	7,55	4,47	4,39	4,18
2	Provinsi Jawa Tengah	6,21	7,07	5,61	6,01	5,68	4,99	4,63	4,57	4,51	4,49
3	Indonesia	7,14	7,48	6,13	6,17	5,94	6,18	5,61	5,50	5,34	5,28
4	Rata-rata Jawa Tengah	5,96	6,81	5,48	5,85	5,42	4,65	n.a.	4,26	4,16	4,22
5	Rata-rata Kota di Jawa Tengah	6,48	7,12	5,75	6,01	5,63	4,97	n.a.	4,54	4,48	4,44

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Tabel 4.39
Perbandingan Tingkat Pengangguran Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah
Tahun 2010-2019

No	Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019
1	Kota Magelang	13,28	11,51	8,99	6,75	7,38	6,43	6,68	4,88	4,43
2	Kota Surakarta	8,73	7,7	6,29	7,22	6,16	4,53	4,47	4,39	4,18
3	Kota Salatiga	10,22	9,02	6,84	6,21	4,46	6,43	3,96	4,28	4,43
4	Kota Semarang	8,98	7,65	6,01	6,02	7,76	5,77	6,61	5,29	4,54
5	Kota Pekalongan	7	8,06	7,67	5,28	5,42	4,1	5,05	6,13	5,77
6	Kota Tegal	14,22	9,77	8,75	9,32	9,2	8,06	8,19	7,94	8,07

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

D. Indikator Sosial dan Kesejahteraan

Salah satu indikator sosial dan kesejahteraan adalah indikator yang merupakan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi angka harapan hidup (AHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), serta pengeluaran perkapita. Berdasarkan indikator tersebut, Surakarta memiliki nilai tertinggi untuk keempat komponen IPM bila dibandingkan dengan rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah, provinsi Jawa Tengah, maupun nasional. Tren Surakarta untuk keempat indikator tersebut selalu naik sepanjang 2010-2019. Hal ini menunjukkan gambaran keberhasilan upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam pembangunan Kota Surakarta.

Tabel 4.40**Komponen IPM Kota Surakarta vs Provinsi vs Nasional Tahun 2010-2019****Angka Harapan Hidup (AHH)**

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Surakarta	72,16	72,25	72,35	76,97	76,99	77,00	77,03	77,06	77,11	77,12
2	Provinsi Jawa Tengah	72,73	72,91	73,09	73,28	73,88	73,96	74,02	74,08	74,18	74,23
3	Indonesia	69,81	70,01	70,20	70,40	70,59	70,78	70,90	71,06	71,2	71,34
4	Rata-rata Jawa Tengah	74,17	74,24	74,30	74,37	74,41	74,50	74,56	74,63	74,69	74,78

Harapan Lama Sekolah

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Surakarta	13,17	13,34	13,5	13,64	13,92	14,14	14,5	14,51	14,52	14,55
2	Provinsi Jawa Tengah	11,09	11,18	11,39	11,89	12,17	12,38	12,45	12,57	12,63	12,68
3	Indonesia	11,29	11,44	11,68	12,10	12,39	12,55	12,72	12,85	12,91	12,95
4	Rata-rata Jawa Tengah	11,21	11,41	11,63	11,90	12,19	12,46	12,59	12,72	12,74	12,85

Rata-rata Lama Sekolah

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Surakarta	9,99	10,05	10,11	10,25	10,33	10,36	10,37	10,38	10,53	10,54
2	Provinsi Jawa Tengah	6,71	6,74	6,77	6,80	6,93	7,03	7,15	7,27	7,35	7,53
3	Indonesia	7,46	7,52	7,59	7,61	7,73	7,84	7,95	8,10	8,17	8,34
4	Rata-rata Jawa Tengah	6,74	6,85	6,96	7,11	7,24	7,37	7,45	7,58	7,57	7,76

Pengeluaran per kapita (Rp ribuan)

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Surakarta	12.123	12.464	12.680	12.820	12.907	12.604	13.900	13.986	14.528	15.049
2	Provinsi Jawa Tengah	8.992	9.296	9.497	9.618	9.640	9.930	10.153	10.377	10.777	11.102
3	Indonesia	9.437	9.647	9.815	9.858	9.903	10.150	10.420	10.664	11.059	11.299
4	Rata-rata Jawa Tengah	9.012	9.296	9.497	9.618	9.655	9.938	10.181	10.414	10.837	11.217

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia, diolah.

Bila diperbandingkan antar 6 kota di Jawa Tengah, untuk AHH tahun 2019 tertinggi adalah Kota Semarang sedangkan Surakarta menempati urutan ke 3 di bawah Salatiga. Untuk indikator HLS, posisi Surakarta pada tahun 2019 juga di bawah Kota Semarang dan Salatiga sedangkan dalam hal

pengeluaran perkapita, Surakarta juga di bawah Salatiga dan Kota Semarang.

Untuk RLS Surakarta memiliki posisi teratas diantara 6 kota tersebut.

Tabel 4.41
Perbandingan Komponen IPM Antar Kota di Jawa Tengah
Tahun 2010-2019

Angka Harapan Hidup

No	Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kota Magelang	76,39	76,44	76,49	76,54	76,57	76,58	76,62	76,66	76,72	76,75
2	Kota Surakarta	76,85	76,89	76,93	76,97	76,99	77	77,03	77,06	77,11	77,12
3	Kota Salatiga	76,48	76,5	76,52	76,53	76,53	76,83	76,87	76,98	77,11	77,22
4	Kota Semarang	77,17	77,17	77,18	77,18	77,18	77,2	77,21	77,21	77,23	77,25
5	Kota Pekalongan	73,91	73,96	74,01	74,06	74,09	74,11	74,15	74,19	74,25	74,28
6	Kota Tegal	73,83	73,91	73,98	74,06	74,1	74,12	74,18	74,23	74,3	74,34

Harapan Lama Sekolah

No	Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kota Magelang	12,22	12,33	12,49	12,65	12,98	13,1	13,55	13,79	13,8	13,81
2	Kota Surakarta	13,17	13,34	13,5	13,64	13,92	14,14	14,5	14,51	14,52	14,55
3	Kota Salatiga	14,56	14,59	14,6	14,61	14,95	14,97	14,98	14,99	15	15,34
4	Kota Semarang	13,12	13,26	13,37	13,66	13,97	14,33	14,7	15,2	15,5	15,51
5	Kota Pekalongan	10,96	11,05	11,13	11,56	11,93	12,59	12,77	12,78	12,79	12,83
6	Kota Tegal	11,15	11,24	11,33	11,61	11,96	12,46	12,88	12,89	12,9	13,04

Rata-rata Lama Sekolah

No	Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kota Magelang	10,08	10,14	10,2	10,22	10,27	10,28	10,29	10,3	10,31	10,33
2	Kota Surakarta	9,99	10,05	10,11	10,25	10,33	10,36	10,37	10,38	10,53	10,54
3	Kota Salatiga	8,86	8,97	9,09	9,2	9,37	9,81	9,82	10,15	10,4	10,41
4	Kota Semarang	9,61	9,8	9,92	10,06	10,19	10,2	10,49	10,5	10,51	10,52
5	Kota Pekalongan	7,6	7,72	7,8	7,96	8,12	8,28	8,29	8,56	8,57	8,71
6	Kota Tegal	7,46	7,66	7,85	8,05	8,26	8,27	8,28	8,29	8,3	8,31

Pengeluaran Perkapita (Rp ribu)

No	Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kota Magelang	9.681	9.922	10.169	10.258	10.344	10.793	11.090	11.525	11.994	12.514
2	Kota Surakarta	12.123	12.464	12.680	12.820	12.907	13.604	13.900	13.986	14.528	15.049
3	Kota Salatiga	13.411	13.727	13.966	14.125	14.205	14.600	14.811	14.921	15.464	15.944
4	Kota Semarang	11.987	12.271	12.488	12.714	12.802	13.589	13.909	14.334	14.895	15.550
5	Kota Pekalongan	10.224	10.560	10.756	10.922	11.006	11.253	11.721	11.800	12.312	12.680
6	Kota Tegal	10.644	10.965	11.251	11.416	11.519	11.748	11.849	12.283	12.830	13.250

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia, diolah.

Apabila keempat indikator di atas digabung sebagai indeks komposit, maka akan dapat ditentukan IPM. Surakarta pada tahun 2019 memiliki IPM 81,86, naik dibandingkan tahun 2018 yang besarnya 81,46 dan angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah maupun nasional, serta rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah. Dari perbandingan dengan 6 kota di Jawa Tengah, IPM Surakarta bukanlah yang tertinggi diantara 6 kota tersebut, namun peringkat ke 3 setelah Kota Semarang dan Salatiga. Perbedaan posisi IPM Kota Surakarta antara rata-rata Jawa Tengah dengan yang khusus kota di Jawa Tengah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan atau variasi yang cukup besar diantara daerah di Jawa Tengah.

Tabel 4.42

**Perbandingan IPM Surakarta vs Provinsi Jawa Tengah vs Indonesia Tahun
2010-2019**

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Surakarta	77,86	78,18	78,60	78,89	79,34	80,14	80,76	80,85	81,46	81,86
2	Provinsi Jawa Tengah	66,08	66,64	67,21	68,02	68,78	69,49	69,98	70,52	71,12	71,73
3	Indonesia	66,53	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92
4	Rata-rata Jawa Tengah	66,66	67,40	68,05	68,73	69,27	70,08	70,61	71,19	71,79	72,39

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia, diolah.

Tabel 4.43**Perbandingan IPM Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah Tahun 2010-2019**

No	Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kota Magelang	73,99	74,47	75	75,29	75,79	76,39	77,16	77,84	78,31	78,8
2	Kota Surakarta	77,45	78	78,44	78,89	79,34	80,14	80,76	80,85	81,46	81,86
3	Kota Salatiga	78,35	78,76	79,1	79,37	79,98	80,96	81,14	81,68	82,41	83,12
4	Kota Semarang	76,96	77,58	78,04	78,68	79,24	80,23	81,19	82,01	82,72	83,19
5	Kota Pekalongan	68,95	69,54	69,95	70,82	71,53	72,69	73,32	73,77	74,24	74,77
6	Kota Tegal	69,33	70,03	70,68	71,44	72,2	72,96	73,55	73,95	74,44	74,93

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia, diolah.

Dari sisi pendidikan, salah satu indikator penting adalah angka partisipasi kasar (APK). Angka ini menunjukkan jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu. Nilai APK Surakarta untuk jenjang SD/MI dan SMA/MA/ lebih rendah dibandingkan provinsi Jawa Tengah dan rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah pada tahun tahun 2018. Kondisi ini berbeda dengan yang terjadi tahun 2017. APK SD/MI dan SMA/MA Kota Surakarta pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup besar. APK SMP/MTs pun juga menunjukkan penurunan di tahun 2018 meski tidak sebesar SD/MI dan SMA/MA.

APK jenjang SD/MI Surakarta tahun 2017 sebesar 110,37 dan menempati posisi kedua di bawah Kota Pekalongan sedangkan untuk jenjang SMP/MTs pada tahun yang sama adalah 87,93 dan menempati posisi keempat di bawah Kota Semarang, Kota Magelang, dan Salatiga. Namun, di tahun 2018 untuk jenjang SD/MI serta SMP/MTs posisi Kota Surakarta berada di bawah rata-rata Jawa Tengah dan provinsi sementara untuk jenjang SMP/MTs

Untuk jenjang SMA/MA/ tahun 2018 nilai APK Kota Surakarta sebesar 80,85 yang menempati posisi keempat di bawah Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Magelang. Nilai APK tahun 2018 tersebut juga berada di bawah nilai APK rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah serta provinsi. Pendidikan jenjang SMA dan SMK saat tidak lagi dibawah pemerintah kota atau kabupaten, namun langsung di bawah provinsi.

Kinerja pendidikan Kota Surakarta di tahun 2018 khususnya yang berkaitan dengan APK, berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah terlihat mengalami penurunan dibanding tahun 2017. Penurunan paling besar terjadi

paa APK SMA/MA dan hal ini menggambarkan bahwa dari jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA cukup banyak yang tidak atau belum bersekolah.

Tabel 4.44
Perbandingan APK Antar Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2018

SD/MI	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kota Magelang	105,63	101,74	101,02	105,40	114,04	105,00	105,22	105,98	103,64
Kota Surakarta	113,40	99,49	107,97	104,02	105,47	103,60	109,80	110,37	106,56
Kota Salatiga	113,51	107,10	105,79	98,31	106,11	100,26	110,67	103,44	107,88
Kota Semarang	112,54	99,86	100,56	101,82	102,97	100,54	101,01	105,85	105,45
Kota Pekalongan	117,30	98,43	112,57	109,49	103,39	110,17	116,78	114,47	110,86
Kota Tegal	128,08	100,60	96,08	106,28	110,36	109,03	113,48	108,44	112,4
Provinsi Jawa Tengah	113,19	102,70	104,79	108,86	110,18	110,36	109,46	108,44	108,18
Rata-rata Jawa Tengah	113,63	102,25	104,78	108,32	110,09	109,94	109,93	108,29	108,05
SMP/MTs	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kota Magelang	94,35	99,99	91,25	80,67	94,08	88,68	88,58	92,70	95,52
Kota Surakarta	82,14	91,45	98,82	95,25	93,31	89,88	84,81	87,93	84,55
Kota Salatiga	91,11	92,27	110,83	97,94	100,73	99,74	84,60	90,55	74,7
Kota Semarang	86,61	95,16	96,93	112,67	109,28	97,12	102,05	98,85	92,4
Kota Pekalongan	86,20	96,19	85,76	95,21	92,07	104,32	79,95	82,97	74,54
Kota Tegal	78,05	86,54	94,53	91,99	88,13	87,39	70,93	80,79	80,45
Provinsi Jawa Tengah	80,60	92,65	91,57	87,49	89,40	91,40	89,96	91,09	91,96
Rata-rata Jawa Tengah	81,50	92,81	92,13	87,56	89,70	91,20	88,47	90,87	91,65
SMA/MA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kota Magelang	80,51	77,55	74,91	85,59	92,16	90,76	142,19	107,24	91,97
Kota Surakarta	92,17	90,77	65,40	65,10	71,25	100,93	110,64	103,55	80,85
Kota Salatiga	84,43	76,32	71,01	78,23	82,75	83,34	110,35	109,61	120,18
Kota Semarang	83,01	77,81	78,90	65,16	67,39	91,34	95,68	107,82	103,54
Kota Pekalongan	47,00	52,58	54,02	44,11	62,45	81,68	119,17	92,04	74,41
Kota Tegal	66,95	71,33	69,65	65,84	85,77	113,61	103,57	87,08	79,7
Provinsi Jawa Tengah	61,61	64,04	66,90	63,90	73,55	82,15	86,27	84,35	84,15
Rata-rata Jawa Tengah	61,35	64,27	65,30	62,66	73,33	82,92	89,15	84,32	84,14

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Indikator sosial dan kesejahteraan yang juga memerlukan perhatian adalah indeks pembangunan gender (IPG) serta indeks pemberdayaan gender (IGD). IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender sedangkan IDG indeks yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Meskipun smooth, nilai IPG dan IDG Surakarta menunjukkan tren yang meningkat. Nilai IPG Surakarta sepanjang 2010-2019 selalu di atas provinsi Jawa

Tengah dan nasional. Untuk IDG, nilai untuk Surakarta cenderung berfluktuatif. Nilai IDG tahun 2018 adalah 77,10, sedikit menurun dibandingkan tahun 2017 yang besarnya 77,25. Bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang besarnya 79,32 terjadi penurunan yang cukup besar. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di provinsi maupun nasional, yang IDG nya selalu naik sepanjang tahun. Rata-rata IDG seluruh daerah di Jawa Tengah pun juga selalu mengalami kenaikan sepanjang periode pengamatan.

Tabel 4.45

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

IPG (Indeks Pembangunan Gender)

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Surakarta	95,28	95,32	95,70	96,16	96,48	96,38	96,38	96,74	96,82	96,72
2	Provinsi Jawa Tengah	90,32	90,92	91,12	91,50	91,89	92,21	92,22	91,94	91,95	91,89
3	Indonesia	89,42	89,52	90,07	90,19	90,34	91,03	90,82	90,96	90,99	91,07

IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Surakarta			79,32	78,93	74,93	74,98	n.a.	77,25	77,10
2	Provinsi Jawa Tengah	67,96	68,99	70,82	71,22	74,46	74,80	74,89	75,10	74,03
3	Indonesia	68,15	69,14	70,07	70,46	70,68	70,83	71,39	71,74	72,10

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

4.3. Analisis Capaian Kinerja Indikator Utama RPJMD

Capaian kinerja indikator RPJMD ini didasarkan pada target dan realisasi sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Surakarta 2016-2021. Dalam analisis ini terdapat beberapa kendala: (1) realisasi RPJMD pada 2017-2019 sulit diidentifikasi karena adanya ketidaksamaan indikator RPKD 2017-2019 dengan dokumen RPJMD sehingga sulit untuk diperbandingkan, (2) nama dan jumlah program pada pelaksanaan RPJMD 2017-2019 (RKPD 2017-2019) tidak sama dengan dokumen RPJMD 2016-2021 Kota Surakarta.

Berdasarkan kendala tersebut, analisis indikator capaian kinerja RPJMD hanya memberikan gambaran umum serta gambaran model evaluasi tentang indikator penting berupa indikator utama makroekonomi, serta indikator yang dikaitkan dengan pernyataan misi sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Surakarta. Hasil perhitungan sangat dipengaruhi oleh kelengkapan dan ketersediaan data.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kinerja makroekonomi Kota Surakarta secara internal selama 2016-2019 menunjukkan kecenderungan penurunan. Penurunan.

Tabel 4.46
Evaluasi Capaian Kinerja Perekonomian Kota Surakarta Tahun 2019

No	Indikator	Target				Realisasi				Capaian Indikator			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Pertumbuhan ekonomi/PDRB	5 + 1	5 + 1	6 + 1	6 + 1	5,32	5,33	5,38	5,78	100,00	100,00	100,00	100
2	Tingkat inflasi	3 + 1	4 + 1	3 + 1	3 + 1	2,15	3,10	2,45	2,94	100,00	100,00	100,00	100
3	Indeks Gini	0,332	0,321	0,320	0,305	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,64	8,99	8,34	7,68	10,88	10,65	9,08	8,70	87,10	81,54	91,13	86,72
5	Angka Harapan Hidup (tahun)	77,08	77,11	77,16	77,19	77,03	77,06	77,11	77,12	99,94	99,94	99,94	99,91
6	Rata-rata lama sekolah (tahun)	10,44	10,51	10,59	10,67	10,37	10,38	10,53	10,54	99,33	98,76	99,43	98,78
7	Harapan lama sekolah (tahun)	14,34	14,53	14,73	14,94	14,5	14,51	14,52	14,55	101,12	99,86	98,57	97,39
8	Pengeluaran per kapita (Rupiah)	14.291.000	14.806.000	15.301.000	15.776.000	13.900.000	13.986.000	14.528.000	15.049.000	97,26	94,46	94,95	95,39
9	Pendapatan per kapita (Rupiah)	58.142.285	60.922.566	63.823.146	66.534.166	58.299.424	61.393.834	64.697.940	68.214.142	100,27	100,77	101,37	102,52
10	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	97,08	97,37	97,67	97,98	96,38	96,74	96,82	96,72	99,28	99,35	99,13	98,71
11	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	5,83	5,76	5,68	5,61	4,50	4,47	4,39	4,18	122,81	122,40	122,71	125,49
								Rata-rata		100,39	99,28	100,44	100,10
12	Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
	a. APK PAUD	57,30	61,84	66,38	70,92	88,77	91,3	86,5	59,02	154,92	147,64	130,31	83,22
	b. APK SD/MI/Paket A	105,00	105,00	105,00	105,00	106,90	106,93	103,86	102,26	101,81	101,84	98,91	97,39
	c. APK SMP/MTs/Paket B	99,98	103,32	106,65	105,00	101,01	100,07	98,91	99,62	101,03	96,85	92,74	94,88
	d. APM SD/MI/Paket A	97,82	98,26	98,69	99,13	95,56	95,60	93,02	93,76	97,69	97,29	94,25	94,58
	e. APM SMP/MTs/Paket B	88,50	90,80	93,10	95,40	76,75	77,36	74,82	82,21	86,72	85,20	80,37	86,17
								Rata-rata		106,19	103,84	91,30	93,16
								TOTAL		103,25	101,53	95,76	96,56

Sumber: Data diolah.

Tabel 4.47
Proyeksi Sebelum dan Sesudah Covid-19

No	Indikator	Sebelum Covid-19 2020	Sesudah Covid-19 2020
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,56	4,25
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,77-6,17	(1,28) - 1,45
3	PDRB (Harga konstan Adjusted)	37.445-37.630	34,807 - 35,771
4	Jumlah Penduduk	566.632	568.094
5	Gini Ratio	0,3277-0,3536	0,3536-0,388
6	Jumlah penduduk miskin (ribuan)	39,78-45,44	49,82 – 51,47
7	Persentase penduduk miskin	7,02-8,02	8,77 – 9,06
8	Inflasi (%)	2,49 +-1	2,49 +-1
9	PDRB perkapita (ADHK) Rp	65.771.495,30- 66.773.682,40	61269789.86- 62966692.13
10	IPM	82,78	82,78
11	Angka Harapan Hidup	77,16	77,16

Sumber: Data diolah.

Proyeksi indikator perekonomian Kota Surakarta dilakukan dengan pendekatan *simple regression* PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk mendapatkan nilai Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Konstan, Jumlah Penduduk Miskin, dan PDRB per Kapita. Indikator tingkat pengangguran terbuka sebelum Covid-19 adalah 3,56 dan meningkat menjadi 4,25 sesudah Covid-19. Indikator pertumbuhan ekonomi sebelum Covid-19 adalah 5,77-6,17 dan menurun menjadi (-1,28)-1,45 sesudah Covid-19. Indikator PDRB (harga konstan) sebelum Covid-19 adalah 37.445-37.630 dan menurun menjadi 34.807-35.771 sesudah Covid-19. Indikator jumlah penduduk sebelum Covid-19 adalah 566.632 dan meningkat menjadi 568.094 sesudah Covid-19. Indikator gini ratio sebelum Covid-19 adalah 0,3277-0,3536 dan meningkat menjadi 0,3536-0,388 sesudah Covid-19. Indikator jumlah penduduk miskin sebelum Covid-19 adalah 39,78-45,44 dan meningkat menjadi 49,82-51,47 sesudah Covid-19. Indikator persentase penduduk miskin sebelum Covid-19 adalah 7,02-8,02 dan meningkat menjadi 8,77-9,06 sesudah Covid-19. Indikator inflasi sebelum Covid-19 adalah 2,49 +- dan tetap 2,49 +- sesudah Covid-19. Indikator PDRB perkapita (ADHK) sebelum Covid-19 adalah 65.771.495,30-66.773.682,40 dan menurun menjadi 61.269.789,86- 62.966.692,13 sesudah Covid-19. Indikator indeks pembangunan manusia (IPM) sebelum Covid-19 adalah 82,78 dan tetap 82,78 sesudah Covid-19. Indikator angka harapan hidup (AHH) sebelum Covid-19 adalah 77,16 dan tetap 77,16 sesudah Covid-19.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

1. Secara umum, kinerja perekonomian Kota Surakarta bila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah cukup bagus. Beberapa indikator perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, pengeluaran perkapita riil, garis kemiskinan dan tingkat kemiskinan, serta tingkat pengangguran, menunjukkan kinerja perekonomian Kota Surakarta masuk dalam peringkat atas.
2. Permasalahan perekonomian Kota Surakarta adalah angka ketimpangan distribusi pendapatan yang menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini terlihat dari nilai indeks Gini maupun pengukuran menggunakan indeks Williamson. Meskipun beberapa kasus menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta memiliki relevansi dengan tingkat ketimpangan, namun hal ini tidak terjadi di Kota Surakarta berdasarkan pengukuran nilai koefisien korelasi. Dengan demikian, permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Surakarta tidak berkorelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi, namun oleh faktor lain.
3. Korelasi antara nilai indeks Williamson dengan indeks Theil di masing-masing kecamatan menunjukkan adanya korelasi negative dengan nilai yang sangat kecil sehingga permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di masing-masing kecamatan tidak berkaitan dengan konsentrasi kemiskinan sehingga ketimpangan dan konsentrasi kemiskinan merupakan dua permasalahan yang berbeda. Hal ini dapat dijadikan referensi dalam penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan perekonomian Kota Surakarta

5.2. REKOMENDASI

Kebijakan pengentasan kemiskinan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu kebijakan tidak langsung, dan kebijakan yang langsung. Kebijakan tak langsung meliputi (1) upaya menciptakan ketentraman dan kestabilan situasi ekonomi, sosial dan politik; (2) mengendalikan jumlah penduduk; (3) melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat miskin

melalui kegiatan pelatihan. Sedangkan kebijakan yang langsung mencakup: (1) pengembangan data dasar (base data) dalam penentuan kelompok sasaran (targeting); (2) penyediaan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan); (3) penciptaan kesempatan kerja; (4) program pembangunan wilayah; dan (5) pelayanan perkreditan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2019). *Surakarta Dalam Angka*. Diakses dari <https://surakartakota.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2019). *Jawa Tengah Dalam Angka*. Diakses dari <https://jateng.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik. (2019). *Indonesia Dalam Angka*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/>

LAMPIRAN

Tabel Ringkasan
Laporan Evaluasi Kinerja Perekonomian Kota Surakarta 2020

No	Aspek	Uraian
1.	Pertumbuhan Ekonomi	PDRB Surakarta ditopang 50 persen dari kontribusi sektor konstruksi sebesar 27,11%, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 22,16%, serta sektor informasi dan komunikasi sebesar 12,01%. Sektor yang memiliki kenaikan terbesar adaah sektor informasi dan komunikasi yang mengalami kenaikan sebesar 46,09% dan yang kedua adalah sektor jasa perusahaan sebesar 34,52%.
2.	PDRB per kapita	Kota Surakarta memiliki PDRB perkapita riil lebih tinggi daripada PDRB per kapita seluruh daerah di Jawa Tengah atau tingkat nasional. Tingginya PDRB perkapita riil Surakarta ini disebabkan karena Surakarta mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk namun tetap mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rata-rata pertumbuhan penduduk Surakarta per tahun selama 2010-2019 hanya sebesar 0,42% sementara untuk provinsi Jawa Tengah adalah 0,76% dan di tingkat nasional adalah 1,26%.
3.	Inflasi	Inflasi tahun 2019 tercatat sebesar 2,94% dan angka ini naik bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang besarnya 2,45%. Namun secara umum tingkat inflasi ini masih terkendali dan masih dalam taraf rendah.
4.	Kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat kemiskinan Surakarta selama 2010-2019 terlihat menunjukkan tren penurunan dari 13,96% di tahun 2010 menjadi 9,08% di tahun 2018 dan di tahun 2019 tingkat kemiskinan kembali turun 8,70%. Dalam hal tingkat kedalaman kemiskinan, pada tahun 2019 Kota Surakarta memiliki nilai indeks kedalaman kemiskinan atau P1 sebesar 1,60 sedangkan nilai indeks keparahan kemiskinan atau P2 sebesar 0,48. Penurunan tingkat kemiskinan belum diikuti oleh P1 dan P2. Nilai proyeksi Indeks Gini Kota Surakarta masih lebih rendah dibandingkan dengan indeks Gini Provinsi Jawa Tengah dan nasional

No	Aspek	Uraian
5.	Ketenagakerjaan	Sebagian besar penduduk (28,64%) bekerja di sektor perdagangan dan di sektor industri pengolahan (22,15%). Pengangguran didominasi oleh lulusan SMA dan SMK Terdapat korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran
6.	ICOR	Bila diperbandingkan dengan ICOR Jawa Tengah dan Nasional, nilai ICOR Kota Surakarta terlihat lebih tinggi. Investasi di Kota Surakarta didominasi oleh investasi jangka panjang.
7.	LQ dan Shift Share	Kota Surakarta memiliki keunggulan di hampir semua sektor, kecuali sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, serta sektor transportasi dan pergudangan. Dari aspek regional share (Nij), semua sektor memiliki nilai regional share yang positif, kecuali sektor pertambangan dan penggalian.
8.	Analisis Rasio PDRB	Rasio ekspor terhadap PDRB Kota Surakarta lebih rendah daripada Jawa Tengah namun lebih tinggi dari pada nasional. Nilai rasio ekspor terhadap PMTB Kota Surakarta selama 2010-2018 berkisar antara 0,45 s.d. 0,55 sementara untuk provinsi Jawa Tengah di atas 1. Kondisi ini menunjukkan bahwa produk domestik yang dihasilkan di Kota Surakarta masih lebih sedikit yang digunakan untuk ekspor dibandingkan untuk kegiatan investasi domestik. Rasio antara PAD dengan PDRB Kota Surakarta selama 2010-2018 memiliki tren positif, meski pada tahun 2017-2018 sempat mengalami penurunan.
9.	Analisis Perbandingan	Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta lebih tinggi daripada rata-rata kab/kota Jawa Tengah dan nasional namun lebih rendah daripada rata-rata kota di Jawa Tengah. Perbandingan inflasi dengan daerah lain relatif tidak berbeda signifikan (terkendali) Perbandingan tingkat kemiskinan juga lebih rendah daripada kab/kota di Jawa Tengah namun lebih tinggi daripada rata-rata kota di Jawa Tengah. Demikian juga indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan lebih tinggi daripada kota di Jawa Tengah

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Perekonomian Kota Surakarta 2020.